

**IMPLEMENTASI RENSTRA DALAM
PENGEMBANGAN KOMODITAS SEKTOR
PERTANIAN SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN DAYA
SAING DAERAH**

**(STUDI PADA AGROPOLITAN TANAMAN HIAS DESA GEGER KECAMATAN
SENDANG KABUPATEN TULUNGAGUNG)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**SHELI AKNESTESIA P
NIM. 125030607111014**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
MINAT PERENCANAAN PEMBANGUNAN
MALANG
2016**

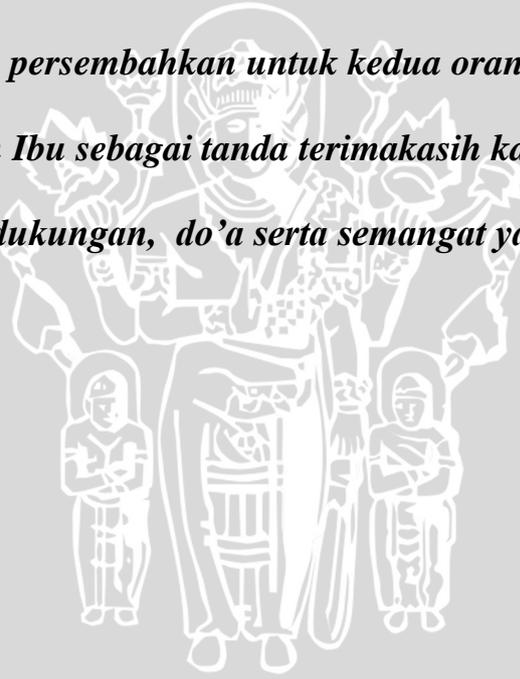
MOTTO

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

**“Pengetahuan
Adalah Kekuatan Yang Tidak Mempunyai Batas”**



***Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya,
Ayah dan Ibu sebagai tanda terimakasih karena
telah memberikan dukungan, do'a serta semangat yang tiada henti.***



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Implementasi Renstra Dalam Pengembangan Komoditas Sektor Pertanian Sebagai Upaya Peningkatan Daya Saing Daerah (Studi Pada Agropolitan Tanaman Hias Desa Geger, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung).

Disusun oleh : Sheli Aknestesia Putri

NIM : 125030607111014

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Publik

Minat : Perencanaan Pembangunan

Malang, 14 Juli 2016

**Komisi Pembimbing
Ketua**



Dr. Hermawan, S.IP, M.Si

NIP.19720405 200312 1 001

Anggota



Sujarwoto, S.IP, M.Si, Ph.D

NIP.19750130 200312 1 002

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi Fakultas Ilmu Administras

Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 9 Agustus 2016

Jam : 08.00

Skripsi Atas Nama : Sheli Aknestesia Putri

Judul : Implementasi Renstra Dalam Pengembangan Komoditas Sektor Pertanian Sebagai Upaya Peningkatan Daya Saing Daerah (Studi Pada Agropolitan Tanaman Hias Desa Geger, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung).

Dan dinyatakan **LULUS**

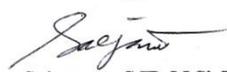
MAJELIS PENGUJI

Ketua


Dr. Hermawan, S.IP, M.Si
 NIP.19720405 200312 1 001
 Anggota


Dr. Abdullah Said, M.Si
 NIP. 19570911 198503 1 003

Anggota


Sujarwoto, S.IP, M.Si, Ph.D
 NIP.19750130 200312 1 002
 Anggota


Niken Lastiti V.A., SAP, MAP
 NIP. 19810201 200501 2 002

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, 14 Juli 2016



Nama : Sheli Aknestesia Putri

NIM : 125030607111014

RINGKASAN

Sheli Aknestesia Putri, 2016, **Implementasi Renstra Dalam Pengembangan Komoditas Sektor Pertanian Sebagai Upaya Peningkatan Daya Saing Daerah (Studi Pada Agropolitan Tanaman Hias Desa Geger Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung)**. Dr. Hermawan, S.IP, M.Si Sujarwoto, S.IP, M.Si, Ph.D, 131 hal + xv

Penelitian ini dilatar belakangi oleh ditetapkannya Kabupaten Tulungagung sebagai Kawasan Agropolitan pada tahun 2004 serta potensi sektor pertanian yang dimiliki oleh Kabupaten Tulungagung khususnya pada tanaman hias yang merupakan komoditas yang baru dikembangkan pada tahun 2012 oleh kelompok tani bungan “Sekar Wilis” dengan hasil panen tahun 2015 sebesar 50.000 tangkai bunga potong. Berdasarkan potensi tersebut, pemerintah Kabupaten Tulungagung berkomitmen untuk mengembangkan tanaman hias sebagai komoditas yang dapat meningkatkan daya saing terhadap daerah lain. Upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah untuk mengembangkan kawasan agropolitan tersebut adalah dengan menyusun rencana strategi pengembangan kawasan agropolitan. Pengembangan kawasan agropolitan tanaman hias tersebut berada di Kecamatan Sendang, namun pengembangan komoditas tanaman hias tersebut masih belum optimal, terdapat berbagai kendala yang mengakibatkan petani tidak dapat memenuhi kebutuhan pasar.

Perlu adanya identifikasi mengenai bagaimana implementasi strategi yang telah disusun oleh pemerintah tersebut sehingga dapat diketahui akar permasalahan yang timbul dan apa penyebabnya. Oleh karena hal tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Alat analisis yang digunakan adalah analisis data interaktif. Pada penelitian ini, peneliti telah melakukan tahapan *data collection*, *data condensation*, *data display* dan diversifikasi terkait dengan apa saja strategi yang telah disusun pemerintah, bagaimana implementasi kebijakan tersebut, dan faktor pendukung serta penghambat.

Hasil dari analisis penelitian ini antara lain strategi yang telah disusun oleh pemerintah Kabupaten Tulungagung sudah baik dan sesuai dengan rencana strategi kementerian pertanian periode 2015-2019. Implementasi kebijakan di lapangan yang cukup baik, namun terdapat beberapa permasalahan mengenai penyusunan anggaran yang memang sangat terbatas dan belum adanya anggaran khusus terkait komoditas tanaman hias, akses jalan yang sulit sehingga dapat menghambat pengimplementasian strategi.

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti antara lain memperkuat kerjasama dan koordinasi dengan masyarakat sekitar kawasan agropolitan maupun dengan tenaga ahli dibidang tanaman hias, pengusulan anggaran khusus kepada pemerintah pusat agar pengembangan komoditas tanaman hias bisa terlaksana secara optimal. Penguatan faktor pendukung dan perbaikan terhadap faktor-faktor yang menghambat implementasi strategi agar strategi dapat terlaksana dan sesuai dengan tujuan pengembangan kawasan agropolitan di Kabupaten Tulungagung.

Kata Kunci: Rencana Strategi, Implementasi Kebijakan, Daya Saing Daerah

SUMMARY

Sheli Aknestesia Daughter, 2016, **Implementation of the Strategy in the Development of Agriculture Commodities For Improving Regional Competitiveness (A Study on Ornamental Plants Agropolitan Geger village Sendang District of Tulungagung)**.Dr. Hermawan, S.IP, M.Si Sujarwoto, S.IP, M.Si, Ph.D, 131 pages + xv

The background of this research on the enactment of Tulungagung as Agropolitan in 2004 as well as the potential of the agricultural sector which is owned by Tulungagung especially on ornamental plants which are commodities that are newly developed in 2012 by the groups relationship "Sekar Wilis" with yields in 2015 amounted to 50,000 stems of cut flowers. Based on this potential, the government is committed to float Tulungagung ornamental plants as a commodity that can improve the competitiveness against other regions. Efforts have been made to develop the local governments agropolitan is by preparing a development strategy agropolitan. Agropolitan development of ornamental plants are located in the District of Sendang, but the development of ornamental crops are still not optimal, there are various obstacles that caused farmers can not meet the needs of the market.

The need for identification of how the implementation of the strategy that has been prepared by the government so it can be the root of the problems that arise and what causes it. Because it, this study used a qualitative approach with descriptive research. The analytical tool used is the interactive data analysis. In this study, researchers have carried out the stages of data collection, the data condensation, the data display and diversification associated with any strategy that had been developed government, how the policy implementation, and supporting factors and inhibitors experienced to implement the development.

The results of the analysis of this study include strategies that have been prepared by the government of Tulungagung is good and according to the agriculture ministry strategy plan period 2015-2019. Implementation of the strategy in the field was good, but there are several issues regarding budgeting is very limited and there is no specific budget terkkait ornamental crops, road access difficult that can hinder the implementation of the strategy.

Advice can be given by the other researchers to strengthen cooperation and coordination with the community around the agropolitan and with experts in the field of ornamental plants, special budget proposal to the central government to the development of ornamental crops could be implemented optimally. Strengthening the supporting factors and the improvement of the factors that hinder the implementation of the strategy so that strategies can be implemented and in accordance with the purpose of development of the area in Tulungagung agropolitan

Key Words: *The Strategic Planning, Policy Implementation, Regional Competetiveness.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Renstra Dalam Pengembangan Komoditas Sektor Pertanian Sebagai Upaya Peningkatan Daya Saing Daerah (Studi Pada Agropolitan Tanaman Hias Desa Geger Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung)”**.

Skripsi ini diajukan untuk menempuh ujian sarjana pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof, Dr. Bambang Supriyono selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak ChoirulSaleh, Dr.,M.Si dan Bapak Minto Hadi, Drs., M.Si selaku Ketua dan Sekertaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya.
3. Bapak Hermawan, Dr., S.IP, M.Si dan Ibu Erlita Cahyasari, SAP, MAP selaku Ketua dan Sekertaris Program Studi Perencanaan Pembangunan, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya.
4. Bapak Hermawan, Dr., S.IP, M.Si selaku Ketua Komisi Pembimbing dan Bapak Sujarwoto, S.IP, M.Si, Ph.D selaku Anggota Komisi Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta kesabarannya untuk terus

memberikan masukan yang membangun agar skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

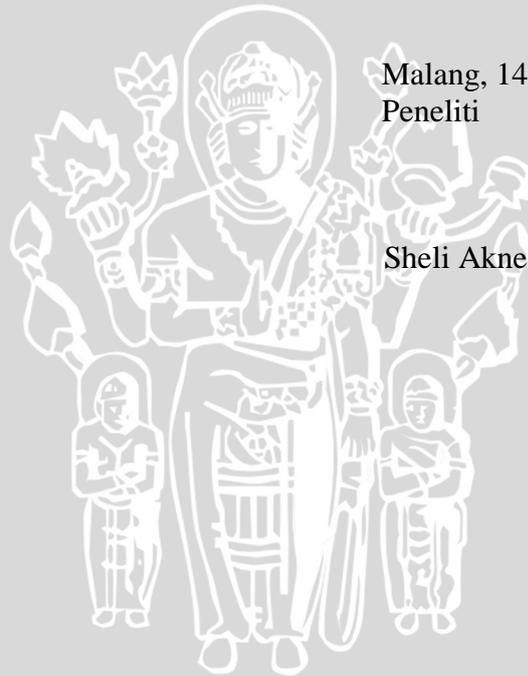
5. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama masa perkuliahan.
6. Seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Ilmu Administrasi Jurusan Administrasi Publik Universitas Brawijaya atas bantuan dan kerjasama yang telah diberikan.
7. Kedua orang tua saya Bapak Sanusi dan Ibu Ismiati serta saudara perempuanku Mei Aneke Putri yang selalu memberikan dukungan moril maupun materi serta doa yang tiada henti untuk kesuksesan anak dan kakanya, karena tiada kata seindah lantunan doa dan tiada doa yang paling khusuk selain doa yang terucap dari orang tua dan saudara perempuan tercinta.
8. Marheda Adi Saktiyo Wibowo S.STP yang telah memberikan semangat, dukungan serta do'a selama proses pengerjaan sampai selesainya skripsi ini.
9. Ibu Maya Dewajanti, S.Si selaku Kasubid Sumberdaya Lahan dan Kelautan pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten Tulungagung beserta seluruh Kabid dan Kasubid yang terlibat dalam tim POKJA Agropolitan yang telah membantu peneliti dalam memperoleh data penelitian.
10. Sahabat saya Rericia Ivara Nabila, Siti Nabila Rani Fitri, Hanna Syabrina, Titik Nur Wilatul Hida, Fitra Nanda Mulia Rahmani yang telah memberikan

bantuan, dukungan, semangat dan saran kepada peneliti dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi.

11. Teman-teman Perencanaan Pembangunan “Weldy, Agus, Tino, Anas, Anggi, Muhsin” dan keluarga besar prodi Perencanaan Pembangunan yang tidak dapat saya sebutkan satu-satu yang telah memberikan semangat dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi.
12. Seluruh pihak yang turut membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

Malang, 14 Juli 2016
Peneliti

Sheli Aknestesia P.



DAFTAR ISI

Halaman

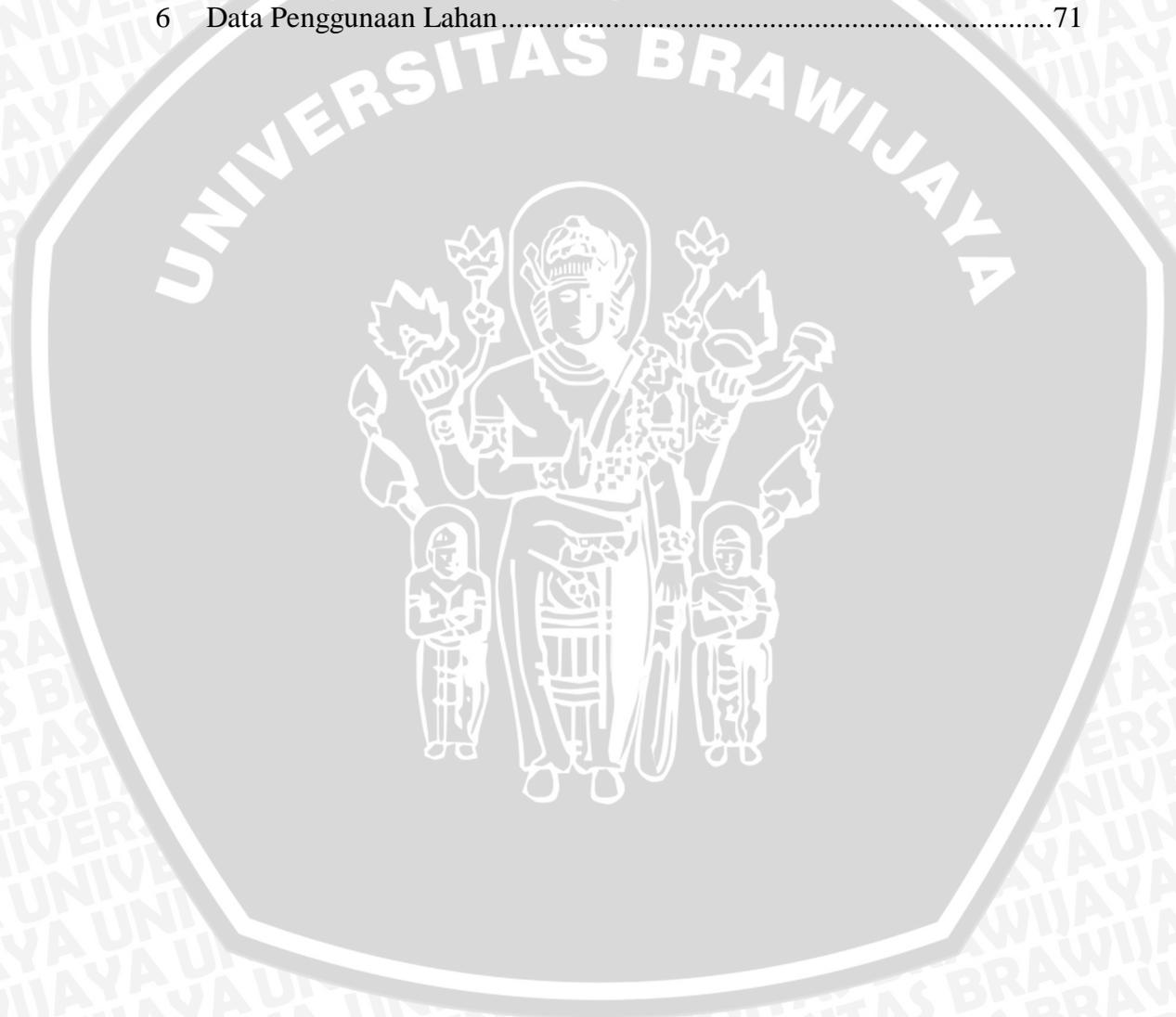
MOTTO	i
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
TANDA PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	v
RINGKASAN	vi
SUMMARY.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTARTABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Kontribusi Penelitian	13
E. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Perencanaan Pembangunan Daerah	
1. Pengertian Perencanaan	16
2. Unsur-unsur Perencanaan	17
3. Pengertian Pembangunan.....	17
4. Ciri dan Fungsi Perencanaan Pembangunan.....	18
5. Proses Perencanaan Pembangunan Daerah.....	19
6. Perencanaan Pembangunan Daerah	20
B. Pembangunan Ekonomi Daerah	
1. Pembangunan Ekonomi	21
2. Pengembangan Ekonomi Lokal (<i>Local Economic Development</i>)	22
C. Perencanaan Strategi	
1. Pengertian Strategi	24
2. Tipe-tipe Strategi	25
3. Manfaat Strategi.....	26
4. Perencanaan Strategi.....	27
5. Strategi Pembangunan Pertanian	29
D. Implementasi	
1. Pengertian Implementasi.....	34
2. Tahapan Implementasi	36

3. Unsur-unsur Implementasi.....	39
4. Model- model Implementasi.....	40
E. Daya Saing Daerah	45
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	47
B. Fokus Penelitian	48
C. Lokasi dan Situs Penelitian.....	49
D. Sumber Data	50
E. Teknik Pengumpulan Data	52
F. Instrumen Penelitian	55
G. Analisis Data.....	56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian.....	60
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	60
a. Gambaran Umum Kabupaten Tulungagung.....	60
b. Gambaran Umum Kecamatan Sendang.....	63
c. Kawasan Agropolitan Sendang (KAS)	66
d. Kondisi Desa Geger.....	69
2. Gambaran Umum Situs Penelitian	72
a. Gambaran Umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung	72
b. Gambaran Umum Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tulungagung.....	74
c. Gambaran Umum Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Tulungagung	79
d. Gambaran Umum Kelompok “Sekar Wilis”	84
B. Penyajian Data dan Fokus Penelitian	87
1. Implementasi Renstra dalam Pengembangan Komoditas Sektor Pertanian Sebagai Upaya Peningkatan Daya Saing Daerah pada Komoditas Tanaman Hias Desa Geger Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung berdasarkan Teori Geprge C. Edward III	87
a. Komunikasi.....	91
b. Sumber Daya (<i>resources</i>)	94
c. Disposisi (<i>disposition</i>)	100
d. Struktur Birokrasi (<i>bureaucratic structure</i>)	102
2. Faktor Pendukung dan Pesnghambat Implementasi Renstra dalam Pengembangan Komoditas Sektor Pertanian Sebagai Upaya Peningkatan Daya Saing Daerah pada Agropolitan Tanaman Hias Desa Geger Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung.....	103

a.	Faktor Pendukung	103
1)	Letak Geografis	103
2)	Sumber Daya Manusia.....	105
b.	Faktor Penghambat	107
1)	Jalur Transportasi	107
2)	Pendanaan.....	109
C.	Analisis Data.....	111
1.	Implementasi Renstra dalam Pengembangan Komoditas Sektor Pertanian Sebagai Upaya Peningkatan Daya Saing Daerah pada Komoditas Tanaman Hias Desa Geger Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung berdasarkan Teori George C. Edward III.....	111
a.	Komunikasi.....	113
b.	Sumber Daya (<i>resources</i>)	114
c.	Disposisi (<i>disposition</i>)	116
d.	Struktur Birokrasi (<i>bureaucratic structure</i>)	117
2.	Faktor Pendukung dan Pesnghambat Implementasi Renstra dalam Pengembangan Komoditas Sektor Pertanian Sebagai Upaya Peningkatan Daya Saing Daerah pada Agropolitan Tanaman Hias Desa Geger Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung	118
a.	Faktor Pendukung	118
1)	Letak Geografis	118
2)	Sumber Daya Manusia.....	119
b.	Faktor Penghambat	121
1)	Jalur Transportasi	121
2)	Pendanaan.....	122
BAB V	PENUTUP	124
A.	Kesimpulan.....	124
B.	Saran	128
DAFTAR PUSTAKA	129
LAMPIRAN	133

DAFTAR TABEL

No.	Judul	Halaman
1	Luas Lahan Sawah Menurut Provinsi Di Indonesia.....	4
2	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Tulungagung.....	5
3	Data Panen Agropolitan.....	8
4	Data Luas Areal Tanam, Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Komoditas Tanaman Hias Tahun 2015.....	11
5	Luas Wilayah Kecamatan Sendang.....	64
6	Data Penggunaan Lahan.....	71



DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Halaman
1	Skema Perencanaan yang Ideal	20
2	Model Implementasi Kebijakan George C. Edward III	42
3	Model Analisis Data Interaktif	57
4	Peta Kabupaten Tulungagung	61
5	Potensi Kecamatan Sendang	65
6	Struktur Organisasi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	73
7	Struktur Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura	78
8	Struktur Organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian.....	83
9	Struktur Organisasi Badan Kelompok Tani “Sekar Wilis”	86
10	Akses Jakan Menuju Tempat Budidaya Bunga Krisan	108



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan daerah dapat diartikan sebagai pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh suatu daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan yang dimaksudkan adalah dapat dirasakan secara nyata, baik dalam aspek pendapatan perkapita, kesempatan kerja, lapangan usaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Hal ini seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008, yaitu tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Pembangunan Daerah identik dengan upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dianggap sebagai indikator keberhasilan pembangunan daerah. Pada hakikatnya, pertumbuhan ekonomi bukan satu-satunya indikator dalam keberhasilan pembangunan daerah. Dalam suatu pembangunan daerah juga perlu memperhatikan kontribusi masyarakat terhadap pertumbuhan ekonomi atau seberapa jauh pertumbuhan ekonomi itu dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat (Arsyad, 2010:11). Untuk mewujudkan pembangunan daerah yang berkualitas dan dapat dirasakan seluruh masyarakat, maka diperlukan penyusunan rencana pembangunan daerah yang baik.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal ini karena pembangunan yang dilaksanakan di daerah adalah demi mencapai keselarasan dinamika pembangunan nasional di setiap daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan oleh pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan sesuai dengan peran dan kewenangan masing-masing, dengan mengintegrasikan antara rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah, untuk kemudian dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki pada masing-masing daerah (Riyadi dan Supriyadi, 2003:7).

Salah satu upaya mempercepat pembangunan ekonomi, pemerintah berusaha semaksimal mungkin untuk memacu sektor-sektor yang dianggap memiliki peluang dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. salah satunya adalah potensi pada sektor pertanian, karena sektor pertanian merupakan sektor primer yang menyumbang hampir setengah dari perekonomian di Indonesia terutama di Jawa Timur (Irsanarham, 2011:2). Sektor pertanian mampu memberikan sumbangan terhadap pemenuhan kebutuhan pangan nasional melalui subsektor pertaniannya. Sub sektor pertanian tersebut meliputi sektor tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, serta perikanan. Selain pada sub sektor tersebut, pengembangan sektor pertanian juga dapat dilakukan melalui sektor tanaman holtikultura yang meliputi jenis tanaman taman seperti buah-buahan, sayuran, serta tanaman hias. Pengembangan sektor pertanian tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan produktivitas serta efisiensi usaha untuk meningkatkan daya saing daerah dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut, untuk mencapai keberhasilan dalam pembangunan sektor pertanian, maka diperlukan perencanaan strategi serta implementasi rencana yang sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah dicita-citakan.

Menurut Brison (2007:4) perencanaan strategis diimplementasikan dengan menentukan suatu strategi sebagai pendekatan yang logis, rasional serta sistematis yang dapat dijadikan acuan untuk mempermudah perumusan rencana strategi. Strategi merupakan suatu rencana tentang langkah-langkah sistematis yang dituangkan dalam bentuk program atau kebijakan yang disusun berdasarkan berbagai pertimbangan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Musyoka (2011: 1):

“Strategy is the direction and scope of an organization over the long-term, which achieves advantage for the organization through its configuration of resources within a challenging environment, to meet the needs and to fulfil stakeholder expectations” (Artinya: Strategi adalah arah dan ruang lingkup suatu organisasi dalam jangka panjang, yang mencapai keuntungan bagi organisasi melalui konfigurasi sumber daya dalam lingkungan yang menantang, untuk memenuhi kebutuhan dan memenuhi harapan para stakeholder).

Setiap strategi yang dibuat akan selalu menuntut implementasinya. Implementasi strategi merupakan keseluruhan aktivitas serta pilihan-pilihan yang dibutuhkan untuk menjalankan suatu perencanaan strategi. Implementasi. Andrew (2013:2) mengatakan bahwa *“Strategy implementation is process or paths that an organization takes in order to be or reach where it sees itself in the future. It’s the process or path that leads to where the organization sees itself in the future”*. (Artinya: implementasi strategi adalah suatu proses atau arah yang dibutuhkan organisasi untuk mencapai tujuannya, merupakan suatu proses atau jalan yang mengarah kemana tujuan organisasi di masa depan). Menurut Musyoka (2011:2):

“Strategi Implementation is largely an internal administrative activity. It entails working through others, organizing, motivating, culture creating strong links between strategy and how the organization operates. It also entails a process of converting the formulated strategies into viable operations that will yield the organization’s targeted results”.

(Artinya: Implementasi strategi sebagian besar merupakan administrasi internal. Hal tersebut memerlukan kerjasama dengan pihak lain, pengorganisasian, memotivasi, budaya menciptakan hubungan yang kuat antara strategi dan bagaimana organisasi beroperasi. Hal ini juga memerlukan proses mengubah strategi yang dirumuskan dalam operasi yang layak yang akan menghasilkan tujuan organisasi).

Tabel 1. Luas Lahan Sawah Menurut Provinsi Di Indonesia

No	Provinsi	Luas Lahan (Ha)
1	Aceh	300,808.00
2	Sumatera Utara	433,346.00
3	Sumatera Barat	224,182.00
4	Riau	93,338.00
5	Jambi	113,546.00
6	Sumatera Selatan	612,424.00
7	Bengkulu	93,382.00
8	Lampung	360,237.00
9	Bangka Belitung	5,358.00
10	Kepulauan Riau	487.00
11	DKI Jakarta	895.00
12	Jawa Barat	925,042.00
13	Jawa Tengah	952,525.00
14	D.I Yogyakarta	55,336.00
15	Jawa Timur	1,102,863.00
16	Banten	194,716.00
17	Bali	78,425.00
18	Nusa Tenggara Barat	253,021.00
19	Nusa Tenggara Timur	169,063.00
20	Kalimantan Barat	330,883.00
21	Kalimantan Tengah	210,807.00
22	Kalimantan Selatan	440,429.00
23	Kalimantan Timur	63,306.00
24	Kalimantan Utara	21,762.00
25	Sulawesi Utara	56,157.00
26	Sulawesi Tengah	146,721.00
27	Sulawesi Selatan	602,728.00
28	Sulawesi Tenggara	95,378.00

No	Provinsi	Luas Lahan (Ha)
29	Gorontalo	32,239.00
30	Sulawesi Barat	61,070.00
31	Maluku	15,042.00
32	Maluku Utara	10,510.00
33	Papua Barat	8,727.00
34	Papua	42,350.00

Sumber: BPS 2014

Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi di Indonesia yang memiliki lahan pertanian paling luas. Upaya pembangunan pertanian di Provinsi Jawa Timur dilakukan dengan memadukan pertumbuhan dan pemerataan dengan cara keberpihakan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan peran masyarakat dalam sektor pertanian. Berkaitan dengan upaya pengembangan komoditas sektor pertanian, daerah-daerah di Provinsi Jawa Timur memiliki potensi pengembangan pertanian yang baik, sehingga sangat memerlukan perencanaan strategi dalam upaya pengembangan komoditas sektor pertaniannya. Salah satu daerah di Provinsi Jawa Timur yang memiliki potensi dalam sektor pertanian adalah Kabupaten Tulungagung.

Tabel 2. Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Tulungagung

	Sektor	2010	2011	2012	2013	2014
1	Pertanian	1.57	4.55	4.92	3.09	3.18
2	Pertambangan dan Penggalian	4.89	5.16	1.55	0.95	3.25
3	Industri Pengolahan	4.04	5.24	5.61	4.93	6.26
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	5.58	6.76	2.47	5.82	1.28
5	Konstruksi Bangunan	3.02	6.23	6.3	7.43	1.28
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	8.37	8.46	8.49	7.9	5.46
7	Pengangkutan dan Komunikasi	6.01	6.91	7.15	10.08	9.6

8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	10.12	12.44	12.65	13.12	5.9
9	Jasa-jasa	3.38	3.02	1.94	5.74	5.25
Jumlah PDRB		5.82	6.37	6.47	6.03	5.45

Sumber: Tulungagung Dalam Angka 2015

Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang merupakan daerah agraris dan memiliki potensi kekayaan alam yang melimpah salah satunya pada sektor pertanian. Letak Kabupaten Tulungagung yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Trenggalek, Kediri dan Blitar membuat Kabupaten Tulungagung dapat berkembang dan bersaing dengan daerah lain melalui komoditas yang dimiliki pada sektor pertaniannya. Berkaitan dengan upaya pembangunan sektor pertanian, Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung telah menetapkan suatu kawasan pengembangan yang berbasis pertanian atau yang biasa disebut dengan Kawasan Agropolitan. Penetapan Kawasan Agropolitan di Kecamatan Sendang berdasarkan pada Surat Keputusan (SK) Bupati Tulungagung Nomor 522 Tahun 2004 yang juga diperkuat dengan SK Gubernur Jawa Timur Nomor 520/5684/201.2/2005 tentang penetapan Kabupaten Tulungagung sebagai lokasi Kawasan Agropolita. Agropolitan merupakan suatu model pembangunan yang mengandalkan desentralisasi, pembangunan infrastruktur setara kota di wilayah pedesaan sehingga mendorong kegiatan ekonomi. Pengembangan kawasan agropolitan bertujuan untuk meningkatkan produksi sektor pertanian yang meliputi sub sektor tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan serta perikanan, dan mendorong keberagaman aktivitas perekonomian masyarakat di pedesaan.

(tulungagung.go.id)

Sebagai tindak lanjut dari SK Bupati tentang penetapan kawasan agropolitan tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung kemudian menyusun dan menetapkan renstra tentang pengembangan kawasan agropolitan dimana Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura sebagai *leading sector* nya. Selain Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura, tim POKJA pengembangan kawasan agropolitan juga bekerjasama dengan beberapa SKPD sebagai mitra untuk menunjang sarana dan prasarana seperti diantaranya Dinas PU, Pengairan, Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian. Kawasan agropolitan sendiri terletak di Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung.

Kawasan Agropolitan Sendang (KAS) memiliki luas lahan yang totalnya 105.78 Km², yang diantaranya dimanfaatkan sebagai lahan persawahan sekitar lebih dari 2.462 ha, lahan tanaman sayur 970 ha, tanaman palawija 3.812 ha, lahan perkebunan 361 ha, kehutanan 76 ha serta ditanami buah-buahan sekitar 8 ha (*Balai Penelitian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika, 2015*). Sampai saat ini di daerah Kecamatan Sendang, usaha tani yang sudah berjalan dengan baik adalah peternakan. Kecamatan Sendang diharapkan dapat menjadi pendukung dalam mewujudkan pembangunan pertanian di Jawa Timur dengan mengoptimalkan potensi produk lokal kawasan tersebut. Selain terdapat berbagai sub sektor pertanian yang dikembangkan di Kawasan Agropolitan Sendang (KAS), pada tahun 2012 kawasan agropolitan tersebut memiliki komoditas baru di bidang holtikultura yang berupa komoditas tanaman hias, tanaman yang dikembangkan adalah Seruni (*crisan*), Sedap Malam, *Aster*, *Peacock*, *Pillo Dendron*. Holtikultura merupakan cabang pertanian tanaman yang meliputi tanaman taman seperti buah-

buah, sayur-mayur serta tanaman hias (Pengembangan Kawasan Agropolitan & Minapolitan di Kabupaten Tulungagung, 2014:28). Komoditas ini merupakan bagian dari bidang produksi hortikultura tanaman hias dan biofarmaka. Tanaman hias hanya dikembangkan oleh kelompok tani di Desa Geger Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung.

Desa Geger Kecamatan Sendang merupakan daerah yang ada di dataran tinggi Kabupaten Tulungagung. Desa Geger yang berada di lereng Gunung Wilis ini memiliki keunggulan geografis dengan topografinya yang terletak di ketinggian ± 1200 meter di atas permukaan laut dan suhu $17-24^{\circ}\text{C}$, serta kesuburan tanahnya yang menyebabkan daerah tersebut mampu menghasilkan komoditi pertanian yang berkualitas dan mempunyai kuantitas yang cukup besar.

Tabel 3. Data Panen Agropolitan

No	Komoditi	Lokasi			Luas Lahan	Jmlh Produksi	Produktivitas	Daerah Pemasaran	KET
		Kec.	Desa	Nama Kelompok					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kobis	Sendang	Geger	Agro Bumi Lestari (ABL)	23.43	492	21	Lokal	
2	Brokoli			Tani Maju	3.27	49	15		
3	Sawi Putih				35.55	711	20		
4	Wortel				27.6	552	20		
5	Sawi Baby				-	-	-		
6	Kentang				38.6	772	20		
7	Bawang Prey				2.75	22	8		
8	Lobak				3.07	92	30		
9	Labu Siam				-	-	-		
10	Buncis				6.5	52	8		
11	Kapri				5.75	46	8		
12	Bunga Krisan			Sekar Wilis	-	5600	-		

Sumber: Badan Ketahanan Pangan dan Penelitian Kabupaten Tulungagung 2014

Bunga krisan merupakan komoditas tanaman hias yang sedang gencar di kembangkan di Desa Geger Kecamatan Sendang. Komoditas bunga krisan ini selain dijadikan sumber penghasilan sebagai bunga potong juga dimanfaatkan sebagai tempat berwisata bagi masyarakat. Saat ini pembudidayaan bunga krisan di Desa Geger dilakukan oleh kelompok tani “Sekar Wilis”, dimana pembudidayaan bunga tersebut dilakukan dengan membangun *Green House*.

Kendala yang sering dihadapi dalam upaya pengembangan sektor pertanian terutama pada komoditas bunga krisan di Desa Geger Kecamatan Sendang ini berdasarkan wawancara dengan Ketua Kelompok tani (Tanggal 7/02/2016) yaitu masih adanya keterbatasan modal bagi petani, pengadaan alat-alat pertanian, minimnya pengetahuan dan ketrampilan petani serta akses jalan yang sulit menyebabkan masih rendahnya pengembangan komoditas tanaman hias ini di Desa Geger Kecamatan Sendang. Petani masih belum bisa memenuhi pesanan terhadap kebutuhan bunga dikarenakan keterbatasan kemampuannya dalam mengembangkan komoditas ini.

Peran dan potensi sumberdaya manusia dalam mengembangkan sektor pertanian tanaman hias ini sangat penting. Peran pemerintah untuk membuat rencana strategi terkait dengan upaya pengembangan komoditas bunga krisan di Desa Geger Kecamatan Sendang sangat membantu agar komoditas tersebut dapat bersaing dengan daerah lain. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah diantaranya seperti pembuatan renstra pengembangan kawasan agropolitan yang di dalamnya memuat strategi tentang pengembangan komoditas tanaman hias.

Strategi pemerintah ini disusun pada tahun 2004 setelah turunnya SK penetapan Kawasan Agropolitan.

Pemerintah telah memberikan bantuan-bantuan dalam rangka mengembangkan komoditas tanaman hias ini, diantaranya memberikan penyuluhan kepada petani, memberikan pelatihan, bantuan pupuk dan obat-obatan pestisida dan lain-lain. Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengembangkan komoditas pertanian tanaman hias ini masih belum terlaksana secara optimal, karena hingga sekarang petani bunga masih banyak mengalami kendala salah satunya dalam memenuhi kebutuhan pasar komoditas tanaman hias. Target pemerintah dalam mengembangkan komoditas pertanian tanaman hias ini adalah mampu memenuhi kebutuhan pasar tanaman hias di daerah sekitar seperti Kabupaten Blitar, Kabupaten Kediri, Kabupaten Trenggalek, serta daerah Kabupaten Tulungagung sendiri.

Selain itu, potensi tanaman hias ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan daya saing Kabupaten Tulungagung, karena selain hasil produksi tanaman hias yang memiliki beberapa kelebihan dibandingkan hasil panen dari daerah lain, daerah di sekitar Kabupaten Tulungagung seperti Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri masih belum bisa mengembangkan tanaman hias sedangkan potensi pasar tanaman hias sangat bagus. Berikut adalah data areal tanam, luas panen, produksi dan produksi komoditas tanaman hias di KAS. Pada tabel berikut dapat diketahui berbagaimacam tanaman hias yang dikembangkan dan hasil panen terbesar adalah tanaman bunga krisan.

Tabel 4. Data Luas Areal Tanam, Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Komoditas Tanaman Hias Tahun 2015

No	Komoditas	Tahun 2015			
		Luas Tanam Baru (m ²)	Luas Panen (m ²)	Produktivitas (Tangkai/m ²)	Produksi (Tangkai)
1	Anggrek	493	259	18.28	4,735
2	Anthurium Bunga	142	100	10.00	1,000
3	Heliconia	130	111	4.02	446
4	Krisan	67	73	684.93	50,000
5	Melati**)	63	1,174	10.38	12,168
6	Palem*)	250	94	2.91	274
7	Kamboja Jepang*)	12	220	4.50	990
8	Soka (Ixora*)	50	30	25.00	7,500
9	Phylodendrum*)	263	173	276.00	4,774
10	Anthurium Daun*)	-	-	-	18

Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tulungagung 2015

Keterangan:

*Satuan produksi dalam pohon dan produktivitas dalam pohon / m²

** Satuan produksi dalam kg dan produktivitas dalam kg / m²

Berdasarkan latar belakang tersebut, untuk mengetahui sejauh mana capaian target dan faktor pendukung serta penghambat dalam pengembangan komoditas pertanian tanaman hias ini, maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Implementasi Renstra dalam Pengembangan Komoditas Sektor Pertanian Sebagai Upaya Peningkatan Daya Saing Daerah”**. Studi pada Agropolitan Tanaman Hias di Desa Geger Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang seperti yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah implementasi renstra dalam pengembangan komoditas sektor pertanian sebagai upaya peningkatan daya saing daerah pada agropolitan tanaman hias di Desa Geger Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung?
2. Apa sajakah faktor pendukung dan penghambat implementasi renstra dalam pengembangan komoditas sektor pertanian sebagai upaya peningkatan daya saing daerah studi pada agropolitan tanaman hias di Desa Geger Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendiskripsikan dan menganalisis bagaimana implementasi renstra dalam pengembangan komoditas sektor pertanian sebagai upaya peningkatan daya saing daerah studi pada agropolitan tanaman hias di Desa Geger Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi renstra dalam pengembangan komoditas sektor pertanian sebagai upaya peningkatan daya saing daerah studi pada agropolitan tanaman hias di Desa Geger Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung.

D. Kontribusi Penelitian

Berdasarkan pada hasil penelitian ini nantinya terdapat kontribusi yang dapat diterima dari semua pihak yang terkait dengan tulisan ini. Adapun kontribusi dari penelitian ini baik secara akademis maupun secara praktis, sebagai berikut:

1. Kontribusi Akademis

- a. Sebagai sumbangan pemikiran dalam perkembangan studi ilmu perencanaan pembangunan dalam menentukan strategi pengembangan sektor pertanian dengan komoditas tanaman hias.
- b. Sebagai wacana dan rujukan penelitian selanjutnya tentang pembangunan ekonomi daerah.

2. Kontribusi Praktis

- a. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung dalam penyusunan strategi pengembangan sektor pertanian komoditas tanaman hias untuk tahun-tahun berikutnya.
- b. Sebagai bahan pemikiran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi ilmu administrasi publik khususnya perencanaan pembangunan sebagai bahan penelitian selanjutnya.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai susunan secara keseluruhan dari suatu karya ilmiah agar dapat mempermudah bagi pembaca untuk mengetahui isi dari skripsi ini. Demikian hal nya penulisan dalam penelitian

ini disesuaikan dengan pengaturan yang telah ditetapkan oleh Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini membahas mengenai latar belakang perlunya penulis mengadakan penelitian, yang mengemukakan tentang permasalahan yang berkaitan dengan judul yang di ambil oleh penulis. Kemudian, pada bab ini juga berisi rumusan masalah yang merupakan kajian atau pokok pembahasan yang akan dibahas oleh peneliti. Selanjutnya, tujuan penelitian yang merupakan hal yang diharapkan dalam penelitian. Selain itu, pada bab ini juga berisi kontribusi penelitian baik kontribusi akademik maupun kontribusi secara praktis. Serta pada bab ini juga terdapat sistematika penulisan yang merupakan uraian singkat dari bab dalam skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab tinjauan pustaka ini menjelaskan tentang teori yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian. Teori-teori tersebut nantinya akan menjadi dasar dalam kajian pokok pembahasan, ditambah dengan prespektif dari peneliti sendiri mengenai teori-teori dasar tersebut

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang langkah-langkan yang akan dilakukan dalam penelitian. Termasuk di dalamnya jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, lokasi dan situs penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrument penelitian dan metode analisis.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan hasil dari penelitian dan menyajikan data yang telah diperoleh dari penelitian. Mendeskripsikan mengenai objek penelitian yang sesuai dengan keperluan penelitian. Deskripsi tersebut meliputi kondisi geografis lokasi penelitian, gambaran umum situs penelitian, serta hasil analisis yang dilakukan baik secara perhitungan maupun dengan teori yang digunakan.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan yang didapatkan dari hasil pembahasan selama penelitian. Serta dalam bab ini juga menguraikan saran-saran yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Pengertian Perencanaan

Secara sederhana, perencanaan adalah suatu proses yang dilakukan dengan menuangkan gagasan-gagasan atau ide-ide mengenai suatu pekerjaan yang dilakukan di masa yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam mendefinisikan arti dari perencanaan tersebut seringkali terdapat perbedaan yang melahirkan keragaman dalam mendefinisikan arti dan makna perencanaan itu sendiri. Hal itu terjadi karena adanya perbedaan sudut pandang, perbedaan fokus perhatian, dan perbedaan luasnya bidang yang tercakup dalam perencanaan itu sendiri (Tarigan, 2008:1). Menurut Conyers (1984: 60) perencanaan adalah suatu proses yang bersifat kontinyu, yang terdiri dari keputusan dan pilihan-pilihan dari berbagai cara untuk menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan tertentu di masa depan.

Derdasarkan uraian di atas, maka perencanaan merupakan proses menentukan alternatif-alternatif yang akan digunakan dalam upaya untuk mencapai suatu tujuan. Proses perencanaan harus memperhatikan kondisi dan isu-isu yang sedang berkembang di masyarakat. Pertimbangan mengenai kondisi dan isu strategis tersebut sangat penting agar suatu rencana yang telah disusun bisa tepat sasaran pada saat pelaksanaan.

2. Unsur-unsur Perencanaan

Pada tahap perencanaan pada umumnya terkandung beberapa hal pokok yang lebih tepat dikatakan sebagai unsur-unsur dalam perencanaan. Adapun unsur-unsur itu meliputi:

- a. Adanya asumsi-asumsi yang didasarkan pada fakta-fakta.
Ini berarti bahwa perencanaan hendaknya disusun berdasarkan pada asumsi-asumsi yang didukung dengan fakta-fakta atau bukti-bukti yang ada. Hal ini menjadi penting karena hasil perencanaan merupakan dasar bagi pelaksanaan suatu kegiatan atau aktivitas.
- b. Adanya alternatif-alternatif.
Alternatif-alternatif atau pilihan-pilihan sebagai dasar penentuan kegiatan yang akan dilakukan. Ini berarti bahwa dalam menyusun rencana perlu memperhatikan berbagai alternatif/pilihan sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan.
- c. Adanya tujuan yang ingin dicapai.
Perencanaan merupakan suatu alat/sarana untuk mencapai tujuan melalui pelaksanaan kegiatan
- d. Bersifat memprediksi sebagai langkah untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang dapat mempengaruhi proses perencanaan.
- e. Adanya kebijaksanaan sebagai hasil keputusan yang harus dilaksanakan.

(Riyadi dan Bratakusumah, 2003: 3)

3. Pengertian Pembangunan

Pembangunan merupakan bentuk atau jalan dalam mewujudkan peradaban, tanpa pembangunan peradaban tidak akan terwujud. Pembangunan adalah tentang perubahan dan pertumbuhan. Perubahan merupakan perubahan sosial sedangkan pertumbuhan merupakan peningkatan ekonomi masyarakat (Hanani dkk, 2003: 29).

Para ahli juga mengemukakan beberapa pengertian pembangunan yang bermacam-macam seperti menurut Ginanjar Kartasasmita (1994) dalam Riyadi dan Supriyadi (2003:4) menyatakan “pembangunan merupakan suatu proses

perubahan kearah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana.” Menurut Siagian dalam Riyadi dan Supriyadi (2003: 6), pembangunan adalah:

“Pembangunan sebagai suatu perubahan, mewujudkan suatu kondisi kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang lebih baik dari kondisi sekarang, sedangkan pembangunan sebagai suatu pertumbuhan menunjukkan kemampuan suatu kelompok untuk terus berkembang, baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan merupakan sesuatu yang mutlak harus terjadi dalam pembangunan.” (Riyadi dan Supriyadi, 2003:6)

4. Ciri dan Fungsi Perencanaan Pembangunan

Berkaitan dengan proses perencanaan pembangunan, terdapat ciri-ciri dan fungsi tertentu yang tentunya harus bersifat membangun. Seperti yang dikemukakan oleh Wibowo (2008:16-17) ciri-ciri perencanaan pembangunan adalah:

- a. Usaha yang dicerminkan dalam rencana untuk mencapai perkembangan sosial ekonomi yang mantap (*steady social economic growth*). Hal ini dicerminkan dalam usaha pertumbuhan ekonomi yang positif.
- b. Usaha yang dicerminkan dalam rencana untuk meningkatkan pendapatan per kapita.
- c. Usaha untuk mengadakan perubahan struktur ekonomi. Hal ini seringkali disebut sebagai usaha diversifikasi ekonomi.
- d. Usaha perluasan lapangan kerja
- e. Usaha pemerataan pembangunan
- f. Usaha pembinaan lembaga-lembaga ekonomi masyarakat yang lebih menunjang kegiatan-kegiatan pembangunan.
- g. Usaha secara terus-menerus menjaga stabilitas ekonomi (Wibowo, 2008:16-17).

Fungsi perencanaan menurut Arsyad (2010:160) adalah sebagai berikut:

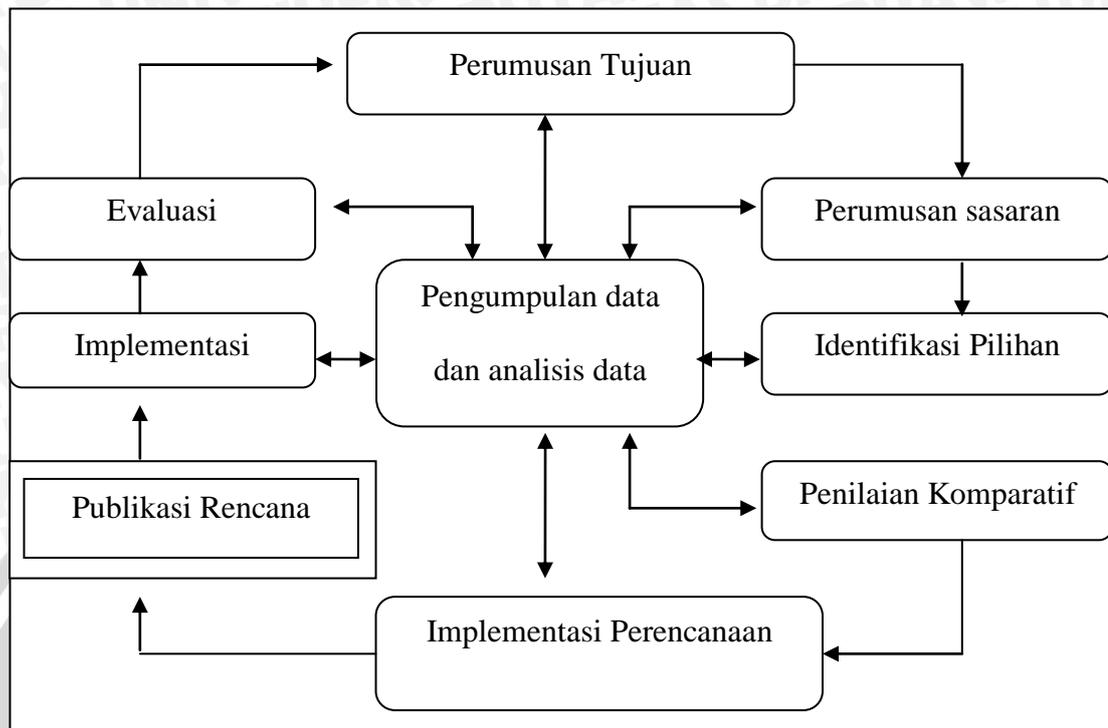
- a. Perencanaan diharapkan mengandung suatu pengarahan kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditukkan kepada pencapaian tujuan pembangunan.

- b. Perencanaan dapat melakukan perkiraan potensi-potensi, prospek-prospek perkembangan, hambatan serta resiko yang mungkin dihadapi pada masa yang akan datang.
- c. Perencanaan memberikan kesempatan untuk mengadakan pilihan yang terbaik.
- d. Perencanaan melakukan penyusunan skala prioritas dari segi pentingnya tujuan.
- e. Perencanaan sebagai alat ukur untuk mengadakan pengawasan dan evaluasi.

Berdasarkan ciri-ciri dan fungsi tersebut, dapat dilihat bahwa perencanaan sangatlah penting dalam mencapai suatu tujuan. Perencanaan merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan di masa depan dengan pertimbangan kejadian-kejadian yang terjadi di masa lampau dan masa sekarang. Mempelajari kejadian di masa lampau dan masa sekarang sangatlah penting dalam suatu rencana yang bertujuan untuk dapat memperkirakan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di masa mendatang.

5. Proses Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan pembangunan daerah mempunyai tahapan-tahapan yang rinci, seperti yang diungkapkan oleh Bendavid-Val dalam Kuncoro (2004:50) menjelaskan bahwa tahapan-tahapan perencanaan pembangunan daerah seperti pada gambar berikut:



Gambar 1. Skema Perencanaan yang Ideal

Sumber : Bendavid – Val (1991) dalam Kuncoro (2004:50)

berdasarkan tahapan perencanaan pembangunan daerah yang dikemukakan oleh Bendavid-Val (1991) dalam Kuncoro (2004:49) terdapat 3 hal, yaitu:

- a. Pengumpulan dan analisis data bukan merupakan suatu tahapan dalam proses perencanaan secara keseluruhan, tetapi secara terus-menerus berfungsi mendukung dan menyediakan informasi pada setiap tahap perencanaan.
- b. Semua tahap dalam proses perencanaan merupakan bagian dari siklus, kemudian tujuan-tujuan secara periodic ditinjau kembali, saran-saran dirumuskan kembali, dan seterusnya.
- c. Suatu rencana yang sudah dialokasikan bukanlah merupakan akhir dari suatu proses, tetapi sesuatu yang dihasilkan dari waktu ke waktu untuk kepentingan-kepentingan praktis.

6. Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan pembangunan merupakan suatu tahapan awal dalam proses pembangunan. Sebagai tahap awal, perencanaan pembangunan akan menjadi pedoman dan acuan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan. Karena itu,

perencanaan pembangunan hendaknya bersifat *implementatif* (dapat dilaksanakan) dan *aplikatif* (dapat diterapkan).

Berkaitan dengan suatu daerah sebagai wilayah pembangunan yang kemudian terbentuk suatu konsep perencanaan daerah, maka perencanaan pembangunan daerah dapat diartikan sebagai suatu proses perencanaan pembangunan yang bertujuan untuk melakukan perubahan menuju kearah yang lebih baik. Manfaat tersebut dapat di rasakan bagi masyarakat, pemerintah, dan lingkungannya pada suatu daerah tertentu, dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada semaksimal mungkin, dan berorientasi pada sesuatu yang dianggap prioritas (Riyadi dan Supriyadi, 2003:7).

B. Pengembangan Ekonomi Lokal (*Local Economic Development*)

1. Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi merupakan tujuan dari pembangunan nasional. Pembangunan ekonomi dilakukan dengan tujuan untuk pengembangan kegiatan ekonomi maupun meningkatkan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi juga sering dikaitkan dengan upaya peningkatan pendapatan perkapita seperti yang dikemukakan oleh Ascani dkk (2012:3):

“Modern growth theory has devoted substantial attention to the search for the determinants of economic growth by means of aggregated models. In these approaches ‘economic developments’ has been often conceptualized as an increase in ‘equilibrium’ per-capita income and the interest of researchers mainly has concerned the identification of the main economic factors influencing it.” (Teori pertumbuhan modern telah memberikan perhatian besar untuk mencari faktor-faktor penentu pertumbuhan ekonomi melalui model agregat. Dalam ‘pertumbuhan ekonomi’ pendekatan ini sudah sering dikonseptualisasikan sebagai peningkatan ‘keseimbangan’ pendapatan per kapita dan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi)

Menurut Arsyad (2010:11-12), pembangunan ekonomi bisa diartikan sebagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan suatu negara untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakatnya. Dengan demikian, pembangunan ekonomi mempunyai unsur-unsur pokok dan sifat sebagai berikut:

- a. Suatu proses yang berarti perubahan yang terjadi terus menerus.
- b. Usaha untuk menaikkan pendapatan per kapita.
- c. Kenaikan pendapatan per kapita itu harus terus berlangsung dalam jangka panjang.
- d. Perbaikan sistem kelembagaan di segala bidang (misalnya ekonomi, politik, hukum, sosial dan budaya).

Menurut Todaro dan Smith (2003) dalam Arsyad (2010:11) menyatakan bahwa pembangunan ekonomi ditunjukkan oleh 3 nilai pokok, yaitu:

- a. Berkembangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (*sustenance*)
- b. Meningkatnya rasa harga diri (*self-esteem*) masyarakat sebagai manusia
- c. Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memilih (*freedom from servitude*) yang merupakan salah satu hak asasi manusia.

2. Pengembangan Ekonomi Lokal (*Local Economic Development*)

Menurut Firman (1999: 11), Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) dapat diartikan sebagai penumbuhan suatu lokalitas secara sosial – ekonomi dengan lebih mandiri berdasarkan potensi yang dimiliki, baik potensi sumber daya alam, geografis, kewirausahaan, kelembagaan, pendidikan tinggi asosiasi profesi dll.

Hal tersebut harus dilakukan pada skala yang kecil atau skala komunitas. Titik sentralnya adalah mengorganisir dan mentransformasikan potensi-potensi yang dimiliki tersebut menjadi penggerak bagi pengembangan ekonomi lokal.

E.J Blakely (1989) dalam Kuncoro (2004: 110) menambahkan bahwa pengembangan ekonomi lokal adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan kelompok masyarakat mengelola sumberdaya yang ada dan mengambil bagian dalam susunan persekutuan (*partnership*) dengan sektor swasta atau lainnya, menciptakan lapangan kerja dan merangsang kegiatan ekonomi dalam zona perekonomian yang telah ditetapkan dengan baik. Ciri utama dari PEL adalah didasarkan pada kebijakan pengembangan endogen (*endogen development*) yang menggunakan kekuatan lokal sumberdaya manusia, kelembagaan dan fisik. Selanjutnya, Blakely juga mengemukakan bahwa pemerintah daerah, lembaga kemasyarakatan dan sektor swasta merupakan bagian penting dari proses pengembangan ekonomi lokal.

Pelaksanaan pembangunan ekonomi lokal juga mempunyai tujuan untuk meningkatkan dan memperluas lapangan kerja bagi masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah dan masyarakat juga swasta harus bekerjasama untuk memanfaatkan seluruh potensi yang ada di daerah secara optimal. Pemanfaatan sumberdaya dan potensi daerah memerlukan adanya kebijakan agar prioritas pembangunan tetap sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerahnya. Apabila prioritas pembangunan kurang sesuai dengan potensi yang dimiliki, maka pemanfaatan sumber daya yang ada kurang maksimal. Dengan demikian, menurut

Tarigan (2012:5) hal-hal yang perlu diperhatikan dan diatur oleh pemerintah daerah agar lebih baik adalah sebagai berikut:

- a. Terjaganya kelestarian lingkungan.
- b. Pemerataan pembangunan dalam wilayah.
- c. Penetapan sektor unggulan wilayah.
- d. Membuat keterkaitan antara sektor yang lebih baik dalam suatu wilayah, sehingga menjadi bersinergi dan berkesinambungan.

Pemenuhan kebutuhan pangan wilayah.

C. Perencanaan Strategi

1. Pengertian Strategi

Strategi pada prinsipnya berkaitan dengan persoalan suatu kebijakan, penentuan tujuan yang akan dicapai dan penentuan cara-cara atau metode penggunaan sarana-sarana tersebut. Strategi selalu dikaitkan dengan tiga hal yaitu tujuan (*ends*), saran (*means*) dan cara (*ways*). Untuk menetapkan suatu sasaran strategis, perlu menggunakan metode SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant dan Timed*). Berkaitan dengan hal itu, maka strategi perlu didukung oleh suatu kemampuan (*capability*) untuk meningkatkan kesempatan dan peluang yang ada (Suryono, 2004:80).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1997:964), kata strategi merupakan turunan dari bahasa Yunani "*strategos*" yang diterjemahkan sebagai komandan militer pada zaman demokrasi Athena. Pada masa saat ini, strategi digunakan oleh semua jenis organisasi, baik organisasi pada sektor publik maupun sektor privat. Strategi pada sektor publik maupun privat dapat diartikan sebagai

langkah-langkah atau cara yang telah disusun secara sistematis dalam proses menjalankan aktivitas atau kegiatan. Langkah-langkah yang dimaksud merupakan suatu rangkaian kebijakan yang dituangkan dalam bentuk strategi.

Berdasarkan beberapa definisi tentang strategi diatas, dapat di ambil kesimpulan bahwa strategi merupakan suatu rangkaian dari perencanaan suatu kegiatan yang meliputi berbagai kebijakan dalam rangka untuk mencapai sasaran yang di tetapkan. Strategi disusun berdasarkan pada penyesuaian terhadap kondisi lingkungan tertentu dimana tindakan penyesuaian tersebut berdasarkan pertimbangan dengan memperhitungkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki.

Untuk menyusun suatu strategi perlu memperhatikan beberapa faktor yaitu:

- a. Memperhatikan masalah-masalah apa saja yang akan terjadi di masa depan dalam proses pelaksanaan strategi.
- b. Mempertimbangkan jumlah kualitas sumberdaya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusianya baik dalam bentuk modal, tenaga ahli, keahlian pengusaha dalam menciptakan strategi tersebut serta pengetahuan teknik sebagai pengetahuan dasar yang tersedia.
- c. Memfokuskan pada target yang akan dicapai agar sasaran ataupun tujuan dapat tercapai sesuai dengan keinginan.

2. Tipe-Tipe Strategi

Setiap organisasi diperlukan suatu strategi dalam merencanakan masa depan suatu organisasi tersebut. Strategi dalam suatu organisasi mempunyai tipe-tipe yang mendukung dalam pengimplementasian strategi yang telah ditetapkan.

Menurut Salusu (1999:104) menyebutkan tipe-tipe strategi adalah sebagai berikut:

- a. Strategi Organisasi (*Corporate Strategy*)
Strategi ini berkaitan dengan sebuah perumusan misi, tujuan dan nilai-nilai serta inisiatif-inisiatif strategi yang baru. pembatasan yang diperlukan didalamnya adalah tujuan apa yang diinginkan strategi tersebut, untuk siapa dan untuk apa strategi tersebut dilakukan.
- b. Strategi Program (*Program Strategy*)
Strategi tersebut lebih fokus pada implikasi-implikasi strategi dari suatu program. Sebagai contohnya, seperti apa dampak dari program tersebut pada saat diperkenalkan dan dampak yang akan di terima oleh organisasi tersebut.
- c. Strategi Pendukung Sumber Daya (*Resources Support Strategy*)
Strategi tersebut memusatkan perhatian pada pemanfaatan sumber daya esensial yang tersedia secara maksimal guna meningkatkan kualitas kinerja dalam suatu organisasi. Sumberdaya tersebut dapat berupa sumber daya dari tenaga, keuangan, teknologi, dan sebagainya.
- d. Strategi Kelembagaan (*Institutional Strategy*)
Strategi tersebut berfokus pada pengembangan kemampuan organisasi dalam melaksanakan inisiatif-strategi tersebut.

3. Manfaat Strategi

Strategi ditetapkan oleh suatu organisasi sebagai lanjutan dari perencanaan program kegiatan yang telah dilakukan. Penentuan strategi tidak dapat terlepas dari susunan kegiatan dan tujuan yang ingin dicapai di masa yang akan datang.

Manfaat penyusunan strategi dalam organisasi menurut David (2002:15) antara lain:

- a. Kegiatan penyusunan strategi akan meningkatkan kemampuan organisasi dalam menyelesaikan masalah yang akan di hadapi dalam organisasi.
- b. Membantu organisasi dalam membuat strategi yang lebih baik dengan menggunakan pendekatan yang lebih sistematis, logis dan rasional pada pilihan strategis.
- c. Strategi merupakan sebuah proses bukan keputusan atau dokumen. Tujuan utama dari sebuah proses adalah mencapai pemahaman dan komitmen dari semua manajer karyawan.

- d. Keterlibatan karyawan dan penyusunan strategi memperbaiki pemahaman mereka atas penghargaan produktivitas di dalam setiap perencanaan strategi dan dapat meningkatkan motivasi kerja pegawai.
- e. Strategi memungkinkan untuk identifikasi, penentuan prioritas, dan eksploitasi peluang. Memungkinkan alokasi waktu dan sumberdaya yang lebih efektif untuk peluang yang telah teridentifikasi serta memungkinkan alokasi sumber daya dan waktu yang lebih sedikit untuk mengoreksi keputusan yang salah atau keluar dari rencana.
- f. Penerapan strategi membuat manajemen perusahaan menjadi lebih peka dan meningkatkan kesadaran atas ancaman eksternal perusahaan serta pemahaman yang lebih baik mengenai strategi.

Strategi dalam suatu organisasi merupakan suatu proses yang berkelanjutan. Strategi digunakan sebagai kerangka kerja untuk menyelesaikan setiap masalah dan dapat menyelesaikan masalah tersebut karena telah memiliki pedoman dalam rencana organisasi pada masa yang akan datang (Kusdi,2009:90)

Penyusunan strategi pada suatu organisasi sangat penting, karena tanpa merencanakan strategi organisasi tersebut tidak mengetahui apa yang akan dilakukan organisasi itu dan tujuan apa yang diinginkan. Seperti pendapat Joel Ross and Michael Kami dalam jurnal yang ditulis oleh Wasim (2014: 167) yang menyatakan bahwa “ *Without a strategy, an organization is like a ship, without a rudder going around in circles. It’s like a tramp; it has no place to go*”. (Tanpa strategi, organisasi seperti sebuah kapal, tanpa kemudi yang akan berputar-putar. Itu seperti gelandangan; yang tidak memiliki tempat untuk pergi).

4. Perencanaan Strategi

Perencanaan strategi adalah sebagai suatu upaya yang disusun untuk membuat keputusan dan tindakan yang akan diambil dan dikerjakan oleh suatu organisasi atau entitas lainnya, serta mengapa kegiatan tersebut harus dilakukan oleh organisasi tersebut (Bryson, 2008:23). Selain itu, perencanaan strategi yang

dikemukakan oleh Bryson lebih berfokus pada tindakan, hasil dan evaluasi.

Terdapat sepuluh langkah perencanaan strategi menurut Bryson antara lain:

- a. Memprakarsai dan menyepakati suatu proses perencanaan strategis. Langkah pertama ini bertujuan untuk menegosiasikan isu-isu yang terjadi dengan stakeholder untuk membuat keputusan (*decision makers*) atau untuk membentuk opini (*opinion leaders*) internal dan eksternal
- b. Mengidentifikasi mandat organisasi. Suatu mandat yang ditempatkan pada organisasi baik itu mandat formal maupun non formal adalah merupakan suatu keharusan dari organisasi yang bersangkutan.
- c. Menjelaskan misi dan nilai-nilai organisasi. Misi yang ditetapkan oleh suatu organisasi harus mempunyai kaitan yang erat dengan mandatnya, harus mengandung unsur pembenaran sosial tentang keberadaannya, mampu mengurangi konflik, dan mampu merencanakan masa depan.
- d. Menilai lingkungan eksternal, termasuk peluang dan ancaman. *Stakeholder* yang terlibat dalam penyusunan rencana harus melakukan pendekatan atau mengeksplorasi terhadap lingkungan sekitar organisasi untuk dapat mengidentifikasi adanya peluang dan ancaman yang dihadapi oleh organisasi.
- e. Menilai lingkungan internal, kekuatan dan kelemahan. Untuk melakukan pemantauan internal, dapat dipantau melalui sumberdaya yang ada (*input*), strategi sekarang (*process*) serta kinerja (*output*).
- f. Mengidentifikasi isu strategis yang dihadapi organisasi. Kelima unsur tersebut secara bersamaan akan memunculkan unsure keenam. Identifikasi isu strategis mengenai kebijakan yang mempengaruhi mandate, misi dan nilai-nilai pada organisasi.
- g. Merumuskan strategi untuk mengelola isu-isu. Strategi merupakan suatu pola yang memiliki tujuan, kebijakan, program, tindakan, keputusan serta sumberdaya yang dapat menegaskan bagaimana organisasi tersebut, apa yang dilakukan oleh organisasi, alasan mengapa organisasi harus melakukan itu. Suatu strategi bisa berbeda, hal itu tergantung pada tingkat, fungsi dan kerangka kerja.
- h. Menciptakan visi organisasi yang efektif bagi masa depan. Langkah terakhir dalam penyusunan strategi adalah bagaimana organisasi dapat menjelaskan tentang bagaimana dan apa yang akan dilakukan organisasi itu agar berhasil mengimplementasikan strateginya dan mampu mencapai seluruh kompetensinya.
- i. Mengembangkan proses implementasi. Proses implementasi merupakan proses inti dari keseluruhan rencana yang dibuat. Bagaimana strategi itu dapat dijalankan sesuai dengan rencana dalam mencapai tujuan organisasi.
- j. Menilai kembali strategi dan proses perencanaan strategis. Ini merupakan proses terakhir, setelah seluruh langkah dijalankan maka dapat dilakukan penilaian mengenai bagaimana strategi tersebut guna proses perencanaan strategi selanjutnya.

5. Strategi Pembangunan Pertanian

Menurut Tjokroamidjojo (1996:13), strategi pembangunan merupakan suatu perhitungan dari rangkaian kebijakan dan langkah-langkah dalam pelaksanaannya. Sektor pertanian merupakan sektor yang mempunyai peran dalam struktur pembangunan ekonomi nasional. Sektor ini merupakan salah satu sektor yang dianggap penting dari keseluruhan pembangunan nasional di Indonesia. Sesuai dengan Rencana Strategi Kementerian Pertanian periode 2015-2019 yaitu terdapat Tujuh Gema Revitalisasi yang diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Revitalisasi Lahan

Ketersediaan lahan dan air yang cukup besar serta memadai merupakan faktor fundamental dalam pertanian. Lahan dan air yang merupakan media dasar tanaman harus tetap dijaga kelestariannya agar sistem produksi dapat berjalan secara berkesinambungan. Terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam revitalisasi lahan yaitu:

- 1) Melakukan upaya-upaya perlindungan, pelestarian, dan perluasan areal persawahan
- 2) Mengoptimalkan pemanfaatan lahan pertanian yang selama ini tidak dibudidayakan. Sebagai contoh lahan persawahan yang telah selesai di panen tetapi masih belum dimanfaatkan kembali.
- 3) Membantu para petani dalam sertifikasi lahan, mendorong pengelolaan dan konsolidasi lahan dalam upaya mengurai alih fungsi lahan serta mendorong pengembangan usaha tani yang berskala ekonomi.

- 4) Mempertahankan kesuburan tanah dan memperbaiki kondisi tanah serta mengoptimalkan sumber daya air dan pengembangan sumber daya air alternatif baik air tanah maupun permukaan.

b. Revitalisasi Perbenihan dan Pembibitan

Ketersediaan benih dan bibit unggul merupakan hal yang sangat penting. Salah satu faktor penentu hasil komoditi yang berkualitas unggul adalah pemilihan bibit yang unggul dan perawatan yang tepat. Upaya yang dapat dilakukan untuk dapat memenuhi kebutuhan bibit unggul antara lain:

- 1) Menata kembali kelembagaan perbenihan nasional di mulai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah.
- 2) Melindungi, memelihara serta memanfaatkan sumberdaya genetic nasional untuk mengembangkan varietas unggul lokal.
- 3) Mendorong sektor swasta untuk berpartisipasi dalam usaha pengembangan bibit unggul.
- 4) Memperkuat tenaga pemuliaan di berbagai tingkat pendidikan.
- 5) Membentuk penangkaran benih unggul di lapangan.
- 6) Memperbanyak sumber-sumber bibit unggul baik dari sumber lokal maupun dari luar negeri.
- 7) Perbaikan dan penerapan undang-undang perbenihan.
- 8) Membangun industri perbenihan dengan arah kemandirian produksi benih dan industry varietas, kemandirian penyediaan benih, industry benih berbasis komunitas dan riset berbasis perbenihan.

c. Revitalisasi Infrastruktur dan Sarana.

Meningkatkan efisiensi terhadap usaha tani merupakan hal yang penting terutama dalam sarana produksi dan hasil panen. Sarana produksi yang dilakukan pemerintah baik dari sarana infrastruktur jalan usaha tani yang harus dilakukan perbaikan sebagai upaya untuk membuka akses di daerah produksi pertanian. Selain itu, penggunaan alat dan mesin dalam pertanian dapat meningkatkan efisiensi waktu dalam usaha pertanian. Beberapa hal yang harus dilakukan dalam upaya revitalisasi infrastruktur dan sarana bagi pertanian antara lain:

- 1) Memperkuat kelembagaan di tingkat pusat dengan tujuan untuk membuat kebijakan dan regulasi yang berkaitan dengan pembuatan, penyebaran, dan penggunaan alat serta mesin di tingkat petani secara bertanggung jawab.
- 2) Mendorong pihak swasta untuk mendesain, memproduksi dan memasarkan alat atau mesin pertanian yang sesuai dengan kualitas dan standar nasional.
- 3) Bekerjasama dengan sektor lain yang berkaitan dengan peralatan dan mesin untuk mendorong terbentuknya fasilitas bengkel alat dan mesin di daerah.
- 4) Memberikan bantuan permodalan kepada petani dalam pengadaan alat dan mesin pertanian.

d. Revitalisasi Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) merupakan hal vital dalam pembangunan sektor pertanian. Manusia berperan sebagai penggerak pembangunan pertanian, dalam hal ini manusia harus berkompeten agar pembangunan pertanian dapat berjalan secara optimal dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Melalui kegiatan pendidikan, pelatihan, praktik kerja lapangan tentang pertanian baik yang diperuntukan bagi petani maupun aparatur sektor pertanian merupakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam sektor pertanian. Berbagai kegiatan tersebut telah di susun oleh Kementerian Pertanian. Pemerintah juga melakukan kegiatan penyuluhan terhadap para petani, oleh karena itu diperlukan upaya untuk memperkuat sistem penyuluhan yang dapat dilakukan dengan upaya sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan jumlah formasi penyuluh di daerah-daerah.
- 2) Mendorong munculnya tenaga penyuluh swadaya.
- 3) Memberikan bimbingan teknis dan usaha tani yang produktif termasuk dalam mengakses informasi teknologi dan informasi pasar.
- 4) Melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah berkaitan dengan rekrutmen dan pembiayaan tenaga penyuluh daerah.

e. Revitalisasi Pembiayaan Petani

Akses permodalan bagi petani kelas menengah ke bawah merupakan salah satu permasalahan yang menjadi kendala dalam

pembangunan pertanian di Indonesia, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah antara lain:

- 1) Penyediaan sistem kredit dengan kemudahan proses administrasi.
- 2) Memperluas sistem kredit baru dengan persyaratan yang lebih mudah.
- 3) Menumbuhkan kelembagaan ekonomi mikro di pedesaan
- 4) Melakukan koordinasi dengan instansi pusat dan daerah untuk mempermudah petani dalam mengakses sumber pembiayaan koperasi,
- 5) Menumbuhkan koperasi khusus bidang pertanian.

f. Revitalisasi Kelembagaan Pertanian

Kegiatan pertanian melibatkan sumber daya manusia yang cukup banyak serta saran produksi dan permodalan yang cukup besar. Untuk mempermudah koordinasi antar petani dengan pemerintah maka sangat diperlukan pembentukan kelompok tani. Upaya yang dapat dilakukan untuk mempermudah koordinasi antara pemerintah dengan petani antara lain:

- 1) Memperbanyak kelompok dan gabungan petani.
- 2) Memberikan bimbingan dan pendampingan teknis untuk memperkuat kemampuan petani baik dari segi budidaya maupun pada aspek pemasaran.
- 3) Memperluas cakupan jenis kelompok tani sesuai dengan bidang usaha.
- 4) Memperkuat permodalan usaha bagi kelompok tani melalui pemberian bantuan modal dan memperkuat jaringan tani melalui penyuluhan lapangan.

g. Revitalisasi Teknologi dan Industri Hilir

Usaha yang dapat dilakukan dalam rangka revitalisasi teknologi industry hilir yaitu:

- 1) Meningkatkan kegiatan dalam penelitian khususnya dalam rangka menciptakan inovasi teknologi benih, bibit, pupuk, obat hewan dan tanaman, alat mesin dan produk olahan serta pemanfaatan sumberdaya lahan dan air.
- 2) Mempercepat dideminasi hasil penelitian dengan mengoptimalkan kelembagaan pengkajian, diklat, penyuluhan, tenaga teknis pertanian lapangan dan kelembagaan pertanian.
- 3) Mendorong pengembangan industri pengolahan hasil pertanian di pedesaan secara efisien sebagai upaya meningkatkan nilai tambah dan daya saing pasar baik dalam negeri maupun di luar negeri.
- 4) Meningkatkan pemasaran dan stabilitas harga komoditas pertanian.
- 5) Meningkatkan dan menjaga mutu pada semua tahapan produksi hasil pertanian mulai dari hulu sampai ke hilir.

D. Implementasi

1. Pengertian Implementasi

Implementasi merupakan suatu proses yang dinamis dalam melaksanakan suatu kebijakan, aktivitas maupun kegiatan, sehingga nantinya akan mendapatkan suatu hasil atau *output* yang sesuai dengan keinginan. Menurut Lester dan Stewart Jr dalam Agustino (2008:139) yang menyatakan bahwa implementasi adalah

sebagai proses dan *output*. Menurut jurnal yang ditulis oleh Musyoka (2011:2) menyatakan bahwa:

“Strategi Implementation is largely an internal administrative activity. It entails working through others, organizing, motivating, culture creating strong links between strategy and how the organization operates. It also entails a process of converting the formulated strategies into viable operations that will yield the organization’s targeted results”. (Implementasi strategi sebagian besar merupakan administrasi internal. Hal tersebut memerlukan kerjasama dengan pihak lain, pengorganisasian, memotivasi, budaya menciptakan hubungan yang kuat antara strategi dan bagaimana organisasi beroperasi. Hal ini juga memerlukan proses mengubah strategi yang dirumuskan dalam operasi yang layak yang akan menghasilkan tujuan organisasi).

Jadi, implementasi strategi merupakan suatu proses dimana beberapa strategi diubah menjadi tindakan. Keberhasilan dari implementasi dapat diukur dari proses dan pencapaian *output* yaitu tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan. Fokus dari suatu kebijakan adalah pencapaian tujuan dan sasaran dari kebijakan tersebut. Dimana terdapat penjelasan mengenai alasan mengapa tujuan tersebut dapat tercapai, dan alasan yang menyebabkan tujuan dan sasaran kebijakan tercapai atau tidak. Tahap pelaksanaan kebijakan di lapangan akan memperlihatkan bagaimana implementasi kebijakan tersebut di lapangan, dan bagaimana cara mengatasi gangguan atau hambatan dalam mencapai tujuan dan sasaran kebijakan serta menghadapi tantangan dari pelaksanaan kebijakan di luar badan pemerintah seperti kelompok sasaran, baik kelompok sasaran yang pro maupun yang kontra.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam Wahab (2004:65) yang menyatakan bahwa permasalahan implementasi merupakan suatu kegiatan atau usaha-usaha yang dilakukan setelah

suatu kebijakan di tetapkan. Baik berupa usaha pengadministrasiannya maupun usaha-usaha pengimplementasiannya di lapangan. Pelaksanaan kebijakan dalam suatu program merupakan salah satu usaha pemerintah atau pelaku kebijakan dalam menjawab permasalahan yang ada di masyarakat.

Implementasi merupakan suatu analisis dengan melakukan peninjauan ulang untuk penyelidikan secara umum dengan tujuan ganda, yaitu: pertama memberikan informasi tentang bagaimana program tersebut dapat terlaksana, kedua dapat menunjukkan faktor-faktor yang dapat diubah agar memperoleh hasil yang lebih baik sehingga dapat memberikan perubahan implementasi atau alternatif program baru. Menurut Winarno (1998:72) yang mengemukakan bahwa "*proses implementasi memiliki variabel atau faktor yang mendukung kaitan (linkage) antara kebijakan dan capaian (performance)*". Variabel yang dimaksud dapat berupa variabel bebas atau variabel terkait yang saling berhubungan satu sama lain.

2. Tahapan Implementasi

Menurut Conyers (1984:273), pada proses implementasi terdapat beberapa komponen yang perlu diperhatikan antara lain:

a. Mengimplementasikan rencana (*Making a plan operational*)

Salah satu tahap yang paling penting dalam proses perancangan dan implementasi adalah pada tahap pengambilan keputusan tentang bagaimana mengimplementasikan dan mengoperasikan suatu proyek atau program tertentu. Apabila suatu keputusan telah di tentukan, maka selanjutnya harus mengetahui tentang tahapan apa saja yang akan

dilakukan untuk mengimplementasikan keputusan tersebut. Kemudian menentukan tentang pendanaan dan sumber pendanaan. Selanjutnya menentukan siapa yang akan bertanggungjawab pada setiap komponenprogram, serta jangka waktu yang diperlukan untuk mengimplementasikannya.

b. *Pembiayaan (budgeting)*

Dana merupakan hal yang sangat penting untuk mengimplementasikan suatu rencana. Sedemikian pentingnya hingga memerlukan kajian khusus mengenai hubungan antara perencanaan dan pembiayaan.tujuan utama tahap ini adalah untuk mempersiapkan rencana dalam bentuk perhitungan mengenai kemungkinan sumber-sumber biaya yang ada untuk mengimplementasikan rencana tersebut.

c. *Monitoring dan evaluasi*

Monitoring dan evaluasi tentang implementasi rencana merupakan suatu komponen penting dalam proses menghubungkan antara perencanaan dan implementasi. Karena komponen tersebut merupakan satu-satunya cara untuk mengetahui seberapa jauh rencana tersebut bisa dilaksanakan. Selain untuk mengetahui dampak dari rencana tersebut juga sebagai dasar untuk memperbaiki rencana yang ada dan mempersiapkan rencana yang baru.

d. *Dokumen Rencana*

Dokumen rencana memiliki peranan penting dalam menghubungkan antara proses perencanaan dan proses implementasinya. Dokumen rencana bukan merupakan awal dari sebuah rencana dan akhir dari semua proses

perencanaan, melainkan sebagai jembatan atau rangkaian antara perencanaan dan implementasi. Dokumen rencana memiliki dua fungsi, pertama sebagai *blueprint* bagi merekayang bertanggung jawab dalam implementasi suatu proyek, yang kedua adalah untuk menginformasikan berbagai pihak, termasuk para pelaku politik, donator, dan masyarakat pada umumnya mengenai jenis kegiatan pembangunan yang diusulkan.

Menurut Widodo (2011: 90-94) tahapan impementasi dari suatu kebijakan publik mencakup tahap interpretasi, tahap pengorganisasian dan tahap aplikasi.

Berikut adalah penjelasan dari berbagai tahapan tersebut:

a. Tahap Interpretasi

Tahap ini merupakan tahap penjabaran sebuah kebijakan yang masih bersifat abstrak menjadi kebijakan yang lebih bersifat teknis operasional. Kebijakan umum atau kebijakan strategis diwujudkan dalam bentuk peraturan daerah (perda). Kebijakan manajerial diwujudkan dalam bentuk kebijakan kepala dinas, kepala badan atau kepala kantor sebagai pelaku teknis daerah. Tahap interpretasi kebijakan ini tidak sekedar menjabarkan suatu kebijakan, tetapi juga diikuti dengan kegiatan mengkomunikasikan kebijakan tersebut agar masyarakat dapat mengetahui dan memahami apa yang menjadi arah, tujuan dan sasaran kebijakan.

b. Tahap Pengorganisasian

Tahap ini lebih mengarah pada kegiatan pengaturan dan penetapan siapa yang menjadi pelaksana kebijakan tersebut, penetapan biaya (baik

nominal, sumber biaya, penggunaannya), dan penetapan sarana prasarana apa yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, penetapan tata kerja dan penetapan manajemen pelaksanaan kebijakan termasuk penetapan pola kepemimpinan serta koordinasi pelaksana kebijakan.

c. Tahap Aplikasi

Tahap aplikasi merupakan tahapan penerapan rencana atau proses implementasi kebijakan dalam realitas nyata. Tahapan ini merupakan perwujudan dari pelaksanaan masing-masing kegiatan dalam tahapan yang telah disebutkan sebelumnya.

3. Unsur-unsur Implementasi

Tachjan (2008:26) mengemukakan tentang unsur-unsur implementasi yang harus ada antara lain:

a. Unsur pelaksana

Unsur pelaksana adalah pelaku kebijakan atau implementor. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Tachjan (2008:28), yang dimaksud sebagai pelaksana kebijakan adalah pihak yang menjalankan kebijakan yang terdiri dari penentu tujuan dan sasaran suatu kebijakan, analisis serta perumusan kebijakan dan strategi. Unsur pelaksana juga melakukan pengambilan keputusan perencanaan, penyusunan program, pengorganisasian, pelaksanaan operasional, pengawasan kegiatan implementasi kebijakan serta penilaian.

b. Program yang Dilaksanakan

Suatu kebijakan akan di implementasikan dalam bentuk program, kegiatan ataupun proyek. Menurut Tachjan (2008:31) program merupakan rencana komprehensif yang meliputi pemanfaatan sumberdaya di masa depan serta menentukan urutan kegiatan yang akan dilakukan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

c. Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran merupakan target utama yang menjadi tujuan dalam implementasi suatu kebijakan. Tachjan mendefinisikan kelompok sasaran sebagai kelompok orang atau organisasi yang ada di masyarakat yang akan menerima bentuk nyata baik kegiatan, barang atau jasa akibat dari adanya suatu kebijakan (Tachman, 2006:35).

Untuk mengkaji suatu implementasi kebijakan, perlu adanya fariabel atau faktor-faktor penentunya. Oleh karena itu, untuk memahami variabel-variabel terkait maka perlu mengetahui model-model implementasi kebijakan. Banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan.

4. Model-model Implementasi

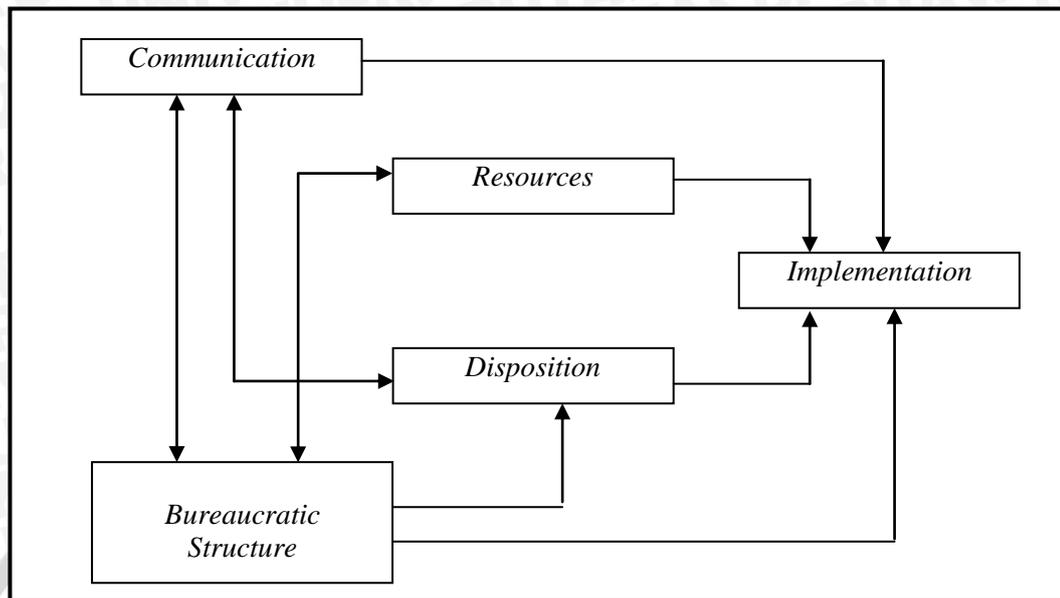
Berdasarkan pengertian implementasi yang telah dijelaskan diatas, maka implementasi merupakan suatu proses mengubah program menjadi kegiatan dan bagaimana cara untuk menjalankan kegiatan tersebut. Untuk menganalisis implementasi kebijakan terdapat berbagai model implementasi kebijakan menurut Nugroho (2009: 501-515) antara lain:

- a) Model Donals S.Van Meter dan Carl E. Van Horn
- b) Model Mazmanian dan Sabatier

- c) Model Hogwood dan Gunn
- d) Model Goggin
- e) Model Marille S. Grindle
- f) Model Elmore, dkk
- g) Model George C. Edward III
- h) Model Nakamura & Smallwood
- i) Model Jaringan

Berdasarkan model-model implementasi diatas, maka penulis tertarik untuk menggunakan model implementasi dari Geogrc C. Edward III. Karena dalam model implementasi yang dikemukakan oleh George C. Edward III mencakup empat hal yang digunakan untuk menganalisis implementasi strategi yang disusun oleh pemerintah daerah dalam upaya mengembangkan komoditi sektor pertanian antara lain komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Selain itu apabila dibandingkan dengan model analisis implementasi yang lain, variable menurut George C. Edward III cenderung lebih sederhana dan mencakup wilayah yang kecil seperti desa, sedangkan *variable* pada model yang lain terlalu luas dan kompleks.

Model Implementasi kebijakan menurut Gourge C. Edward III yang dikutip dalam Widodo (2011:96-107) terdapat empat faktor atau variabel yang berpengaruh pada keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu:



Gambar 2. Model Implementasi Kebijakan George C. Edward

Sumber: Widodo (2011: 107)

1) Faktor Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi adalah proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Komunikasi dalam implementasi suatu kebijakan merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy maker*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementers*) (Widodo, 2011:97). Widodo juga menambahkan bahwa komunikasi dalam implementasi suatu kebijakan memiliki beberapa macam dimensi, antara lain: *pertama* adalah dimensi transformasi (*transformassion*) yaitu menghendaki agar kebijakan public disampaikan tidak hanya kepada pelaksana kebijakan, tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan. *Kedua*, dimensi kejelasan (*clarity*) yaitu menghendaki agar kebijakan yang disampaikan kepada para pelaksana dan pihak

lain yang berkepentingan terhadap kebijakan tersebut dapat menerima dengan jelas sehingga mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan dan sasaran serta substansi dari kebijakan tersebut. *Ketiga*, konsistensi (*consistency*) yaitu menghendaki agar informasi yang diberikan harus konsisten, agar kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan tidak menimbulkan kebingungan dan implementasi kebijakan dapat terlaksana secara efektif dan efisien.

2) Sumber Daya (*resources*)

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi suatu kebijakan. Edward III dalam Widodo (2011:98) mengemukakan bahwa kejelasan dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan, serta keakuratan penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, apabila pelaksana kebijakan yang mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut kurang mempunyai sumber daya untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Sumber daya yang dapat mendukung implementasi kebijakan meliputi:

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kebijakna. Dalam implementasi kebijakan yang efektif dan efisien sumber daya manusia harus mengetahui apa yang dilakukan, sumber daya juga harus mengetahui orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Sumber daya manusia juga harus memiliki kewenangan yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan dan juga sumber daya harus cukup memiliki keahlian dan kemampuan dalam melaksanakan tugas, anjuran, perintah dari atasan (pimpinan).

b. Sumber daya anggaran

Selain sumber daya manusia, anggaran merupakan yang mempengaruhi keefektivitasan sebuah kebijakan karena anggaran merupakan dana untuk membiayai operasionalisasi dalam pelaksanaan kebijakan. Jika terbatasnya sumber daya anggaran, maka akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Disamping program tidak berjalan dengan optimal, terbatasnya anggaran juga menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah.

c. Sumber daya peralatan (*facility*)

Sumber daya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan.

d. Sumber daya informasi dan kewenangan

Informasi merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan, terutama informasi yang relevan dan cukup berkaitan dengan bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan, selain itu informasi tentang kerelaan atau kesanggupan dari beberapa pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut.

3) Disposisi (*disposition*)

Disposisi merupakan kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga tujuan kebijakan tersebut dapat terlaksana. Untuk mengimplementasikan suatu kebijakan, pelaku kebijakan harus mengetahui apa yang harus dilakukan sesuai dengan kemampuannya.

4) Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Struktur birokrasi dapat berpengaruh pada keefektifan dan efisiensi dalam implementasi suatu kebijakan. Hal ini dikarenakan dalam suatu organisasi mencakup struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit dalam organisasi, dan hubungan antar organisasi lainnya.

E. Daya Saing Daerah

Daya saing dapat diartikan sebagai suatu potensi yang bersifat tunggal, sehingga dengan demikian tidak ada upaya pemahaman bagaimana kompleksitas faktor-faktor yang membentuk daya saing (Abdullah dkk,2002:1). Pengertian daya saing yang didefinisikan oleh Departemen Perdagangan dan Industri Inggris (UK-DTI) adalah kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan dan kesempatan kerja yang tinggi dengan tetap terbuka pada persaingan domestik maupun persaingan internasional. Selain itu, *Centre for Urban and regional Studies* (CURDS) mendefinisikan daya saing daerah sebagai kemampuan sektor bisnis atau perusahaan pada suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan yang tinggi serta tingkat kekayaan yang lebih merata untuk penduduknya (Daryanto dan Hafizrianda, 2010:12). Berdasarkan definisi daya saing tersebut, baik daya saing pada tingkat nasional maupun daerah pada dasarnya memiliki makna yang sama, hanya cakupan wilayahnya saja yang berbeda.

Daya saing dapat didefinisikan dengan memperhatikan beberapa hal, diantara adalah sebagai berikut:

- a. Daya saing mencakup aspek yang lebih luas dari sekedar produktivitas atau efisiensi pada level mikro. Sehingga daya saing lebih menungkinakan didefinisikan sebagai suatu kemampuan perekonomian.
- b. Pelaku ekonomi, bukan hanya sektor bisnis, akan tetapi juga rumah tangga (masyarakat), pemerintah, dll yang terpadu dalam sistem ekonomi yang sinergis.
- c. Tujuan dan hasil akhir dari meningkatnya daya saing suatu perekonomian tak lain adalah meningkatkan kesejahteraan penduduk di dalam perekonomiannya.
- d. Kata kunci dari konsep “daya saing” adalah kompetisi. Disinilah peran keterbukaan terhadap kompetisi dengan para competitor menjadi relevan (Abdullah dkk,2002:14-15).

Tujuan dari meningkatnya daya saing suatu perekonomian tidak lain adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu daerah. Kesejahteraan merupakan suatu konsep yang luas yang tidak hanya tergambar dalam sebuah besaran variabel seperti pertumbuhan ekonomi. Perubahan ekonomi merupakan salah satu aspek dari pembangunan ekonomi dalam rangka peningkatan standar kehidupan masyarakat.

Daryanto dan Hafizrianda (2010:18) mengungkapkan bahwa daya saing wilayah tercipta jika wilayah tersebut memiliki kompetensi inti (*core competence*), yaitu upaya menciptakan berbagai faktor produksi yang jauh lebih baik dibandingkan dengan pesaingnya. Kompetisi dalam konteks pengembangan wilayah merupakan suatu upaya dalam mengkoordinasikan dan mengintegrasikan sektor yang berkembang di wilayah tersebut. Semakin baik pengkoordinasian dan pengintegrasian sektor-sektor pada daerah tersebut akan semakin tinggi upaya penciptaan kompetensi inti, sehingga mengakibatkan sulitnya wilayah lain untuk bersaing dengan wilayah tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Melalui jenis penelitian deskriptif, peneliti ingin menggambarkan keadaan atau fenomena dan fakta-fakta sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2014:4), jenis penelitian kualitatif adalah:

“Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara utuh”.

Alasan peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif karena tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan serta menggambarkan bagaimana kondisi yang terjadi di lapangan. Dengan demikian, maka peneliti akan memberikan deskripsi, uraian, serta intepretasi tentang bagaimana implementasi strategi pemerintah serta mencari permasalahan yang kemudian akan mengambil kesimpulan dari permasalahan mengenai faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pengimplementasian strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung dalam mengembangkan komoditas sektor pertanian khususnya pada komoditas tanaman hias.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan suatu batasan masalah yang diteliti dengan mengumpulkan data-data yang diperlukan sesuai dengan tujuan penelitian. Pada dasarnya fokus penelitian merupakan penetapan masalah. Penentuan sebuah fokus penelitian dilakukan untuk menentukan sebuah persoalan yang berhubungan dengan penelitian. Selain itu, penetapan fokus penelitian merupakan salah satu cara untuk memudahkan pembatasan fenomena dan permasalahan yang terjadi sehingga penelitian yang dilakukan dapat terarah dan tidak meluas serta lebih terkonsentrasi pada permasalahan yang menjadi fokus penelitian serta untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan permasalahan atau obyek yang akan diteliti.

Menurut Moleong (2014:93), fokus penelitian adalah suatu penempatan masalah yang bersumber dari hubungan dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang menimbulkan suatu pertanyaan yang memerlukan sebuah jawaban. Faktor yang dimaksud dalam hal ini adalah dapat berupa konsep, data empiris, pengalaman atau unsur lainnya. Apabila keduanya ditempatkan secara bersamaan maka akan menimbulkan suatu pertanyaan yang memerlukan jawaban. Untuk menetapkan fokus penelitian, peneliti dapat memilih data yang akan dikumpulkan, data yang terpakai serta data yang tidak terpakai. Fokus penelitian yang dipakai oleh peneliti dalam penelitian ini antara lain:

1. Implementasi Renstra dalam Pengembangan Komoditas Sektor Pertanian Sebagai Upaya Peningkatan Daya Saing Daerah pada Agropolitan Tanaman Hias di Desa Geger Kecamatan Sendang

Kabupaten Tulungagung sesuai dengan model implementasi kebijakan dari George C. Edward III:

- a. Komunikasi
 - b. Sumber Daya (*resources*)
 - c. Disposisi (*disposition*)
 - d. Struktur Birokrasi (*bureaucratic structure*)
2. Faktor pendukung dan penghambat Implementasi Renstra dalam Mengembangkan Komoditas Sektor Pertanian Sebagai Upaya Peningkatan Daya Saing Daerah pada Agropolitan Bunga Krisan Desa Geger Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung:

- a. Faktor Pendukung
 1. Letak Geografis
 2. Sumberdaya Manusia (SDM)
- b. Faktor Penghambat
 1. Jalur Transportasi
 2. Pendanaan

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian dilakukan. Berdasarkan penetapan lokasi penelitian, peneliti berharap mendapatkan data-data dan informasi yang berkaitan dengan judul, masalah, dan fokus penelitian yang telah ditetapkan. Lokasi penelitian yang akan dijadikan tempat penelitian adalah di Desa Geger Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung. Lokasi ini telah ditetapkan sebagai kawasan Agropolitan yang strategis, dimana lokasinya yang di

dukung oleh keadaan alam dan cuaca yang sangat cocok sebagai kawasan pengembangan sektor pertanian di Kabupaten Tulungagung. Lokasi ini dipilih oleh peneliti karena merupakan satu-satunya daerah yang mengembangkan pertanian tanaman hias yang sekarang menjadi daya tarik bagi wisatawan lokal maupun luar daerah Kabupaten Tulungagung. Desa Geger Kecamatan Sendang memiliki 16 *Green House* yang digunakan untuk menanam bunga krisan oleh kelompok tani “Sekar Wilis”.

Situs penelitian merupakan letak objek penelitian yang akan dilakukan.

Peneliti menentukan situs penelitian diantaranya pada:

1. Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung.
2. Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Tulungagung.
3. Kantor Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (BKPP) Kabupaten Tulungagung
4. Kantor Sekretariat Kelompok Tani “Sekar Wilis”

D. Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofland dalam Moleong (2014:157) menjelaskan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, tindakan dan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan wawancara. Ada dua jenis sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Kedua jenis data tersebut sangat penting dan diperlukan dalam ketepatan sejumlah informasi yang relevan dengan data tentang variabel-variabel penelitian untuk menyederhanakan data

yang telah dikumpulkan. Penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data yaitu:

1. Data Primer

Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam (*depth interview*) kepada pegawai dinas yang menangani masalah pengembangan kawasan agropolitan dan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Dinas), ketua kelompok tani, dan anggota kelompok tani “Sekar Wilis” di Desa Geger Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung yang meliputi:

- a. Ibu Maya Dewajanti, S,Si selaku Kasubid Sumberdaya Lahan dan Kelautan pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung.
- b. Bapak Muchamad Mahmudi, selaku Seksi Pembinaan dan Saran Usaha pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Tulungagung.
- c. Ibu Roro, selaku Seksi Tanaman Hias dan Biofarmaka Bidang Produksi Holtikultura pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Tulungagung.
- d. Dra. Noor Erliyani, selaku Kasubid Pengembangan Sumber Daya Pangan pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Tulungagung.
- e. Bapak Ratijo, selaku ketua kelompok “Sekar Wilis” dan anggota kelompok tani “Sekar Wilis”.

- f. Ibu Sumilih, selaku petani bunga dan anggota kelompok tani “Sekar Wilis”.
- g. Bapak Bambang Sulis Winarto, selaku petani bunga dan anggota kelompok tani “Sekar Wilis”.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini tidak diperoleh secara langsung dari narasumber, melainkan melalui dokumen seperti literatur, dokumen dan arsip yang berkaitan dengan penelitian ini. Dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini antara lain:

- a. “*Masterplan*” pengembangan Kawasan Agropolitan Sendang.
- b. Dokumen Pengembangan Kawasan Agropolitan & Minapolitan di Kabupaten Tulungagung.
- c. Pedoman Umum Pengembangan Kawasan Agropolitan Jawa Timur 2014.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah salah satu langkah penting dalam pengumpulan data pada sebuah penelitian ilmiah agar data yang diharapkan dapat digunakan dalam memecahkan permasalahan yang ada di lapangan. Oleh sebab itu, data yang didapatkan dalam penelitian harus mempunyai validitas yang akurat serta sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh peneliti. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian meliputi:

1. Wawancara/ *Interview*

Keberhasilan penggunaan teknik wawancara untuk mendapatkan data dan formulasi dari objek yang diteliti sangat tergantung kepada kemampuan peneliti dalam melakukan wawancara (Sarwono, 2006:224). Percakapan dalam wawancara dilakukan oleh dua pihak dengan tujuan untuk dapat memperoleh data yang valid dan akurat. Kedua belah pihak yang berkaitan yaitu pewawancara (*interviewer*) sebagai pihak yang mengajukan pertanyaan, sedangkan pihak yang kedua adalah yang memberikan jawaban dari pertanyaan yang diberikan oleh pihak pewawancara yaitu pihak terwawancara (*interviewee*) (Moleong, 2014:186).

Kegiatan wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan kepada para informan yang terdiri dari Kabid Sumberdaya Lahan dan Kelautan Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Tulungagung, Pembinaan dan Saran Usaha pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Tulungagung, Seksi Tanaman Hias dan Biofarmaka Bidang Produksi Holtikultura pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Tulungagung, Kasubid Pengembangan Sumber Daya Pangan pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Tulungagung, serta ketua Kelompok Tani “Sekar Wilis” yang juga sebagai petani bunga. Untuk memudahkan penelitian dalam mendapatkan data secara maksimal, maka

wawancara dilakukan secara terstruktur dengan berpedoman pada pedoman wawancara (*interview guide*).

2. Observasi

Observasi merupakan cara untuk mendapatkan informasi atau data penelitian yang valid dan akurat agar dapat digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian, pengamatan dilakukan secara langsung terhadap objek yang akan diteliti. Kegiatan observasi yang dilakukan oleh peneliti menggunakan metode observasi non partisipasi, yakni peneliti tidak terlibat langsung dalam proses atau kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Tulungagung. Peneliti hanya sebagai pengumpul data dan tidak mempengaruhi objek amatan. Pengamatan yang dilakukan oleh peneliti meliputi melihat objek dan lokasi penelitian serta berdasarkan pengetahuan dan teori yang telah dimiliki.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan untuk mencari data, mengumpulkan data mengenai hal-hal yang berkaitan dengan fokus permasalahan yang diperoleh dari dokumen-dokumen ataupun arsip yang berkaitan dengan penelitian. Dokumen yang diperlukan yaitu dokumen masterplan strategi pengembangan pertanian tanaman hias di Desa Geger Kecamatan Sendang, Rencana Strategi Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan, dan data hasil produksi tanaman hias di Desa Geger Kecamatan Sendang.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian dilakukan untuk memperoleh data dalam rangka memecahkan permasalahan, sehingga tujuan melakukan penelitian dapat tercapai.

Menurut Moleong (2014:223) menyatakan bahwa:

“Dalam penelitian kualitatif instrumen utamanya adalah peneliti sendiri, namun selanjutnya setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka kemungkinan akan dikembangkan instrument penelitian sederhana, yang diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui observasi dan wawancara. Peneliti akan terjun ke lapangan sendiri baik pada *grand tour question*, tahap *focused and selection* melakukan pengumpulan data, analisis dan membuat kesimpulan.”

Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Peneliti

Pada penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai pelaku utama. Peneliti bisa berhadapan langsung dengan informan yang berperan sebagai narasumber penelitian agar dapat berinteraksi langsung dan lebih memahami fenomena yang ada di lapangan. hal ini karena peneliti harus melakukan pengumpulan data, pengkajian dan pertimbangan secara konseptual, serta melakukan analisis data terkait permasalahan yang terjadi di lapangan dan fokus penelitian.

2. Pedoman wawancara (*interview guide*)

Pedoman wawancara adalah serangkaian pertanyaan yang akan diajukan kepada pihak-pihak informan dalam penelitian. Pedoman wawancara berisikan poin-poin yang menjadi dasar dan pedoman dalam melakukan wawancara. Pertanyaan yang ada dalam pedoman

wawancara harus memiliki relevansi yang dibutuhkan oleh peneliti terkait permasalahan dan fokus penelitian.

3. Perangkat Penunjang

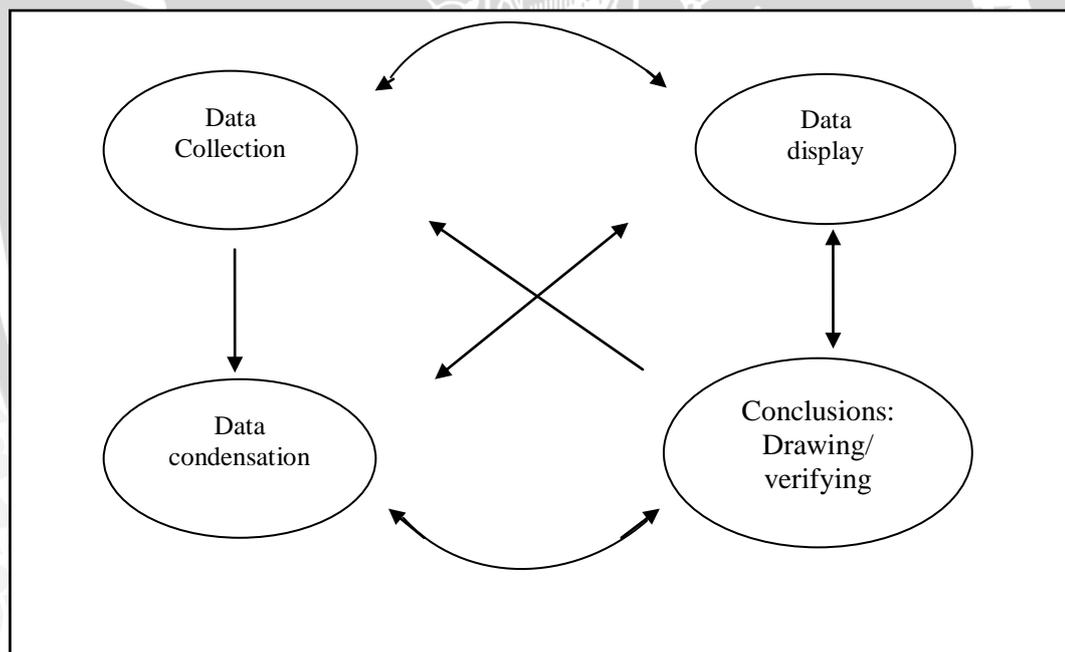
Perangkat penunjang yang digunakan dalam penelitian ini berupa atatan lapangan/ *field note*, *recorder* dan kamera. Catatan lapangan/ *field note* digunakan untuk mencatat informasi-informasi penting yang berkaitan dengan bagaimana strategi pemerintah dalam mengembangkan komoditi pertanian tanaman hias di Desa Geger serta alternatif strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan perkembangan komoditi tanaman hias di Desa Geger Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung. Selain itu, *recorder* dipergunakan oleh peneliti untuk merekam wawancara dengan informan. Peneliti juga menggunakan kamera untuk mengambi gambar yang terkait dengan objek penelitian.

G. Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyederhanaan data yang dilakukan dalam penelitian kualitatif pada saat pengumpulan data berlangsung yang kemudian disusun dalam bentuk yang lebih mudah untuk di interpretasikan (Sugiono, 2013:91). Analisis data pada suatu penelitian sangatlah penting, karena dengan melakukan analisis data maka data yang telah di dapat oleh peneliti dapat diolah dan digunakan untuk memecahkan masalah yang terjadi dan dapat mencapai tujuan penelitian. Selain itu, analisis data dapat mempermudah peneliti

dalam menganalisis dan menyajikan data. Model analisis deskriptif dapat memberikan gambaran bagaimana alur logika analisis dalam penelitian ini.

Analisis deskriptif merupakan suatu proses untuk mendeskripsikan dan menggambarkan suatu fenomena atau hubungan antar fenomena yang terjadi secara sistematis, faktual, dan akurat. Penelitian ini menggunakan model analisis data interaktif dari Miles dan Huberman. Model analisis ini terdiri dari empat tahap yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Tujuannya adalah untuk menyajikan data agar lebih sistematis, faktual dan akurat.



Gambar 3. Model Analisis Data Interaktif

Sumber: Miles Huberman dalam Saldana et al (2014:14)

Alur kegiatan analisis data interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam Saldana et al (2014:12) antara lain:

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Pengumpulan data (*Data Collection*) merupakan proses awal yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan data yang valid. Tahap ini dilakukan dengan melakukan observasi ke lapangan, wawancara dengan narasumber, serta dokumentasi berupa foto.

2. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Kondensasi data (*Data Condensation*) adalah suatu proses pemilihan, penyederhanaan dan transformasi data mentah yang di peroleh dari lapangan. Proses ini dilakukan secara terus-menerus selama penelitian berlangsung, bahkan kondensasi data juga bisa dilakukan sebelum data terkumpul secara keseluruhan. Kondensasi data dilakukan dengan cara menguraikan secara lengkap dan terperinci data yang diperoleh dari lokasi penelitian.

Kemudian, hasil uraian tersebut disederhanakan, dirangkum, difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari tema atau polanya. Proses ini dilakukan secara terus-menerus, baik selama proses penelitian berlangsung maupun pada tahap analisa data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Tahap ini dilakukan dengan tujuan untuk memperkuat data, berbeda dengan sebuah konsep reduksi data yang terkesan melemahkan data karena membuang data yang diperoleh dari lapangan.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dalam bentuk teks yang bersifat naratif. Penyajian data

dapat dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Penyajian data ini bertujuan untuk memudahkan peneliti untuk memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan.

4. Menarik Kesimpulan atau Diversifikasi

Tahap ini bertujuan untuk mencari makna dengan mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan-penjelasan, konfigurasi yang memungkinkan adanya alur sebab-akibat dan proposisi. Verifikasi adalah proses peninjauan ulang catatan lapangan serta bertukar pikiran dengan orang lain untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif, serta upaya untuk mendapatkan salinan suatu temuan dalam data lain, selain itu data juga harus diuji kebenarannya. Pengambilan kesimpulan pada tahap ini bersifat sementara, dapat berubah sewaktu-waktu apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung tahap pengumpulan data selanjutnya.

Apabila kesimpulan pada tahap awal sudah didukung oleh bukti-bukti yang valid, maka kesimpulan yang telah dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Sebagai contoh, apabila setelah melalui proses kondensasi data dan penyajian data hasilnya harus disesuaikan dengan teori yang sudah ada. Apabila antara data dan teori tersebut terdapat hubungan, maka peneliti dapat mengambil garis besar dari hasil penelitian tersebut yang disesuaikan dengan permasalahan dalam penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

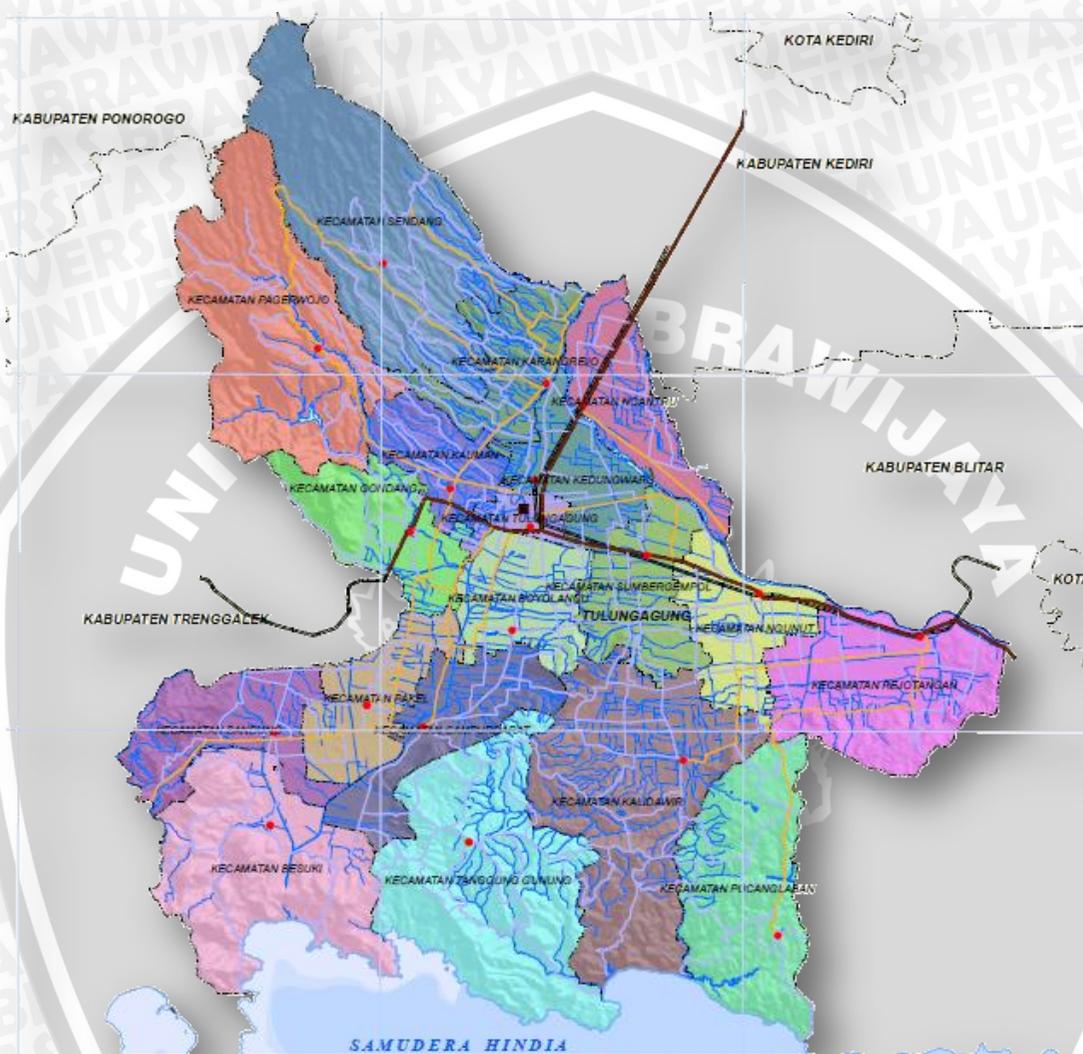
A. Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Gambaran Umum Kabupaten Tulungagung

Kabupaten Tulungagung memiliki letak yang sangat strategis karena berdekatan dengan Ibu Kota Provinsi Jawa Timur yaitu 154 km ke arah Barat Daya dari Kota Surabaya. Secara geografis Kabupaten Tulungagung terletak pada koordinat ($111^{\circ}43'$ - $112^{\circ}07'$) Bujur Timur dan ($7^{\circ}51'$ - $8^{\circ}18'$) Lintang Selatan dengan titik nol derajat dihitung dari *Greenwich* Inggris.

Secara administratif, wilayah Kabupaten Tulungagung dibagi menjadi 19 Kecamatan, 257 Desa dan 14 Kelurahan. Luas keseluruhan wilayah Kabupaten Tulungagung mencapai $\pm 1.055,65 \text{ km}^2$. Dengan jumlah penduduk pada tahun 2015 sebesar 1.053.276 jiwa dengan kepadatan penduduk mencapai 966 jiwa/ km^2 .



Gambar 4. Peta Kabupaten Tulungagung

Sumber: Kabupaten Tulungagung dalam Angka (2015:1)

Batas – batas wilayah Kabupaten Tulungagung adalah:

Sebelah Utara : Kabupaten Kediri

Sebelah Timur : Kabupaten Blitar

Sebelah Selatan : Samudera Hindia/ Indonesia

Sebelah Barat : Kabupaten Trenggalek

Menurut keadaan geografisnya, daerah Kabupaten Tulungagung dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu:

- Bagian Utara (Barat Laut) seluas $\pm 25\%$ adalah daerah lereng gunung yang relative subur yang merupakan bagian tenggara dari Gunung Wilis.
- Bagian Selatan seluas $\pm 40\%$ adalah daerah perbukitan yang relatif tandus, namun kaya dengan potensi hutan dan pertambangan, yang merupakan bagian dari Pegunungan Selatan Jawa Timur.
- Bagian Tengah $\pm 35\%$ merupakan dataran rendah yang subur dimana dataran ini dilalui oleh sungai Brantas dan sungai Ngrowo serta percabangannya.

Pembagian penggunaan wilayah Kabupaten Tulungagung seluas 1.055,65 km² yang dimanfaatkan sebagai lahan pertanian berdasarkan data dari Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan adalah sebagai berikut:

- 1) Lahan Sawah (ha)
 - a) Irigasi teknis 19.778
 - b) Irigasi setengah teknis 3.184
 - c) Irigasi sederhana 2.159

d) Irigasi desa (non PU)	-
e) Tadah hujan	2.604
Jumlah	27.725

2) Lahan non-sawah

a) Pekarangan	30.201
b) Tegal/kebun	26.742
c) Lading	222
d) Sementara tidak diusahakan	243
e) Ditanami pohon/hutan rakyat	5.755
f) Hutan negara	-
g) Perkebunan	2.712
h) Lain-lain	12.686
Jumlah	78.561

b. Gambaran Umum Kecamatan Sendang

Kecamatan Sendang merupakan bagian dari Wilayah Kabupaten Tulungagung yang terletak di sebelah barat laut dari pusat pemerintahan Kabupaten Tulungagung. Wilayah Kecamatan Sendang berada pada ketinggian ± 550 m di atas permukaan laut dan secara geografis terletak pada $111^{\circ}24'$ - $112^{\circ}11'$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 53'$ - $8^{\circ} 34'$ Lintang Selatan. Keadaan curah hujan di Kecamatan Sendang pada tahun 2012 rata-rata mencapai 85

mm, dengan jumlah hari hujan 268 hari dan musim penghujan terjadi sepanjang tahun.

Tabel 5. Luas Wilayah Kecamatan Sendang

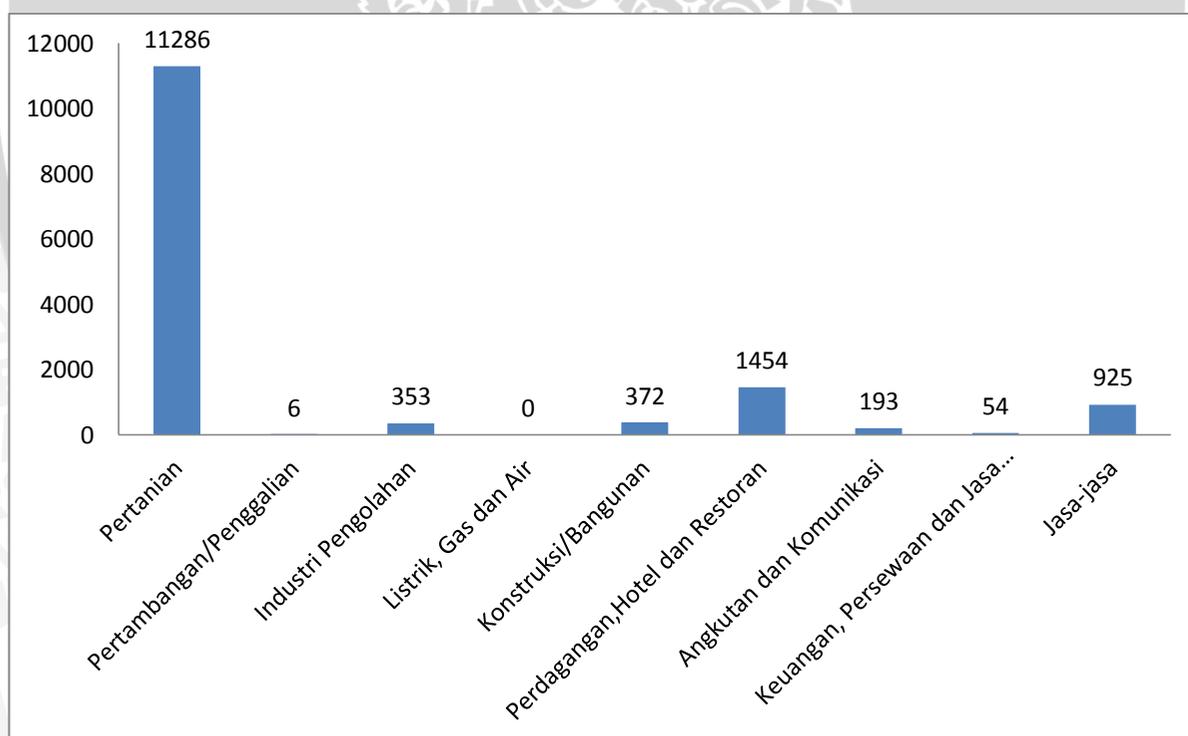
No	Desa	Luas Wilayah	Jarak ke Ibu Kota Kecamatan
1	Kedoyo	12,97 km ²	11 km
2	Ngluntung	5,03 km ²	6 km
3	Talang	3,60 km ²	8 km
4	Dono	4,05 km ²	7 km
5	Krosok	4,81 km ²	4 km
6	Tugu	3,92 km ²	3 km
7	Picisan	10,27 km ²	17 km
8	Nyawangan	19,93 km ²	12 km
9	Sendang	2,73 km ²	1 km
10	Nglurup	14,37 km ²	2 km
11	Geger	26,62 km ²	5 km

Sumber: Kecamatan Sendang Dalam Angka (2013:12)

Dari seluruh desa di Kecamatan Sendang, yang mempunyai wilayah terluas adalah Desa Nyawangan dengan luas wilayah 25,25 km² dan wilayah tersempit adalah Desa Talang dengan luas wilayah 2,98 km², sedangkan bila dilihat dari jumlah penduduknya, Desa Nyawangan juga merupakan desa

yang jumlah penduduknya terbanyak dengan 2.940 jiwa dan yang paling sedikit adalah Desa Sendang dengan jumlah penduduk 2.887 jiwa. Bila dilihat dari penggunaannya, lahan di Kecamatan Sendang terbagi menjadi dua jenis yaitu lahan sawah dan lahan kering dengan luas masing-masing 2.842,2 Ha dan 7.986,6 Ha.

Keadaan tanah di Kecamatan Sendang berasal dari batuan induk atau abu vulkanik Gunung Wilis yang berwarna coklat kehitam-hitaman yang dapat dikelompokkan menjadi: Litosol (6.960,526 Ha), Andosol (2.500,000 Ha) dan Mediteran Coklat (85,000 Ha).



Gambar 5. Potensi Kecamatan Sendang

Sumber: Pengembangan Kawasan Agropolitan & Minapolitan di Kabupaten Tulungagung (2014:14).

Pada diagram di atas menunjukkan bahwa pertanian merupakan sektor unggulan dan merupakan sumber perekonomian masyarakat. Sektor paling banyak yang digeluti masyarakat Kecamatan Sendang. Hal tersebut dikarenakan Kecamatan Sendang merupakan daerah agraris yang ditunjang dengan adanya 2 musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Disamping dari sektor pertanian, sumber penghasilan rumah tangga juga menunjang perekonomian masyarakat di Kecamatan Sendang.

c. Kawasan Agropolitan Sendang (KAS)

Agar pengembangan Kawasan Agropolitan Sendang (KAS) semakin pesat di berbagai bidang terutama di sektor pertanian membutuhkan faktor-faktor pendukung guna meningkatkan hasil produksi, khususnya dengan didukung oleh teknologi pertanian yang memadai. Pengembangan kawasan agropolitan harus terus dilakukan secara berkelanjutan untuk mengoptimalkan hasilnya dan menjadikan kegiatan ini sebagai tulang punggung perekonomian yang melibatkan swasta, masyarakat, masyarakat dan pemerintah.

1) Bidang Pertanian

Pertanian merupakan sektor utama dalam pembangunan ekonomi di Kabupaten Tulungagung, mengingat Kabupaten Tulungagung merupakan daerah agraris. Selain kontribusinya dalam PDRB, peranan sektor pertanian antara lain sebagai penyerap tenaga kerja terbesar di Kabupaten Tulungagung.

Desa Geger sendiri tidak bisa terlepas dari sektor pertanian karena menyimpan banyak potensi di bidang tersebut. Desa Geger terkenal akan bermacam sayuran antara lain Daun Bawang, Cabe Besar, Tomat, Bayam, Sawi, Kacang Panjang, Buncis, Kangkung, Cabe Rawit, Kubis, Terong, Kentang dan lain-lain. Untuk Buah-buahan juga banyak jenis yang dihasilkan antara lain Durian, Duku, Belimbing, Alpokat, Mangga, Manggis, Nangka, Pisang dan lain-lain. Selain komoditas diatas, pada tahun 2012 terdapat terobosan baru penanaman tanaman hias bunga potong seperti Bunga Krisan, *Gladiol* dan *Golden Peacock* yang dirintis oleh kelompok Tani Bunga di Desa Geger. Dengan pengembangan jenis usaha ini, diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Geger dan sekitarnya.

2) Bidang Perkebunan

Sumber Daya Alam Perkebunan yang terdapat di wilayah Desa Geger, Kecamatan Sendang sangat berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai daerah agribisnis yang bertujuan untuk menciptakan sumber perekonomian baru terutama bagi masyarakat di Kawasan Agropolitan yang ada di Desa Geger. Desa Geger yang berada di Kawasan Gunung Wilis merupakan bagian dari wilayah perkebunan Provinsi Jawa timur yang memiliki iklim dan jenis tanah sangat cocok untuk komoditas perkebunan seperti Cengkeh, Kopi dan Kelapa. Pada Kawasan

Agropolitan ini pembangunan perkebunan lebih diarahkan pada pengolahan produk-produk hasil perkebunan yang member nilai tambah tinggi untuk masyarakat pembudidaya. Upaya pengembangan perkebunan yang dilakukan lebih diprioritaskan pada usaha perkebunan di bagian hulu yang dilakukan oleh petani dan kelompok tani.

3) Bidang Peternakan

Upaya pembangunan bidang peternakan di Kabupaten Tulungagung diarahkan pada peningkatan populasi dan produksi ternak, peningkatan kesehatan ternak serta meningkatkan pengolahan pasca panen produk hasil ternak yang mampu memantapkan ketahanan pangan dan gizi dengan mengoptimalkan pengembangan potensi wilayah yang sesuai dengan komoditas yang tersedia. Topografi yang dimiliki oleh Desa Geger sangat sesuai apabila dimanfaatkan untuk pengembangan usaha di bidang peternakan. Hal ini didukung oleh kondisi tanah di wilayah Desa Geger yang sangat baik ditanami berbagai jenis rumput untuk makanan ternak sehingga cocok untuk pemeliharaan Sapi Perah, Sapi Potong, Kerbau dan Kambing.

Menurut data Pengembangan Kawasan Agropolitan, komoditas unggulan di Desa Geger adalah Sapi Perah dengan jumlah pemilik sebanyak 837 orang dengan jumlah ternak 2.437. Pembangunan pada sektor peternakan di Desa Geger merupakan tindak lanjut dari program yang dilakukan

pada tahun-tahun sebelumnya, tujuan dari pembangunan peternakan itu antara lain:

1. Meningkatkan pendapatan dan pemerataan kesempatan kerja melalui peningkatan produksi dan hasil ternak;
2. Meningkatkan jumlah dan produktivitas ternak dan usaha untuk mempertahankan kelestarian dan kemurnian ternak asli secara selektif;
3. Meningkatkan populasi ternak dan hasil ternak untuk menuju swasembada protein hewani;
4. Mengembangkan daya dukung wilayah secara terpadu.

d. Kondisi Desa Geger

Desa Geger, sesuai dengan keputusan Bupati tulungagung Nomor 522 tanggal 18 Juni 2004 tentang penetapan Lokasi Pengembangan Kawasan Agropolitan Sendang (KAS) ditetapkan sebagai kota tani atau Kawasan Sentra Produksi (KSP) sayuran dan peternakan. Penentuan Kawasan Agropolitan Sendang (KAS) Kabupaten Tulungagung sebagai wilayah agropolitan telah memperhatikan beberapa hal, antara lain:

- 1) Dasar Hukum;
- 2) Tinjauan Dasar Wilayah;
- 3) Kebijakan Pemanfaatan Ruang;
- 4) Kependudukan;

5) Potensi Agribisnis Pertanian.

Untuk mempertajam pengambilan keputusan, maka Pemerintah Kabupaten juga telah melakukan analisis yang mendalam dalam aspek pengembangan sektor pertanian, penetapan komoditas unggulan/andalan, struktur tata ruang kawasan, kebutuhan sarana dan prasarana serta sumberdaya manusia. Berdasarkan analisis tersebut, maka ditetapkanlah Desa Geger sebagai kota tani atau Kawasan Sentra Produksi (KSP) sayuran dan peternakan dengan *hinterland* (pendukung kota tani dan pusat distribusi) meliputi beberapa desa seperti Nglurub, Sendang, Kedoyo, Krosok, Picisan dan Nglutung.

Penetapan Desa Geger sebagai Kota Tania atau Kawasan Sentra Produksi (KSP) memiliki beberapa pertimbangan obyektif yang mendasar, yaitu:

- 1) Lokasi desa yang ada di bagian atas/dataran tinggi dari wilayah Kawasan Agropolitan Sendang (KAS).
- 2) Mempunyai keunggulan komparatif spesifik yaitu komoditas sayuran dan sapi perah.
- 3) Telah mempunyai model kemitraan di bidang peternakan dan sayuran.
- 4) Sebagai pusat pertumbuhan agribisnis.

Jarak dari Desa Geger ke Ibu Kota Kecamatan Sendang adalah 5 km dan luas wilayah Desa Geger 26,62 km². Luas lahan menurut penggunaannya adalah:

Tabel 6. Data Penggunaan Lahan

No.	Jenis Penggunaan Lahan	Luas Lahan (Ha)
1.	Sawah Teknis	87,0
2.	Sawah Tadah Hujan	49,0
3.	Tanah Sawah	136,0
4.	Tanah Kering Pekarangan	36,9
5.	Tanah Kering Tegak	200,2
6.	Hutan Negara	1.600,0
7.	Perkebunan	689,0

Sumber: Pengembangan Kawasan Agropolitan & Minapolitan di Kabupaten Tulungagung 2014 (2014:18)

Adapun batas – batas Desa Geger adalah sebagai berikut:

- Sebelah Barat Kecamatan Pagerwojo;
- Sebelah Timur Desa Nglurup;
- Sebelah Utara Desa Sendang;
- Sebelah Selatan Kecamatan Pagerwojo.

2. Gambaran Umum Situs Penelitian

a. Gambaran Umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung.

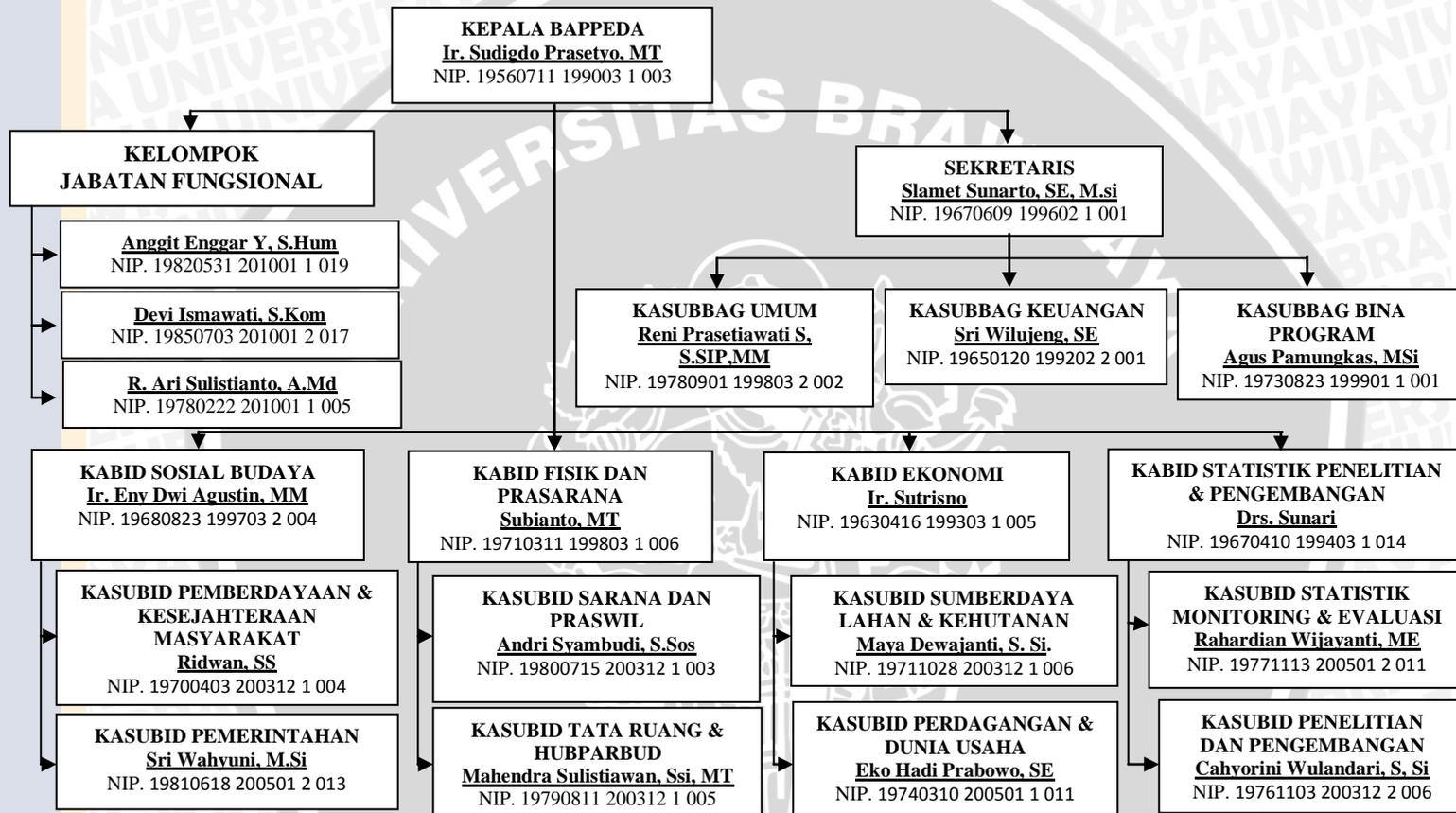
Visi BAPPEDA

“Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Yang Profesional Dan Aspiratif Untuk Keberhasilan Pembangunan Daerah”.

Misi BAPPEDA

Untuk mewujudkan visi BAPPEDA Kabupaten Tulungagung tersebut, maka disusunlah misi yang menjadi tanggung jawab institusi, yakni:

- 1) Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang professional melalui dokumen perencanaan yang proaktif dan aspiratif.
- 2) Meningkatkan koordinasi integrasi, sinkronisasi dan sinergi dalam rangka perencanaan pembangunan daerah.
- 3) Meningkatkan peran penelitian dan penyediaan data melalui kerjasama dengan berbagai pihak.
- 4) Meningkatkan monitoring dan evaluasi sebagai timbal balik perencanaan pembangunan ke depan.



Gambar 6. Struktur Organisasi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah

Sumber: www.tulungagung.co.id

b. Gambaran Umum Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Tulungagung.

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Tulungagung memiliki tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura. Seperti yang telah tertuang pada Peraturan Bupati Tulungagung nomor 30 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Tulungagung.

Berdasarkan Keputusan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Tulungagung memiliki kedudukan sebagai berikut:

- 1) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura merupakan unsure pelaksana Pemerintah Kabupaten.
- 2) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah kewenangan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Tulungagung adalah:

“Melaksanakan Kewenangan Otonomi Daerah Dibidang Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura”

Untuk menjalankan tugas tersebut, maka Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) Merumuskan kebijakan teknis di bidang pertanian dan tanaman pangan dan holtikultura.
- 2) Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pertanian tanaman pangan dan holtikultura.
- 3) Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknik Dinas dan Cabang Dinas di bidang Pertanian Tanaman Pangan dan holtikultura.
- 4) Pengelolaan urusan kesekretarisan Dinas.

Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Tulungagung, maka Visi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Tulungagung adalah:

“ Terwujudnya Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura yang Berwawasan Agribisnis Berkelanjutan, Kemandirian dan Kesejahteraan Masyarakat Tani”

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan tersebut, maka ditetapkanlah misi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Tulungagung yang menggambarkan hal yang seharusnya terlaksana, sehingga hal yang masih abstrak pada visi akan lebih nyata pada misi tersebut. Misi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Tulungagung menggambarkan kebutuhan apa yang hendak

dipenuhi oleh dinas, siapa yang memiliki kebutuhan tersebut dan bagaimana dinas memenuhi kebutuhan tersebut. Misi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Tulungagung ditetapkan sebagai berikut:

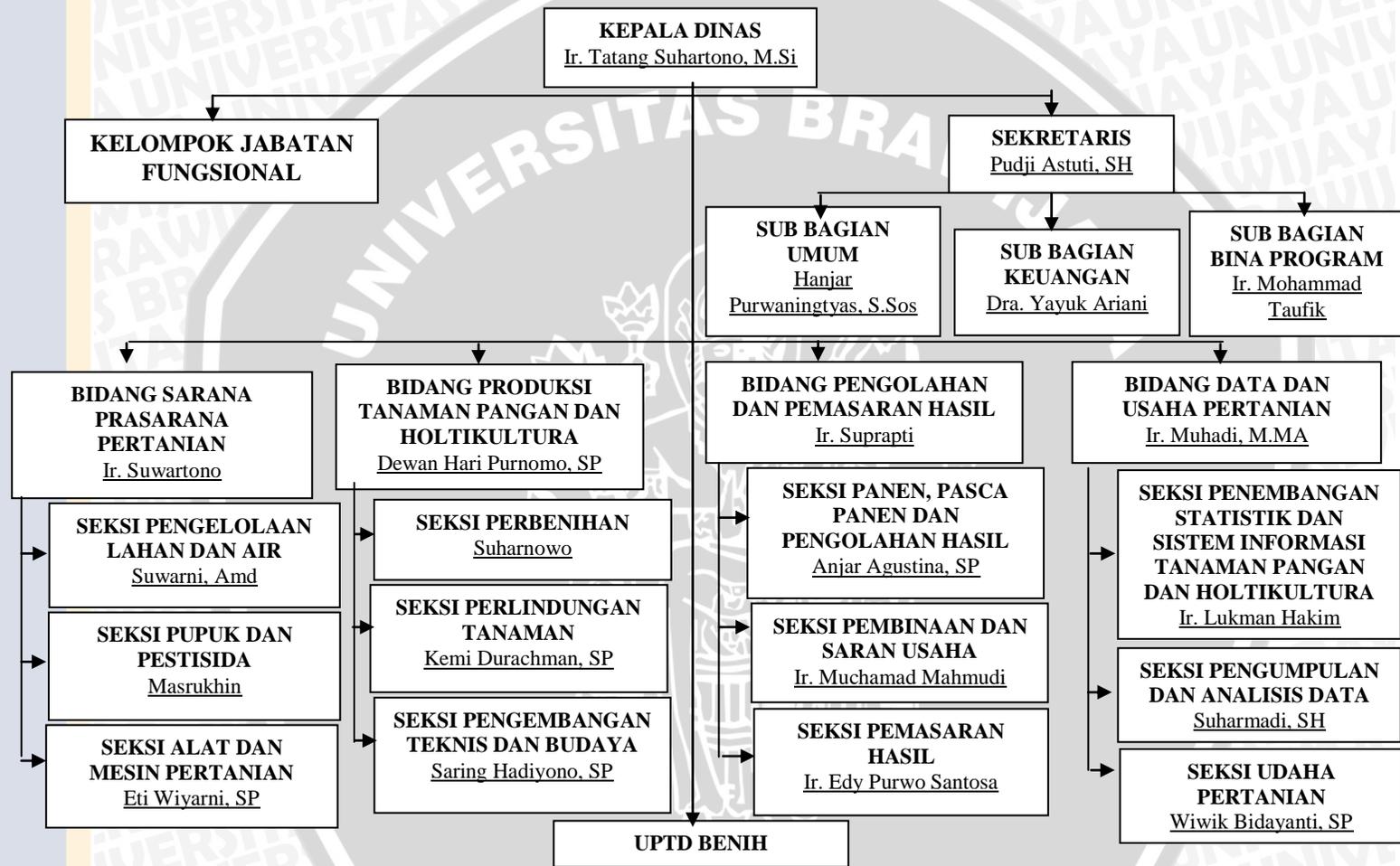
- 1) Mengelola sumberdaya alam pertanian secara optimal dan berkelanjutan.
- 2) Memperluas jangkauan pembangunan pertanian melalui diversifikasi teknologi, sumberdaya, produksi dan konsumsi.
- 3) Mengoptimalkan agribisnis untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam berusaha tani dan pendapatan masyarakat tani.

Arah kebijakan terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut:

- 1) Membangun bidang pertanian ke arah agribisnis dan agroindustri dengan memperkuat sistem pertanian dalam arti luas.
- 2) Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pertanian dalam arti luas, guna menjaga sistem produksi pertanian dengan baik.
- 3) Peningkatan efisiensi, produksi, daya saing dan nilai tambah produksi pertanian dalam arti luas disertai dengan pembinaan intensif untuk mendorong peningkatan ekspor produk-produk pertanian.

- 5) Peningkatan dalam pengembangan kualitas sumberdaya manusia pertanian dan fungsi kelembagaan pertanian.





Gambar 7. Struktur Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura

Sumber: Profil Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura (www.tulungagung.go.id 2015)

c. Gambaran Umum Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Tulungagung.

Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan merupakan Kelembagaan Pemerintah Kabupaten Tulungagung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan di pimpin oleh seorang Kepala Badan yang dibantu oleh seorang Sekretaris Badan dan 4 Kepala Bidang yang terdiri dari Bidang Pengkajian Ketersediaan dan Distribusi Pangan, Bidang Konsumsi Pangan dan Gizi, Bidang Pengembangan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, dan Bidang Pengembangan Sumberdaya Petani serta di bantu oleh 11 pejabat eselon IV disamping Kelompok Jabatan Fungsional.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2008, Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Tulungagung mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan Kewenangan Otonomi Daerah di Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan. Berdasarkan Keputusan Bupati tentang Organisasi dan Tatakerja Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Tulungagung mempunyai keuddukan:

- 1) Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan merupakan unsure pendukung Pemerintah Daerah.

- 2) Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2014, Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Tulungagung mempunyai tugas:

“Melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan berdasarkan azas otonomi”

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Tulungagung mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan dan perumusan program serta rencana kegiatan kebijakan teknis bidang ketahanan pangan dan penyuluhan;
- 2) Pengidentifikasi ketersediaan dan konsumsi pangan serta pemantauan pengelolaan cadangan pangan;
- 3) Pemantauan evaluasi dan pengelolaan distribusi pangan terutama komoditas pangan strategis;
- 4) Pengendalian dan perumusan kebijakan harga komoditas pangan strategis;
- 5) Pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan;
- 6) Pelaksanaan penyuluhan pertanian dan gerakan peningkatan mutu konsumsi pangan dan penganekaragaman pangan;

- 7) Pengawasan dan pengendalian sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
- 8) Pengembangan dan penyebaran teknologi pertanian;
- 9) Pengembangan kelembagaan usaha pertanian;
- 10) Pengembangan kelembagaan petani;
- 11) Pengembangan materi, informasi dan metode penyuluhan pertanian;
- 12) Pengembangan informasi pasar;
- 13) Pengkajian teknologi spesifik lokal;
- 14) Pengembangan kemitraan usaha pelaku utama dan pelaku usaha;
- 15) Pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan.
- 16) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Tulungagung tersebut, maka visi Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Tulungagung adalah:

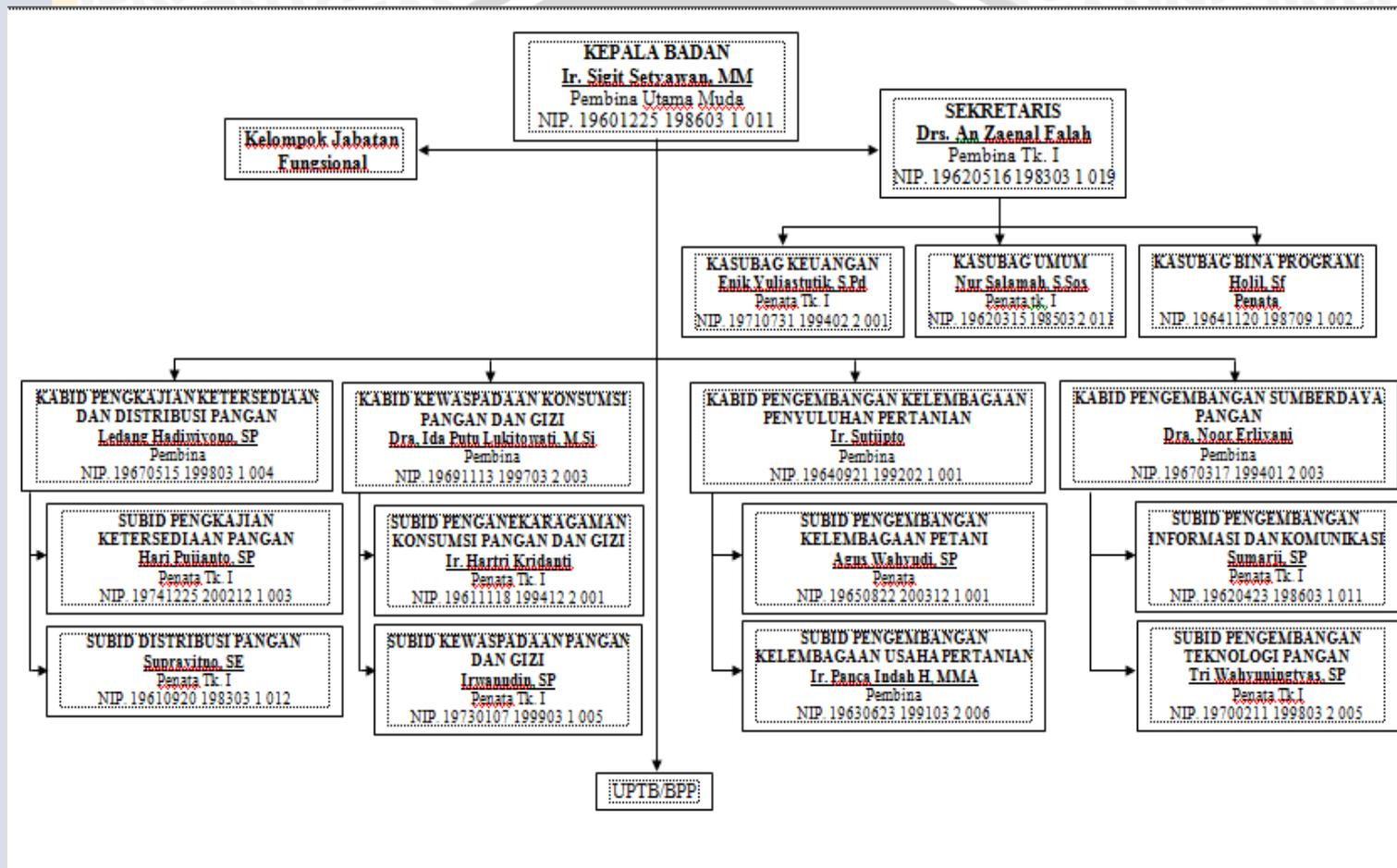
**“Pembangunan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
dalam Pemantapan Ketahanan Pangan”**

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan telah menetapkan misi sebagai berikut:

- 1) Memantapkan ketersediaan dan cadangan pangan daerah.
- 2) Mewujudkan Pengembangan Sistem Distribusi dan Akses Pangan Masyarakat.

- 3) Mewujudkan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan.
- 4) Terwujudnya Penanganan Kerawanan Pangan.
- 5) Mewujudkan pengembangan kelembagaan pangan, kelembagaan penyuluhan dan kelembagaan petani.
- 6) Memberdayakan Sumberdaya Manusia Pertanian untuk peningkatan aksesibilitas sumber informasi dan teknologi.





Gambar 8. Struktur Organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian

Sumber: Profil Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Tulungagung (2015: 24)

d. Gambaran Umum Kelompok Tani “Sekar Wilis”

Kelompok Tani “Sekar Wilis” merupakan kelompok petani tanaman hias yang terbentuk dari upaya pengurus gereja setempat untuk membangun perekonomian dan pemberdayaan masyarakat sekitar gereja di Desa Geger Kecamatan Sendang. Kelompok tani ini terbentuk tahun 2012 dengan anggota kelompok sebanyak 45 anggota dan terdaftar secara resmi pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Tulungagung. Kelompok tani ini merupakan satu-satunya kelompok yang membudidayakan bunga krisan di Kabupaten Tulungagung. Kantor Kelompok Tani “Sekar Wilis” terletak di Dukuh Potroso Desa Geger Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung. Daerah ini terletak pada ketinggian sekitar 800-1100 DPL sehingga memiliki potensi alam yang sangat cocok untuk pengembangan tanaman hias.

Komoditas utama dari Kelompok Tani “Sekar Wilis” ini adalah Bunga Krisan dan Aster, sedangkan untuk komoditas lainnya adalah daun *phylo*, *Sang Of India*, Bunga *Houtensia*, *Peacock*, *Leather Leaf* dan Krisan Pot. Selain usaha budidaya bunga, Kelompok Tani “Sekar Wilis” juga memiliki usaha pembuatan pupuk kompos dengan memanfaatkan limbah ternak sapi dan kambing yang dimiliki oleh masyarakat sekitar Dukuh Protosumo untuk menunjang proses penanaman Bunga Krisan. Sehingga pada penanaman Bunga Krisan di kelompok ini mengurangi penggunaan bahan-bahan kimia agar media tanam tidak tercemar dan dapat terus menghasilkan tanaman yang memiliki kualitas baik.

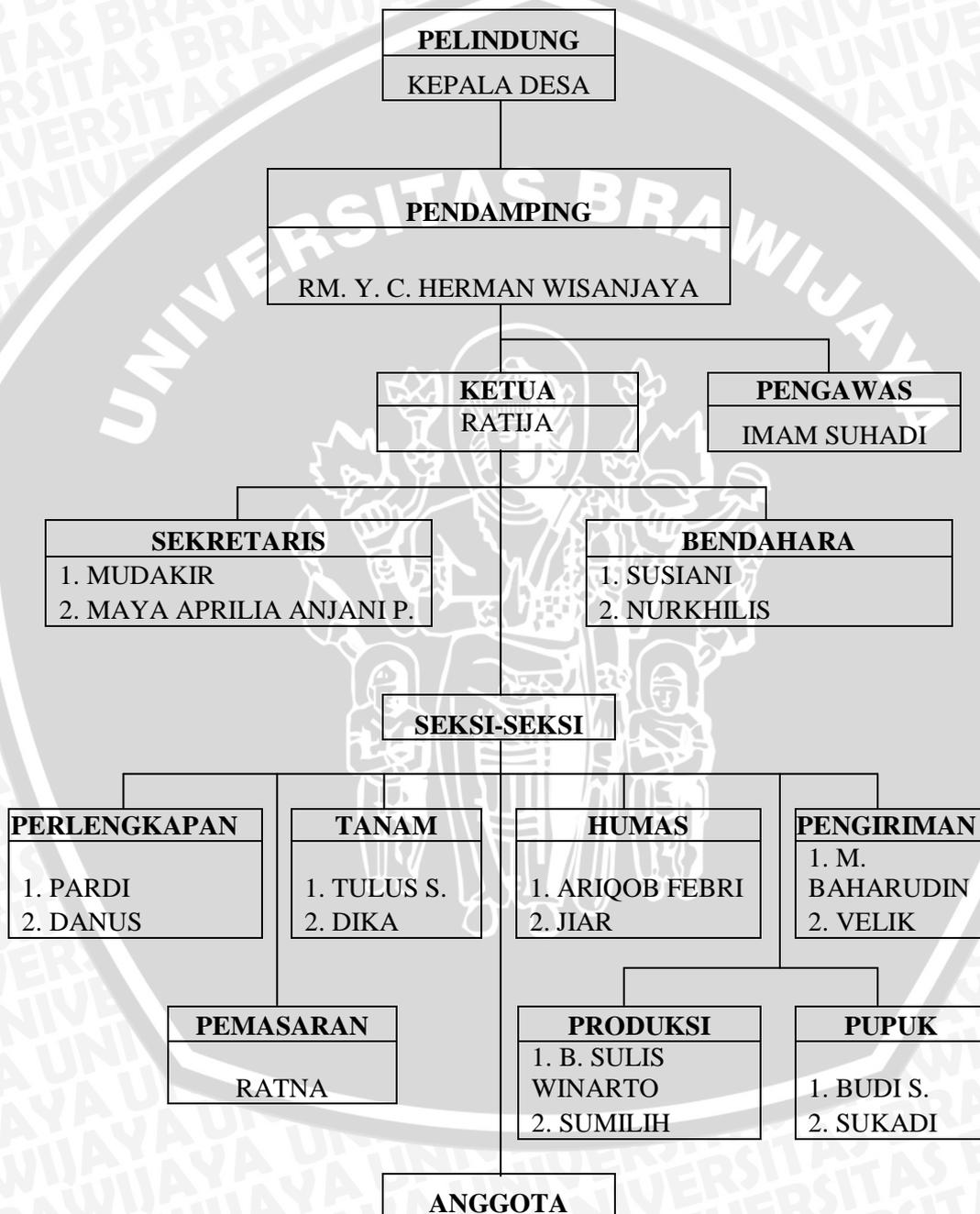
Saat ini Kelompok Tani “Sekar Wilis” memiliki 16 *Green House* baik bantuan dari pemerintah, milik pribadi maupun swadaya masyarakat. Hasil produksi Bunga Krisan Kelompok Tani “Sekar Wilis” mencapai 210.000 ikat/Tahun dimana dalam 1 ikat terdiri dari 5 potong, serta untuk Krisan Pot mencapai 3000 Pot/Tahun. Kelompok Tani “Sekar Wilis” telah mendapatkan prestasi sebagai Juara 1 Agrobisnis Tanaman Hias – Holtikultura Tingkat Provinsi Jawa Timur pada Tahun pada Tahun 2014.

Untuk pemasaran hasil panen, yang awalnya hanya untuk memenuhi kebutuhan gereja saat ini telah meluas ke Floris di daerah sekitar seperti Kota Kediri, Trenggalek, Blitar, Jombang dan Surabaya. Selain itu, dengan upaya Dinas Pertanian untuk mendatangkat para perias ke lokasi pengembangan tanaman hias ini juga dapat memperluas pangsa pasar hasil produksi dari Kelompok Tani “Sekar Wilis”.

STRUKTUR ORGANISASI KELOMPOK TANI BUNGA

“SEKAR WILIS”

DESA GEGER KECAMATAN SENDANG



Gambar 9. Struktur Organisasi Kelompok Tani “Sekar Wilis”

Sumber: Profil Kelompok Tani Bunga “Sekar Wilis” (2012:10)



B. Penyajian Data dan Fokus Penelitian

Peneliti menyajikan data-data dari hasil observasi yang sesuai dengan fokus penelitian. Hasil wawancara mengenai strategi pemerintah, implementasi strategi yang sesuai dengan teori Wheelen dan Hunger, serta faktor pendukung serta penghambat dari implementasi strategi yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung. Kategori data tersebut dipilih agar tidak melebar dari fokus penelitian yang telah ditetapkan, untuk lebih detil akan dibahas sebagai berikut:

1. Implementasi Renstra dalam Pengembangan Komoditas Sektor Pertanian Sebagai Upaya Peningkatan Daya Saing Daerah pada Agropolitan Bunga Krisan Desa Geger Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung Berdasarkan Teori George C. Edward III.

Implementasi merupakan salah satu tahap dari perumusan strategi, dimana tujuan dari implementasi ini adalah bagaimana cara agar strategi yang telah dirumuskan dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan. Kabupaten Tulungagung yang merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur dengan potensi pertanian yang baik telah ditetapkan sebagai Kawasan Agropolitan yang berlokasi di Desa Geger Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung. Kawasan Agropolitan Sendang (KAS) ditetapkan berdasarkan SK Bupati Tulungagung Nomor 522 Tahun 2004 yang juga diperkuat dengan SK Gubernur Jawa Timur Nomor 520/5684/201.2/2005 perihal penetapan Kabupaten Tulungagung sebagai kawasan agropolitan yang kemudian disusun renstra nya oleh Dinas

Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura. KAS tidak hanya memiliki potensi pada komoditas tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, serta perikanan saja namun juga memiliki potensi pada tanaman holtikultura terutama pada komoditas tanaman hias yang dapat meningkatkan daya saing terhadap daerah lain di sekitarnya. Melalui komoditas tanaman hias dengan bunga krisan sebagai produksi terbesar, Kabupaten Tulungagung dapat meningkatkan daya saingnya terhadap daerah lain seperti Kabupaten Kediri, Blitar, serta Trenggalek yang belum mempunyai komoditas pertanian tanaman hias (Pengembangan Kawasan Agropolitan & Minapolitan di Kabupaten Tulungagung 2014).

Berdasarkan dokumen Pengembangan Kawasan Agropolitan & Minapolitan di Kabupaten Tulungagung Tahun 2014, tujuan dari pengembangan kawasan agropolitan dapat dikelompokkan menjadi pengembangan sebagai peningkatan perekonomian, peningkatan daya saing, pengembangan agribisnis, dan bagi pengembangan wilayah. Pada penelitian ini di fokuskan pada pengembangan kawasan agropolitan dengan komoditas tanaman hias sebagai upaya peningkatan daya saing melalui strategi yang disusun oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Tulungagung, diantaranya strategi pemberdayaan masyarakat dan strategi pengembangan wilayah. Strategi pemberdayaan masyarakat yang telah disusun diantaranya:

- 1) Peningkatan peran masyarakat
- 2) Peningkatan peran masyarakat

- 3) Pengembangan kelembagaan agribisnis
- 4) Mengembangkan sarana dan prasarana pemasaran.

Sedangkan strategi pengembangan wilayah meliputi:

- 1) Mengembangkan sarana prasarana ekonomi
- 2) Menciptakan iklim usaha yang kondusif
- 3) Mengembangkan teknologi bidang agribisnis
- 4) Penyusunan *masterplan*
- 5) Penetapan lokasi kawasan agropolitan
- 6) Gerakan sosialisasi program pengembangan kawasan agropolitan.

Sesuai dengan teori Implementasi kebijakan dari George C. Edward III, keberhasilan suatu implementasi dapat dilihat dari beberapa unsur, antara lain:

- a. Komunikasi
- b. Sumber Daya (*resources*)
- c. Disposisi (*disposition*)
- d. Struktur Birokrasi (*bureaucratic structure*)

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, komoditas tanaman hias memiliki potensi bagi peningkatan daya saing agribisnis yang berlandaskan keunggulan komparatif wilayah dan Sumber Daya Manusia (SDM), hal ini berdasarkan hasil wawancara serta penjelasan dari Ibu Maya Dewajanti, S,Si selaku Kasubid Sumberdaya Lahan dan Kelautan pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung yang menyatakan bahwa:

“Potensi bunga hias khususnya tanaman bunga krisan yang ada di Kawasang Agropolitan Desa Geger merupakan komoditas yang baru dikembangkan tahun 2011. Komoditas ini dapat dijadikan sebagai daya saing daerah karena dalam mengembangkan komoditas ini tidak semua daerah bisa melakukannya. Perlu dukungan kondisi wilayah serta kemampuan SDM yang memadai. Di Jawa Timur hanya beberapa daerah saja yang bisa melakukan penanaman tanaman hias, sedangkan di daerah sekitar Kabupaten Tulungagung seperti Kabupaten Trenggalek, Blitar dan Kediri belum bisa melakukan”. (wawancara pada tanggal 18 April 2016 jam 08.56 WIB di Kantor Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung)

Berdasarkan wawancara tersebut, maka dapat difahami bahwa komoditas tanaman hias memiliki daya saing yang tinggi karena hanya beberapa daerah saja yang bisa mengembangkan komoditas ini. Komoditas ini bisa tumbuh dengan baik di daerah pegunungan yang memiliki suhu yang dingin serta memerlukan perawatan yang khusus. Pada lokasi KAS, hanya Desa Geger saja yang melakukan pengembangan tanaman hias. Kualitas tanaman hias yang dihasilkan oleh Kelompok Tani di Desa Geger yang bernama Kelompok Tani “Sekar Wilis” memiliki keunggulan dibandingkan dengan daerah lain seperti Kota Batu, dan Kabupaten Pasuruan karena merupakan tanaman yang masih baru dan media tanam yang digunakan adalah dari olahan pupuk organik. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Muchamad Mahmudi, selaku Seksi Pembinaan dan Saran Usaha pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Tulungagung, bahwa:

“Hasil tanaman hias yang ada di Desa Geger tidak hanya bunga krisan saja tetapi masih banyak jenis lainnya. Tanaman hias dari Desa Geger memiliki kualitas yang baik karena tanaman dan lahannya masih tergolong baru. lahan tanam yang digunakan masih belum banyak terkontaminasi hama penyakit, serta media tanam

yang menggunakan hasil olahan kotoran hewan ternak yang memanfaatkan dari peternakan di daerah sekitarnya”. (wawancara pada tanggal 19 April 2016 jam 08.35 WIB di Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Tulungagung)

Dari hasil wawancara tersebut, dapat difahami bahwa selain dapat meningkatkan daya saing daerah dengan keunggulan kualitas komoditas tanaman hias tersebut, sistem penanaman tanaman hias tersebut juga memperhatikan dampak terhadap lingkungan. Seperti penggunaan limbah kotoran hewan dari sekitar Desa Geger yang diolah untuk dijadikan pupuk. Para petani juga berupaya meminimalisir penggunaan obat kimia dalam menangani permasalahan hama tanaman.

a. Komunikasi

Salah satu unsur dari implementasi adalah upaya mengkomunikasikan atau menyampaikan informasi mengenai rencana-rencana yang disusun oleh pemerintah. Upaya penyampaian informasi atau sosialisasi dilakukan oleh pemerintah atau dinas terkait dengan melibatkan petani sebagai sasaran program melalui musyawarah. Sesuai dengan wawancara yang telah dilakukan dengan Kasubid Sumberdaya Lahan dan Kelautan pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung Ibu Maya Dewajandi, bahwa:

“Untuk sosialisasi dengan SKPD akan dilakukan secara periodik paling tidak 6 bulan sekali. Sedangkan ke masyarakat dilakukan melalui musyawarah dengan kelompok tani” . (wawancara pada tanggal 18 April 2016 jam 08.56 WIB di Kantor Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung)

Dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa sosialisasi dilakukan secara berkala, karena program ini merupakan program lintas sektoral, maka sosialisasi dilakukan antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku ketua dalam menyusun staregi serta Dinas dan Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) lain yang terlibat dalam penyusunan renstra selaku pelaksana. Selain itu, kegiatan mengkomunikasikan atau menyampaikan informasi tersebut juga merupakan kegiatan yang telah disusun dalam renstra sebagai salah satu kegiatan strategi pengembangan wilayah.

Sosialisasi tidak hanya dilakukan antara pembuat rencana dengan pelaksana saja, tetapi juga dilakukan kepada kelompok-kelompok sasaran di lapangan. Penyampaian informasi melalui sosialisasi ini dilakukan dengan tujuan agar seluruh sasaran baik pelaksana maupun penerima program mampu mengerti dan memahami kebijakan dan program-program dari renstra yang disusun sehingga tidak terjadi kesalahfahaman. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Muchamad Mahmudi, selaku Seksi Pembinaan dan Saran Usaha pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Tulungagung, bahwa:

“Upaya dalam mengkomunikasikan kebijakan dan program yang merupakan jabaran dari strategi pengembangan kawasan agropolitan dilakukan oleh masing-masing dinas dan SKPD yang terlibat dalam penyusunan strategi, dimana dinas serta SKPD tersebut sebagai pelaksana teknis. Setiap SKPD dan dinas memiliki tugas masing-masing guna melaksanakan program-program yang telah disusun. Seperti pada dinas pertanian, cara menyampaikan informasi kepada masyarakat petani sebagai sasaran dilakukan melalui musyawarah yang berkaitan dengan penyampaian program yang akan dilaksanakan. Penyampaian informasi ini sering disebut

dengan sosialisasi, sosialisasi sendiri dilakukan setiap ada bantuan yang akan turun, agar masyarakat mengerti bantuan tersebut akan dialokasikan untuk apa”. (wawancara pada tanggal 19 April 2016 jam 08.35 WIB di Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Tulungagung)

Dari hasil wawancara diatas dapat difahami bahwa penyampaian informasi kepada petani di lapangan dilakukan oleh masing-masing dinas dan SKPD yang terlibat dalam penyusunan rencana strategi pengembangan kawasan agropolitan di Kabupaten Tulungagung. Penyampaian informasi dilakukan sesuai dengan tugas masing-masing SKPD. Apabila dalam suatu forum sosialisasi program yang akan di sampaikan memerlukan kerjasama dengan dinas atau SKPD lain, maka sosialisasi tersebut akan dilakukan dengan melibatkan pihak lain atau SKPD lain. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan Bapak Ratijo selaku Ketua Kelompok Petani Bunga “Sekar Wilis” bahwa:

“Setiap ada bantuan turun kita selalu diberikan sosialisasi dan tujuan dari pemberian bantuan tersebut, seperti bantuan untuk mengembangkan tanaman *pillo jendro*. Selain mendapatkan bantuan dana untuk membeli bibit tanaman tersebut, pemerintah juga memeberikan penjelasan dan pelatihan untuk menanam dan merawat tanaman tersebut dengan mendatangkan ahli tanaman dari Kota Batu. Sehingga kita bisa memanfaatkan bantuan dengan semaksimal mungkin” (wawancara dilakukan tanggal 23 April 2016 jam 14.33 WIB di Kantor Kelompok Tani Bunga “Sekar Wilis”)

Dari hasil wawancara tersebut dapat difahami bahwa selain hanya memberikan informasi mengenai program-program dari pemerintah, para petani juga diberikan sosialisasi tentang berbagai teknik menanam bunga dan merawat bunga. Pemerintah juga bekerjasama sama dengan pihak ketiga apabila memang dalam program tersebut dinas atau SKPD tidak dapat

melaksanakannya sendiri dalam arti lain memerlukan tenaga ahli di bidang tanaman hias.

b. Sumber Daya (*resources*)

Aspek sumber daya (*resource*) merupakan salah satu aspek penting dalam proses implementasi. Sumberdaya yang dimaksud tidak hanya SDM saja akan tetapi juga meliputi sumberdaya anggaran, peralatan pendukung serta sumber daya informasi dan kewenangan. Keterlibatan sumber daya tidak hanya pada tahap implementasi saja, tetapi dapat mempengaruhi seluruh tahapan seperti pada tahap pengumpulan data, perencanaan, perumusan, implementasi, hingga proses monitoring dan evaluasi. Pelaksana kebijakan yang memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan dan melaksanakan kebijakan harus memiliki sumberdaya manusia dengan keahlian yang baik agar kebijakan tersebut dapat terlaksana secara efektif. Oleh karena itu, kemampuan SDM yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung sangat berpengaruh pada pelaksanaan strategi yang telah di susun untuk mengembangkan komoditas sektor pertanian yang dimiliki oleh Kabupaten Tulungagung. Sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Maya Dewajanti selaku Kasubid Sumberdaya Lahan dan Kelautan pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Tungagung, bahwa:

“Selama ini memang untuk penyusunan masterplan kita melibatkan pihak ketiga, tetapi untuk implementasinya kita hanya melibatkan tim pokja yang terdiri dari SKPD yang terkait, seperti BKPP, PU, Pengairan, Dinas pertanian, Kehutanan dan Perkebunan dan SKPD

lain yang memang memiliki pengetahuan dalam bidangnya”. (wawancara pada tanggal 18 April 2016 jam 08.56 WIB di Kantor Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung)

Dari hasil wawancara tersebut, sumber daya yang dilibatkan dalam pelaksanaan kebijakan dalam mengembangkan komoditas sektor pertanian khususnya pada komoditas tanaman hias ini Pemerintah Kabupaten Tulungagung melibatkan tim pokjanya sebagai pelaksana yang memang telah memiliki kemampuan dan keahlian di bidangnya masing-masing, seperti Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya sebagai pelaksana dalam bidang sarana seperti jalan dan jembatan yang sangat menunjang dalam proses transportasi untuk distribusi hasil panen para petani. Terutama pada petani bunga yang kebunnya terletak di dataran tinggi dengan kondisi jalan yang masih minim. BKPP juga memiliki kontribusi lain sesuai hasil wawancara dengan Ibu Noor Erliyani selaku Kabid Pengembangan Sumberdaya Pangan pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Tulungagung, bahwa:

“Dalam pengembangan komoditas bunga krisan, BKPP berfokus pada pengembangan sumber daya masyarakat, melalui pelatihan-pelatihan dan magang. Karena komoditas ini masih baru dan masyarakat petani masih minim pengetahuan dan kemampuan”. (wawancara dilakukan tanggal 21 April 2016 jam 07.50 WIB di Kantor Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Tulungagung)

Dari hasil wawancara tersebut, dapat difahami bahwa selain bertugas pada bidang penyuluhan pertanian dan benih, BKPP juga memiliki tugas dalam meningkatkan kemampuan sumber daya masyarakat melalui pelatihan-pelatihan. Seluruh SKPD yang terlibat

dalam penyusunan renstra pengembangan kawasan agropolitan telah menyusun program-program sesuai dengan tugasnya masing-masing. Untuk meningkatkan daya saing daerah terutama pada komoditas baru dalam sektor pertanian tanaman hias yang saat ini sedang di kembangkan di Desa Geger Kecamatan Sendang.

Selain pada sumber daya manusia sebagai pelaksana, sumber daya anggaran juga sangat berpengaruh dalam pengembangan komoditas hortikultura khususnya tanaman hias di Desa Geger Kecamatan Sendang. Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung pengembangan kawasan agropolitan dialokasikan dari berbagai sumber dana antara lain: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, dan APBD Kabupaten. Hal tersebut sesuai dengan yang ada dalam buku Pengembangan Kawasan Agropolitan dan Minapolitan di Kabupaten Tulungagung 2014, serta pernyataan dari Ibu Maya Dewajanti selaku Kasubid Sumberdaya Lahan dan Kelautan pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Tungagung, bahwa:

“Pendanaan berasal dari berbagai sumber misalnya APBD I, APBD II, APBN, DAK dan lain lain. Selama ada dana yang bisa kita manfaatkan untuk pendanaan maka akan kita alokasikan, karena mengenai agropolitan tidak hanya mengenai budidayanya saja tetapi juga secara berkelanjutan”. (wawancara pada tanggal 18 April 2016 jam 08.56 WIB di Kantor Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat difahami bahwa pendanaan untuk pengembangan kawasan agropolitan berasal dari

beberapa sumber, akan tetapi tidak ada pengalokasian khusus untuk tanaman hias. Hal tersebut disebabkan karena pada KAS memiliki banyak sektor diantaranya peternakan, pertanian tanaman pangan, perkebunan serta hortikultura, sehingga dana yang dimiliki akan di bagi sedemikian rupa berdasarkan kebutuhan yang mendesak (*urgent*). Sesuai hasil wawancara dengan Bapak Muchamad Mahmudi, selaku Seksi Pembinaan dan Saran Usaha pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Tulungagung, yang mengemukakan bahwa:

“Anggaran yang di khususkan untuk tanaman Holtikultura terutama tanaman hias di Kabupaten Tulungagung memang belum ada. Di Provinsi Jawa Timur hanya beberapa daerah saja yang mendapatkan anggaran khusus pengembangan tanaman hias dari provinsi, seperti Kota Batu dan Kabupaten Malang. Tetapi untuk tahun selanjutnya kami akan mengusulkan untuk anggaran di bidang pengembangan tanaman hias mengingat komoditas tanaman hias di Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung sangat baik perkembangannya”. (wawancara pada tanggal 18 April 2016 jam 08.56 WIB di Kantor Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung)

Dari hasil wawancara tersebut, dapat di fahami bahwa Kabupaten Tulungagung belum mendapatkan anggaran yang khusus dialokasikan untuk pengembangan tanaman hias. Oleh karena hal tersebut, maka untuk pengembangan tanaman hias anggaran yang digunakan saat berasal dari APBN, APBD provinsi dan kabupaten, serta DAK yang akan dibagi dengan komoditas lain dalam pemanfaatannya. Sampai dengan saat ini, Pemerintah Kabupaten Tulungagung telah memberikan bantuan dana untuk pengembangan tanaman hias di Desa Geger Kecamatan Sendang yang di alokasikan untuk memberikan pelatihan, magang serta

membangun prasarana penunjang dalam menanam seperti membangun “*Green House*” sebagai tempat untuk menanam bunga krisan, memberikan bantuan bibit tanaman hias sebagai contoh bibit tanaman bunga krisan, *peacock*, bibit tanaman *pillow dendrum*, serta memberikan bantuan kendaraan pengangkut hasil panen. Seperti hasil wawancara dengan Bapak Ratija selaku ketua kelompok petani bunga “Sekar Wilis” yang menyatakan bahwa:

“Setelah kita mengajukan proposal, pemerintah memberikan bantuan dengan membangun “*green house*” sebanyak 3 bangunan. Dan melihat minat pasar kemudian di bantu 15.000 bibit bunga, Selain itu, untuk mempermudah pengangkutan mengingan jalan di Desa Geger ini cukup sulit medannya, kami diberi bantuang sepeda motor roda 3 sebagai alat untuk mengangkut tanaman”. (wawancara pada tanggal 23 April 2016 Pukul 14.33 WIB di Kantor Kelompok Tani Bunga “Sekar Wilis” Desa Geger Kecamatan Sendang)

Berdasarkan wawancara di atas, dapat difahami bahwa pemerintah telah mengupayakan berbagai bantuan untuk membantu petani dalam mengembangkan tanaman hias di Desa Geger, dengan menganggarkan kebutuhan-kebutuhan petani di lapangan, serta mengalokasikan bantuan demi menjadikan tanaman hias sebagai komoditas yang bisa meningkatkan daya saing daerah. Selain mengenai anggaran dan bantuan yang diberikan oleh pemerintah, ketersediaan sumberdaya di lapangan seperti ketersediaan lahan, serta peralatan lain yang dapat menunjang implementasi kebijakan dan program dalam mengembangkan komoditas tanaman hias. Salah satu unsur yang mendukung dalam pengembangan komoditas tanaman hias ini adalah topografi Desa Geger yang terletak di

dataran tinggi dengan suhu udara yang cukup dingin sehingga cocok untuk digunakan menanam tanaman hias, seperti hasil wawancara dengan Bapak Muchamad Mahmudi, selaku Seksi Pembinaan dan Saran Usaha pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Tulungagung, bahwa:

“Mengenai sumberdaya yang tersedia sudah sangat mendukung. Lahan yang tersedia juga ada, Di Desa Geger Kecamatan Sendang masih banyak lahan-lahan kosong baik itu milik masyarakat maupun milik perhutani dan kebanyakan pekarangan rumah warga juga luas yang hanya digunakan untuk menanam rumput sebagai makanan sapi saja, yang sebenarnya lahan itu bisa diolah agar bisa lebih produktif”. (wawancara pada tanggal 19 April 2016 jam 08.35 WIB di Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Tulungagung)

Dari wawancara tersebut dapat di fahami bahwa ketersediaan lahan yang bisa digunakan untuk bertanam masih sangat luas di Desa Geger, namun sebagian warga belum memanfaatkan dengan maksimal. Hal tersebut berkaitan dengan kurangnya pengetahuan masyarakat dan minat masyarakat untuk memanfaatkan lahan yang mereka miliki. Bagi warga yang sudah faham dan sudah mengetahui bahwa lahan yang mereka miliki bisa menghasilkan uang, maka mereka juga akan bersemangat untuk memanfaatkannya. Seperti hasil wawancara dengan Bapak Ratija selaku ketua kelompok tani bunga “Sekar Wilis” bahwa:

“Awalnya saya banyak di caci maki oleh para warga karena menurut mereka menanam bunga ini tidak dapat menghasilkan banyak uang, tetapi setelah kita di ajal untuk berwisata ke daerah Nongkojajar, para warga mulai tertarik dan berinisiatif untuk membuat “*green house*” kecil di pekarangan rumah saya itu. Lalu kami di magangkan di CONDIDO Nongkojajar dan mempelajari bagaimana cara menanam bunga krisan. Setelah kami merasakan keuntungannya, para warga mulai tertarik dan mau memanfaatkan

lahan yang mereka miliki untuk menanam tanaman hias lainnya. Pemerintah juga memberikan bantuan “green house” yang di bangun di atas lahan milik warga dengan sistem sewa tanam yang kemudian hasil panennya akan di bagi dengan pemilik lahan”. (wawancara pada tanggal 23 April 2016 Pukul 14.33 WIB di Kantor Kelompok Tani Bunga “Sekar Wilis” Desa Geger Kecamatan Sendang)

Berdasarkan wawancara tersebut, maka dapat di fahami bahwa ketersediaan lahan di KAS sangat mendukung untuk pengembangan tanaman hias ini, dan kemungkinan untuk memperluas areal tanam masih sangat dimungkinkan. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang tanaman hias, serta melihat potensi pasar yang baik menjadikan masyarakat semakin semangat untuk mengembangkan tanaman hias ini

c. Disposisi (*disposition*)

Disposisi adalah kesanggupan para pemangku kepentingan atau *stakeholder* untuk mengimplementasikan strategi sesuai dengan kemampuan masing-masing pihak. Penyusunan dan implementasi renstra pengembangan kawasan agropolitan di Kabupaten Tulungagung melibatkan beberapa SKPD diantaranya Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura sebagai *leading sector* yang menangani masalah pertanian khususnya, Dinas PU Bina Marga sebagai pelaksana teknis masalah infrastruktur, Dinas Pengairan sebagai pelaksana teknis bidang irigasi dan pengairan, serta beberapa SKPD lainnya. Hal tersebut terjadi karena program ini merupakan program lintas sektoran sehingga memerlukan kerjasama dengan pihak lain atau SKPD lain yang berperan sesuai dengan tupoksi masing-masing.

Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Maya Dewajanti selaku Kasubid Sumberdaya Lahan dan Kelautan pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung bahwa:

“Aktor-aktor yang terlibat dalam implementasi renstra dilapangan harus sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Selain kesanggupan dan kemauan masyarakat untuk melaksanakan program-program dari strategi yang sudah ditetapkan, ada SKPD yang juga berperan sesuai dengan tupoksinya seperti BKPP, PU, Pengairan, Dinperten dan Hutbun.” (wawancara pada tanggal 18 April 2016 jam 08.56 WIB di Kantor Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung)

Sesuai dengan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa kemauan dan kesanggupan dari para *stakeholder* sangat berperan penting dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan dari renstra tersebut. Terutama apabila dilihat dari komoditas yang sedang dikembangkan yaitu tanaman hias yang membutuhkan keterampilan dan keahlian khusus terutama dari petani di lapangan. kesanggupan dari pihak masyarakat atau petani juga sangat mempengaruhi implementasi kebijakan. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Muchamad Mahmudi, selaku Seksi Pembinaan dan SARana Usaha pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Tulungagung bahwa:

“Antusias dan semangat petani juga mempengaruhi pelaksanaannya. Pada awal pengusulan pengembangan tanaman ini saya bertanya pada ketua kelompoknya, apakah mereka memang benar-benar mau berkomitmen untuk mengembangkan tanaman hias ini. Kalau memang bersedia, kami dari dinas akan mengupayakan bantuan-bantuan untuk mereka. Kita lihat memang semangat mereka sangat tinggi, mengingat tanaman hias itu perlu ketelatenan, tidak bisa disamakan dengan tumbuhan yang lainnya.” (wawancara pada tanggal 19 April 2016 jam 08.35 di Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Tulungagung)

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa keterbatasan kemampuan dan pengetahuan dari masyarakat ditah menghalangi semangat mereka dalam mengembangkan komoditas ini. Kesiapan mereka untuk berkomitmen mengembangkan komoditas ini di tanggap positif oleh pemerintah yang kemudian ditindak lanjuti melalui penetapan program dan kebijakan dalam pengembangan komoditas tanaman hias khususnya.

d. Struktur Birokrasi (*bureaucratic structure*)

Struktur birokrasi sangat berperan dalam keefektifan dan efisiensi implementasi suatu kebijakan. Terdapat pembagian wewenang antar *stakeholder*, hubungan antar bagian dalam suatu organisasi serta hubungan antar organisasi atau SKPD. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muchamad Mahmudi, selaku Seksi Pembinaan dan Saran Usaha pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Tulungagung, yang mengemukakan bahwa:

“Di dinas pertanian ini ada banyak bidang bisa di lihat di bagan struktur organisasi itu. Di bidang itu ada yang menangani masalah benih, peralatan pertanian, hingga pemasaran hasil pertanian. tapi untuk tanaman hias di dinas pertanian ditangani bidang produksi tanaman pangan dan hortikultura.” (wawancara pada tanggal 19 April 2016 jam 08.35 WIB di Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Tulungagung)

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa terdapat pembagian wewenang dalam dinas tersebut untuk menangani bermacam-macam komoditas pertanian. selain menangani pada fase produksi, dinas pertanian juga berperan pada penanganan hasil produksi atau pasca panen. Kegiatan pasca panen seringkali dikenal dengan

pemasaran hasil panen. Strategi pemberdayaan masyarakat dengan kegiatan pengembangan sarana dan prasarana pemasaran sudah di susun, akan tetapi pada saat ini dinas pertanian masih belum ada kerjasama dengan SKPD lain dalam hal pemasaran hasil panen. Petani diberikan keleluasaan untuk memasarkan hasil panen melalui mitra pemasaran yang dimiliki oleh petani sendiri.

2. Faktor pendukung dan penghambat Implementasi Renstra dalam Pengembangan Komoditas Sektor Pertanian Sebagai Upaya Peningkatan Daya Saing Daerah pada Agropolitan Tanaman Hias Desa Geger Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung.

a. Faktor Pendukung

Ketersediaan sumber daya di KAS merupakan sebuah syarat bagi keberhasilan dalam mengimplementasikan strategi yang telah di susun oleh pemerintah dalam upaya mengembangkan komoditas tanaman hias agar dapat meningkatkan daya saing terhadap daerah lain. Faktor pendukung dalam mengimplementasikan upaya pemerintah yaitu kondisi wilayah atau topografi kawasan pengembangan tanaman hias serta kemampuan masyarakat di sekitar kawasan tersebut.

1. Letak Geografis

Lokasi pengembangan komoditas tanaman hias di KAS berada pada ketinggian $\pm 1200\text{m}$ di atas permukaan laut dengan suhu $17\text{-}24^{\circ}\text{C}$, curah hujan di KAS berdasarkan data dari BMKG tahun 2015 rata-rata mencapai 85mm dengan jumlah hari hujan 268 hari dan musim

penghujan yang terjadi sepanjang tahun. Selain faktor cuaca, kesuburan tanah di lokasi tersebut sangat bagus digunakan sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Berdasarkan data dari dokumen Pengembangan Kawasan Agropolitan dan Minapolitan di Kabupaten Tulungagung, tanah di kawasan Kecamatan Sendang berasal dari batuan induk atau abu vulkanik Gunung Wilis yang berwarna coklat kehitaman yang kemudian dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. *Litosol* (6.960,526 Ha)
- b. *Andosol* (2.500,000 Ha)
- c. *Mediteran Coklat* (85,000 Ha)

Faktor-faktor tersebut yang sangat mendukung dalam upaya pengembangan tanaman hias di KAS khususnya di Desa Geger, karena tanaman hias seperti bunga krisan, Sedap Malam, Aster, *Peacock*, dan *Pillo Dendron* tidak dapat di budidayakan di sembarang tempat. Seperti Pernyataan dari Bapak Muchamad Mahmudi, selaku Seksi Pembinaan dan Saran Usaha pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Tulungagung, yang mengemukakan bahwa:

“Kenapa memilih lokasi di Desa Geger, itu karena di sana kondisi wilayahnya sangat mendukung, mulai dari suhu udaranya, curah hujan dll. Tanaman bunga ini tidak bisa di tanam di sembarang tempat. Biasanya bisa tumbuh subur di daerah dingin, seperti Batu itu. Tapi saat dicoba di Tanami bunga krisan ini di sana hasilnya sangat bagus, buah-buahan seperti stroberi dan jeruk juga tumbuh subur disana.” (wawancara pada tanggal 19 April 2016 jam 08.35 WIB di Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Tulungagung)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat difahami bahwa topografi wilayah juga sangat menentukan keberhasilan dalam mengembangkan tanaman hias di KAS. Oleh sebab itu, maka pemerintah sangat gencar untuk mengembangkan komoditas ini karena di KAS memiliki daya dukung yang baik untuk menjadikan tanaman hias sebagai produk yang dapat meningkatkan daya saing Kabupaten Tulungagung terhadap daerah lain di sekitarnya.

2. Sumber Daya Manusia

Kemampuan dan kemauan sumber daya manusia untuk terlibat dalam pengembangan tanaman hias merupakan nilai lebih bagi petani bunga. Hal tersebut dikarenakan dalam menanam hingga merawat bunga memerlukan ketelatenan tersendiri, tidak seperti teknik menanam sayuran atau padi pada umumnya. Pelatihan, penyuluhan serta kegiatan magang yang diberikan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura serta Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan pertanian (BKPP) sangat memberikan manfaat bagi para petani bunga. Berikut pernyataan dari Bapak Ratija selaku ketua kelompok tani bunga “Sekar Wilis”.

“Sangat besar sekali manfaat yang kami rasakan. Melalui pelatihan dan magang, kita dapat pengetahuan mengenai tanaman hias, bagaimana cara menanam, merawat, hingga memasarkan tanaman hias. Dengan menanam bunga, kami dapat menambah penghasilan dan mengurangi pengangguran yang ada di daerah ini”. (wawancara pada tanggal 23 April 2016 Pukul 14.33 WIB di Kantor Kelompok Tani Bunga “Sekar Wilis” Desa Geger Kecamatan Sendang)

Sumber daya manusia yang terampil dan telaten menjadikan komoditas tanaman hias dengan kualitas bagus serta memiliki nilai jual

tinggi di pasaran. Selain ketelatenan masyarakat dalam menanam dan merawat tanaman, para petani perempuan juga menerima pelatihan untuk merangkai bunga sehingga dapat menambah nilai jual bunga hasil panen. Hal tersebut selaras dengan pernyataan Ibu Sumilih yang merupakan anggota Kelompok Tani Bunga “Sekar Wilis”

“Selain mendapatkan pelatihan tentang menanam dan merawat bunga krisan, Dinas Pertanian pernah mendatangkai tenaga dari SMK untuk memberikan pelatihan tentang merangkai bunga. Jadi selain menjual pertangkai ke tengkulak, kita juga bisa menerima pesanan dalam bentuk rangkaian bunga”. (wawancara pada tanggal 23 April 2016 Pukul 15.38 WIB di Kantor Kelompok Tani Bunga “Sekar Wilis”

Dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa dukungan dari masyarakat masyarakat berpengaruh pada upaya implementasi kebijakan, program dan kegiatan yang telah disusun oleh pemerintah. Kesiapan para petani untuk mengembangkan tanaman hias menjadi salah satu kunci dalam menjadikan komoditas tanaman hias sebagai salah satu komoditas untuk meningkatkan daya saing Kabupaten Tulungagung terhadap daerah lain di sekitarnya. Bantuan dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura serta BKPP merupakan sinergi antara pemerintah dengan masyarakat sebagai sasarannya untuk mengembangkan komoditas tanaman hias sebagai komoditas baru sektor pertanian Kabupaten Tulungagung yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan di Desa Geger serta peluang pasar yang sangat bagus.

b. Faktor Penghambat

Kendala dalam pemenuhan sarana dan prasarana sangat berpengaruh dalam mengimplementasikan strategi dari pemerintah dalam mengembangkan komoditas sektor pertanian untuk meningkatkan daya saing daerah Kabupaten Tulungagung. Berikut adalah beberapa faktor yang menghambat dalam implementasi strategi pemerintah daerah dalam mengembangkan komoditas sektor pertanian untuk meningkatkan daya saing daerah:

1. Jalur Transportasi

Akses jalan menuju KAS merupakan unsur penting dalam pengembangan komoditas sektor pertanian di kawasan tersebut. Tanpa adanya akses jalan yang memadai maka akan menghambat proses pengangkutan maupun proses pemasaran hasil panen. Berikut pernyataan dari Ibu Maya Dewajanti selaku Kasubid Sumberdaya Lahan dan Kelautan pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung.

“Dalam mengembangkan potensi pertanian yang ada di Kecamatan Sendang, kendala utama kita memang mengenai infrastruktur, jadi ketika kita menemukan potensi yang lain seperti potensi tanaman hortikultura kita terbentur dengan infrastruktur yang ada di sana. Sehingga kita bekerjasama dengan masyarakat untuk memperkirakan kebutuhan yang harus diprioritaskan untuk mengembangkan potensi tersebut dan berkoordinasi dengan Dinas PU mengenai infrastruktur”. (wawancara pada tanggal 18 April 2016 jam 08.56 WIB di Kantor Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung)



Gambar 10. Akses Jalan Menuju Tempat Pembudidaya Tanaman Hias
Sumber: Dokumentasi Peneliti

Dari hasil wawancara tersebut dapat kita ketahui bahwa akses jalan di Desa Geger Kecamatan Sendang masih buruk, hal tersebut yang menjadi kendala dalam pengembang komoditas sektor pertanian terutama pada tanaman hias. dalam hal ini, yang memiliki kewenangan adalah Dinas PU yang telah berupaya untuk memperbaiki jalan-jalan yang digunakan sebagai akses untuk mengangkut hasil panen. Untuk mempermudah pengangkutan hasil panen bunga, petani bunga mendapat bantuan dari Dinas Pertanian seperti pernyataan dari Bapak Ratijo selaku Ketua Kelompok Tani Bunga “Sekar Wilis”:

“Untuk membantu kami karena di daerah ini jalannya rusak dan memang daerah hujan, pemerintah memberikan bantuan sepeda motor roda 3 “Viar” sebagai sarana transportasi untuk mempermudah mengangkut tanaman, namun apabila kondisi jalan masih tetap berlubang dan sangat sempit, ketika musim hujan jalanan juga licin, maka proses pengangkutan tetap mengalami kesulitan”. wawancara pada tanggal 23 April 2016 Pukul 14.33 WIB di Kantor Kelompok Tani Bunga “Sekar Wilis” Desa Geger Kecamatan Sendang)

Bantuan dari pemerintah sangat diharapkan oleh para petani untuk memperbaiki akses jalan. Bantuan tersebut akan sangat membantu petani untuk mengangkut hasil panennya. Selama ini petani telah menerima beberapa bantuan seperti bantuan kendaraan untuk mengangkut tanaman, serta di bangunkan jalan dari lahan pertanian ke jalan raya berupa cor beton yang ketika turun kujan jalan tersebut sangat licin, selain itu jalan tersebut memiliki kemiringan yang sangat curam.

2. Pendanaan

Sumber pendanaan untuk pengembangan agropolitan berasal dari berbagai sumber. Sesuai dengan pernyataan dari Ibu Maya Dewajanti selaku Kasubid Sumberdaya Lahan dan Kelautan pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Tungagung.

“sumber pendanaannya dari berbagai sumber, selama kita bisa mengupayakan, dan sesuai penggunaannya itu bisa, seperti dari APBD II, APBD I, APBD pusat, DAK semua interfensi kesana, karena kalau soal agropolitan kita tidak hanya membicarakan masalah pembudidayaan tetapi juga secara berkelanjutan”. (wawancara pada tanggal 18 April 2016 jam 08.56 WIB di Kantor Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, pemerintah telah mengupayakan pendanaan untuk pengembangan kawasan agropolitan, namun agropolitan sendiri terdiri dari berbagai komoditas, seperti tanaman pangan, perkebunan, perhutanan, serta peternakan, sedangkan di KAS yang menjadi prioritas adalah peternakan karena di kawasan tersebut potensi peternakannya sangat bagus. Sehingga masih belum ada dana yang khusus dialokasikan untuk pengembangan tanaman

hortikultura seperti tanaman hias. Hal tersebut seperti pernyataan dari Bapak Mahmudi selaku Seksi Pembinaan dan Saran Usaha pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Tulungagung.

“Untuk Kabupaten Tulungagung masih belum memperoleh dana yang dialokasikan khusus untuk pengembangan tanaman hias dari provinsi. Di Provinsi Jawa Timur hanya beberapa daerah saja yang memperoleh dana itu seperti di Kabupaten Malang dan Kota Batu yang memang perkembangan tanaman hias di sana sangat bagus. Tetapi dari Dinas Pertanian rencananya akan mengusulkan ke pusat pada tahun 2016”. (wawancara pada tanggal 19 April 2016 jam 08.35 WIB di Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Tulungagung)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, sehubungan dengan belum adanya dana khusus untuk pengembangan tanaman hias, maka Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura akan mengusulkan ke pemerintah pusat agar Kabupaten Tulungagung juga bisa mendapatkan dana tersebut seperti daerah lain yang sudah terlebih dahulu mengembangkan tanaman hias. Dana tersebut sangat dibutuhkan untuk dapat memperluas areal tanam seperti membangun “*Green House*” baru serta mewujudkan wacana pemerintah untuk membangun “Taman Bunga Sekar Wilis” yang akan dimanfaatkan sebagai objek wisata baru di Kawasan Agropolitan Sendang.

C. Analisis Data

1. Implementasi Renstra dalam Pengembangan Komoditas Sektor Pertanian Sebagai Upaya Peningkatan Daya Saing Daerah pada Komoditas Tanaman Hias Desa Geger Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung Berdasarkan Teori George C. Edward III.

Strategi pada umumnya didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana oleh para pemimpin puncak yang berfokus pada pencapaian tujuan jangka panjang organisasi serta menyusun rangkaian upaya yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari Suryono (2004: 80) yang menyatakan bahwa strategi pada prinsipnya berkaitan dengan persoalan suatu kebijakan, penentuan tujuan yang akan dicapai dan penentuan cara-cara atau metode penggunaan sarana-sarana tersebut. Strategi selalu dikaitkan dengan tiga hal yaitu tujuan (*ends*), saran (*means*) dan cara (*ways*).

Berkaitan dengan upaya Kabupaten Tulungagung dalam menjadikan tanaman hias sebagai komoditas yang dapat meningkatkan daya saing, strategi yang telah disusun diantaranya strategi pemberdayaan masyarakat dan strategi pengembangan wilayah telah sesuai dengan Rencana strategi Kementerian Pertanian periode 2015-2019 dimana terdapat Tujuh Gema Revitalisasi yang diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Revitalisasi lahan
- 2) Revitalisasi perbenihan dan pembibitan
- 3) Revitalisasi infrastruktur dan sarana

- 4) Revitalisasi Sumber Daya Manusia (SDM)
- 5) Revitalisasi pembiayaan petani
- 6) Revitalisasi kelembagaan pertanian.

Kegiatan – kegiatan yang telah disusun dalam renstra pengembangan kawasan agropolitan di Kabupaten Tulungagung telah mengandung ke tujuh unsure tersebut. Keberadaan potensi komoditas tanaman hias di Desa Geger Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung dapan dijadikan sebagai peningkat daya saing karena komoditas tersebut hanya dapat di kembangkan di Kecamatan Sendang sedangkan daerah lain disekitar Kabupaten Tulungagung seperti Kabupaten Blitar, Kediri dan Trenggalek belum bisa membudidayakannya sedangkan potensi pasar yang dimiliki komoditas ini sangat baik.

Komoditas ini sangat banyak dibutuhkan pada saat kegiatan dan upacara pernikahan maupun keagamaan. Selain itu, komoditas ini juga dapat menghasilkan lapangan pekerjaan bagi warga sekitar KAS. Kemampuan komoditas tanaman hias untuk meningkatkan daya saing diperkuat dengan pengertian daya saing yang dikemukakan oleh Daryanto dan Hafizrianda (2010: 12) dimana daya saing diartikan sebagai kemampuan sektor bisnis atau perusahaan pada suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan yang tinggi serta tingkat kekayaan yang lebih merata untuk penduduknya. Tujuan dari peningkatan daya saing suatu perekonomian tidak lain adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada daerah tersebut.

Untuk melihat bagaimana implementasi renstra dalam pengembangan komoditas sektor pertanian sebagai upaya untuk peningkatan daya saing, peneliti menggunakan model implementasi yang dikemukakan oleh George C. Edward III, dimana terdapat beberapa unsur implementasi antara lain:

a. Komunikasi (*communication*)

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi antar *stakeholder* terkait. Baik antar SKPD sebagai pelaksana kebijakan maupun dari SKPD kepada masyarakat selaku sasaran. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Tachjan (2008: 28) bahwa yang dimaksud dengan pelaksana kebijakan adalah pihak yang menjalankan kebijakan yang tersiri dari penentu tujuan dan sasaran kebijakan, analisis serta perumus kebijakan. Penyampaian informasi tersebut dilakukan melalui jalan sosialisasi. Seperti yang dikemukakan oleh Widodo (2011: 97) bahwa komunikasi dalam implementasi suatu kebijakan merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy maker*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementers*).

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di lapangan, sosialisasi dilakukan secara terstruktur dari SKPD terkaik kepada masyarakat selaku sasaaran atau penerima program. Hal tersebut sesuai dengan yang dikemukakan oleh Tachman (2006: 35) bahwa kelompok sasaran merupakan target utama yang menjadi tujuan dalam implementasi suatu kebijakan. Sosialisasi dikalukan SKPD sesuai dengan

kewenangannya atau tupoksi masing-masing. Kegiatan ini selain bertujuan agar para *stakeholder* dapat memahami dan menerima dengan jelas apa yang menjadi maksud, tujuan kebijakan tersebut juga apabila bantuan dari pemerintah turun, alokasi ke masyarakat tidak tumpang tindih dengan bantuan dari SKPD lainnya.

SKPD yang memiliki peranan dalam pengembangan kawasan agropolitan melakukan kegiatan sosialisasi antar SKPD setiap 6 bulan sekali, kegiatan tersebut sudah terjadwal. Sedangkan sosialisasi ke masyarakat dilakukan setiap ada bantuan dari pemerintah yang akan turun. Sehingga dalam kegiatan ini memerlukan koordinasi dan kerjasama yang baik antar SKPD terkait.

b. Sumber Daya (*resource*)

Sumber daya memiliki peranan sangat penting dalam implementasi suatu kebijakan. Sumberdaya yang diperlukan dalam hal ini antara lain sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, sumberdaya peralatan dan sumber daya informasi dan kewenangan. Sesuai dengan yang terdapat pada Widodo (2011: 98) bahwa kejelasan dan konsistennya ketentuan atau aturan serta keakuratan penyampaian ketentuan-ketentuan dan aturan tersebut, apabila pelaksana kebijakan yang memiliki tanggung jawab kurang memiliki sumber daya untuk melakukan pekerjaannya secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut juga tidak akan efektif.

SDM merupakan salah satu variabel yang berpengaruh dalam keberhasilan pelaksana kebijakan. SDM harus memiliki pengetahuan dan

keterampilan yang cukup untuk melaksanakan tugasnya. Upaya yang telah dilakukan sesuai dengan strategi pemberdayaan masyarakat diantaranya memberikan pelatihan dan pembekalan kepada SDM yang terlibat baik aparatur pemerintah maupun masyarakat sasaran. Pelatihan bagi aparatur berupa pembekalan tentang pengetahuan. Sedangkan untuk SDM di lapangan berupa pelatihan dan magang terkait pembudidayaan tanaman hias. kegiatan tersebut sangat bermanfaat guna menunjang efektifitas dan efisiensi implementasi kebijakan.

Sumberdaya anggaran juga sangat diperlukan karena digunakan untuk membiayai operasional dalam pelaksanaan kebijakan. Hal tersebut sesuai dengan yang telah dikemukakan oleh Conyers (1984: 273) bahwa anggaran merupakan hal yang sangat penting untuk mengimplementasikan suatu rencana. Sedemikian pentingnya mengakibatkan perlu adanya kajian khusus mengenai hubungan antara perencanaan dan pembiayaan. Akan tetapi terdapat beberapa kendala mengenai anggaran. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran yang dapat dialokasikan pada pengembangan komoditas tanaman hias, karena Kabupaten Tulungagung belum memiliki anggaran khusus yang diperuntukkan bagi pengembangan tanaman hias. Saat ini pemerintah Kabupaten Tulungagung masing-masing mengupayakan berbagai sumberdana yang memungkinkan untuk dialokasikan bagi pengembangan komoditas tanaman hias, agar potensi ini semakin pesat berkembang. Selain anggaran untuk pembiayaan budidaya, peralatan

pertanian sebagai upaya pengembangan teknologi agribisnis juga memerlukan biaya yang tidak sedikit.

c. Disposisi (*disposition*)

Disposisi merupakan kesanggupan *stakeholder* dalam mengimplementasikan kebijakan. Pelaku kebijakan harus memiliki pengetahuan tentang apa yang harus dilakukan dan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan guna tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Hal tersebut sesuai dengan makna disposisi yang telah dikemukakan oleh George C. Edward III.

Kemampuan pelaku kebijakan dapat diperoleh melalui kegiatan penyampaian informasi seperti pada unsur implementasi kebijakan dari Geogr C. Edward III yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian berdasarkan hasil penelitian dilapangan, kesanggupan pelaku kebijakan juga ditetapkan berdasarkan tupoksi masing-masing SKPD yang berlaku sebagai pelaksana kebijakan.

Kegiatan peningkatan peran serta dan kemampuan masyarakat seperti yang terdapat pada strategi pemberdayaan masyarakat yang telah disusun dalam renstra pengembangan kawasan agropolitan Kabupaten Tulungagung juga dapat meningkatkan kemampuan *stakeholder* mengimplementasikan kebijakan sesuai dengan tujuannya. Kegiatan tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada dokumen Rencana Strategi Kementerian Pertanian periode 2014-2019.

d. Struktur Birokrasi (*bureaucratic structure*)

Struktur birokrasi juga sangat berpengaruh pada keefektifan dan efisiensi implementasi kebijakan. Struktur organisasi yang disusun SKPD atau organisasi atau biasa disebut sengan kelompok dilakukan dengan tujuan untuk membagi tugas, kewenangan serta hubungan tanggung jawab antar unit maupun antar organisasi. Organisasi yang terstruktur akan lebih memudahkan dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan. karena setiap unit telah memiliki kewenangan dan tugas masing-masing. Hal tersebut sesuai dengan yang elah dikemukakan oleh Widodo (2011: 90-94) bahwa tahap pengorganisasian lebih mengarah pada kegiatan pengaturan dan penetapan siapa yang menjadi pelaksana kebijakan tersebut, penetapan biaya (baik nominal, sumber biaya, penggunaannya), dan penetapan sarana prasarana apa yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, penetapan tata kerja dan penetapan manajemen pelaksana kebijakan termasuk penetapan pola kepemimpinan serta koordinasi pelaksana kebijakan.

Seperti yang terdapat pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Tulungagung. Tanaman hias merupakan kewenangan dari bidang produksi tanaman pangan dan holtikultura. Selain itu di lapangan. pada Kelompok Tani juga terdapat penyusunan struktur yang juga mengatur tanggung jawab masing-masing anggotanya. Selain penanganan masalah pembudidayaan tanaman hias oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura, komodita tanaman hias juga memerlukan penanganan hasil panen. Pada dinas pertanian juga terdapat

unit yang menangani pemasaran hasil panen, akan tetapi kenyataan yang ada di lapangan petani berusaha mencari mitra pemasaran sendiri. Oleh karena hal tersebut, diperlukan adanya kerjasama dengan SKPD yang dapat membantu pemasaran hasil panen tanaman hias agar dapat meningkatkan perekonomian petani bunga.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Renstra dalam Pengembangan Komoditas Sektor Pertanian Sebagai Upaya Peningkatan Daya Saing Daerah Pada Agropolitan Tanaman Hias Desa Geger Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung.

a. Faktor Pendukung

1) Letak Geografis

Letak geografis adalah letak suatu lokasi atau wilayah yang dilihat dari bentuk fisik disekitarnya. Sesuai dengan pengertian letak geografis yang dikemukakan oleh Suryaatmadja (2008:118) bahwa letak geografis dapat diartikan sebagai letak suatu daerah yang dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Letak geografis suatu wilayah sangat berpengaruh dalam pembangunan di bidang pertanian. Letak geografis suatu wilayah juga berpengaruh pada kesuburan tanah dan iklim.

Penetapan lokasi kawasan agropolitan yang ditetapkan di Kabupaten Tulungagung yaitu Desa Geger telah melalui berbagai identifikasi sumber daya salah satunya adalah SDA. Desa Geger Kecamatan Sendang memiliki lokasi yang sangat bagus untuk mengembangkan pertanian. sesuai dengan Tujuh Gema Revitalisasi dari Renstra Kementerian Pertanian periode

2015-2019, faktor fundamental dalam pertanian adalah ketersediaan lahan dan air yang cukup besar dan memadai.

Berkaitan dengan hal tersebut, KAS Desa Geger memiliki potensi sangat baik yang didukung oleh lokasinya yang berada pada ketinggian $\pm 550\text{m}$ di atas permukaan laut dan secara geografis terletak pada $111^{\circ}24'$ s/d $112^{\circ} 11'$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 53'$ s/d $8^{\circ} 34'$ Lintang Selatan. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari BMKG Kabupaten Tulungagung, keadaan curah hujan di Kecamatan Sendang yang rata-rata pada tahun 2015 mencapai 85mm, dengan jumlah hari hujan 268 hari dari dan musim penghujan yang terjadi sepanjang tahun. Dilihat dari letak secara geografis lokasi KAS tersebut serta lokasinya yang berada pada dataran tinggi, dan juga kondisi iklimnya menunjukkan bahwa lokasi tersebut memang sangat cocok untuk lokasi pengembangan tanaman hias yang memang dalam pengembangan dan budidayanya memerlukan suhu yang relative lembab. Hal tersebut diperkuat dengan hasil produksi selama beberapa tahun terakhir yang semakin meningkat.

2) Sumber Daya Manusia

Pengertian sumberdaya manusia menurut Nawawi (2001:37) adalah semua manusia yang merupakan penduduk atau warga negara suatu negara atau dalam batas wilayah tertentu yang telah memasuki usia kerja, baik yang telah memperoleh pekerjaan maupun yang belum memiliki pekerjaan. Sedangkan pada Rencana Strategi Kementerian Pertanian tahun 2015-2019 dijelaskan bahwa sumberdaya manusia merupakan unsure vital

dan sebagai penggerak dalam pelaksanaan pembangunan pertanian. oleh sebab itu, sumberdaya manusia harus berkompeten agar dapat melaksanakan strategi pengembangan kawasan agropolitan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Peningkatan kemampuan SDM dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan dan praktik lapangan atau magang untuk memperluas pengetahuan dan keterampilan petani.

Pelaksanaan pelatihan dan magang kepada perani bunga “Sekar Wilis” di Desa Geger akan memperluas wawasan petani tentang bagaimana menanam tanaman hias hingga bagaimana pengolahan agar hasil panen bunga memiliki harga jual yang tinggi. Penguatan organisasi kelompok tani juga sangat diperlukan untuk semakin mengembangkan kerjasama dengan pihak lain agar dapat memberikan wawasan mengenai pertanian yang modern dan memberikan inovasi baru pada petani bunga di Desa Geger.

Sumber daya manusia yang dimiliki oleh kelompok petani bunga “Sekar Wilis” sudah cukup kompeten dan kreatif. Banyak petani bunga yang menjual hasil tanaman mereka dengan kreatifitas sedemikian rupa seperti menjual tanaman dalam pot hingga berupa rangkaian bunga. Manfaat dari pelatihan yang diberikan oleh pemerintah daerah mengenai penanaman, perawatan dan pengolahan hasil panen telah diterapkan oleh para petani bunga. Dukungan yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dibuktikan dengan kemampuan petani bunga yang saat ini memiliki

kreativitas semangat serta wawasan luas dalam menanam, merawat dan mengelola hasil panen tanaman hias.

Berdasarkan temuan dilapangan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat dilihat bahwa strategi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah daerah telah dilaksanakan sesuai dengan strategi yang disusun oleh tim POKJA Pengembangan Kawasan Agropolitan dimana dalam rencana strategi tersebut didalamnya terdapat strategi pemberdayaan masyarakat dan strategi pengembangan wilayah. Strategi pemberdayaan masyarakat yang terdapat dalam Dokumen Rencana Strategi Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Tulungagung meliputi:

- a) Meningkatkan peran serta masyarakat.
- b) Meningkatkan kemampuan masyarakat pada kawasan agropolitan.
- c) Mengembangkan kelembagaan agribisnis.
- d) Mengembangkan sarana dan prasarana pemasaran.

b. Faktor Penghambat

1) Jalur Transportasi

Menurut Kamaluddin (2004:15), transportasi adalah merupakan kegiatan pemindahan barang dan penumpang dari suatu tempat ke tempat lain. Kemudian, Nasution (2004:15) juga mendefinisikan transportasi sebagai pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. Selarah dengan definisi transportasi tersebut, maka dapat diartikan bahwa

proses pengangkutan merupakan serakan yang terjadi dari tempat asal, darimana kegiatan pengangkutan dimulai kemudian menuju ke tempat tujuan, kemana kegiatan pengangkutan tersebut diakhiri. Unsur-unsur transportasi antara lain:

- a) Manusia yang membutuhkan.
- b) Barang yang dibutuhkan.
- c) Kendaraan sebagai alat atau sarana.
- d) Jalan dan terminal sebagai prasarana transportasi.
- e) Organisasi (pengelola transportasi)

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di kawasan agropolitan Desa Geger Kecamatan Sendang, sarana dan prasarana yang ada di Desa Geger Kecamatan Sendang masih belum berjalan dengan baik dan masih perlu adanya perbaikan jalan oleh pemerintah. Perbaikan sarana prasarana transportasi bertujuan untuk mendorong pergerakan pembangunan ekonomi petani dan meningkatkan minat masyarakat dalam kegiatan ekonomi pada sektor pertanian. kegiatan ekonomi dengan transportasi memiliki keterkaitan yang sangat penting dan memiliki hubungan erat antara satu sama lain.

2) Pendanaan

Pendanaan menjadi penting dalam menentukan keberhasilan suatu program. Terkadang program memerlukan dana yang banyak untuk mendapatkan hasil yang berkualitas. Hal ini sesuai dengan yang telah dikemukakan oleh George C. Edward II dalam Widodo (2011:98) bahwa

salah satu sumberdaya yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan adalah sumberdaya anggaran. Sumberdaya anggaran merupakan hal yang mempengaruhi keefektifan sebuah kebijakan karena anggaran merupakan dana yang digunakan untuk membiayai operasionalisasi dalam pelaksanaan kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di KAS Desa Geger, pendanaan merupakan salah satu faktor penghambat yang dialami dalam implementasi strategi, hal tersebut sesuai dengan pendapat dari Sunggono (1994:51) yang menyatakan bahwa salah satu faktor penghambat dari implementasi adalah faktor biaya.

Berdasarkan Rencana Strategi Kementerian Pertanian periode 2015-2019, akses permodalan petani kelas menengah ke bawah merupakan salah satu permasalahan yang menjadi kendala dalam pembangunan pertanian di Indonesia. Terdapat beberapa usaha yang dapat dilakukan oleh pemerintah antara lain:

- 1) Penyediaan sistem kredit dengan kemudahan proses administrasi.
- 2) Memperluas sistem kredit baru dengan persyaratan yang lebih mudah.
- 3) Menumbuhkan kelembagaan ekonomi makro di pedesaan
- 4) Melakukan koordinasi dengan instansi pusat dan daerah untuk mempermudah petani dalam mengakses sumber pembiayaan koperasi.
- 5) Menumbuhkan koperasi khusus bidang pertanian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Strategi yang telah disusun oleh pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung dalam upaya mengembangkan potensi pertanian terutama pada komoditas tanaman hias sesuai dengan Rencana Strategi Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Tulungagung sudah baik dimana strategi tersebut antara lain:

- 1) Strategi pemberdayaan masyarakat, yang didalamnya tertapat kegiatan antara lain:

- Peningkatkan peran serta masyarakat melalui pelibatan masyarakat baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta proses evaluasi strategi.
- Peningkatkan kemampuan masyarakat pada kawasan agropolitan melalui pendidikan, pelatihan dan praktik kerja lapangan yang berkaitan dengan pengembangan dan budidaya tanaman hias.
- Mengembangkan kelembagaan agribisnis untuk menunjang pengembangan dan keberlanjutan usaha di kawasan agropolitan melalui meningkatkan kelembagaan petani seperti kelompok tani, kelembagaan kemitraan antar petani dengan pengusaha lain penyedia sarana produksi, pemasaran serta kelembagaan pendanaan kelompok.

- Mengembangkan sarana dan prasarana pemasaran terutama prasarana angkutan jalan pedesaan yang bertujuan untuk menjamin akses pengangkutan produk pertanian.

2) Strategi pengembangan wilayah melalui kegiatan:

Pengembangkan sarana prasarana ekonomi yang mendukung pengembangan usaha pertanian yang berupa jalan desa, jalan usaha tani, sarana pengairan, transportasi dan telekomunikasi.

- Penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi petani dan pelaku agribisnis lainnya yang berada di kawasan agropolitan Kecamatan Sendang. usaha ini dilakukan dengan mempermudah pengadaan barang modal, memperoleh kepastian hukum, penyederhanaan prosedur perijinan usaha, serta dukungan kebijakan dari pemerintah.
- Mengembangkan teknologi di bidang agribisnis guna meningkatkan produktivitas, meningkatkan mutu dan diversifikasi produk olahan baik usaha kecil, menengah dan besar.
- Penyusunan *masterplan* pengembangan kawasan agropolitan yang dijadikan sebagai acuan masing-masing wilayah agropolitan di Kecamatan Sendang.
- Identifikasi potensi dan masalah yang bertujuan untuk mengetahui kondisi dan potensi lokal yang dimiliki oleh Kecamatan Sendang yang kemudian pemerintah kabupaten mengusulkan untuk ditetapkannya sebagai kawasan agropolitan.

- Sosialisasi program pengembangan kawasan agropolitan kepada seluruh *stake holder* yang terkait dengan pengembangan program agropolitan baik di tingkat pusat maupun daerah agar kegiatan pengembangan tersebut lebih terkoordinasi dan terintegrasi.

Untuk melaksanakan strategi pengembangan kawasan tersebut, terdapat beberapa langkah implementasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tulungagung sesuai dengan model implementasi yang dikemukakan oleh George C. Edward III, dimana dalam implementasi strategi tersebut dapat dikatakan cukup baik dilihat dari:

- Komunikasi atau sosialisasi kepada pelaksana dan sasaran kebijakan yang telah dilakukan sangat membantu efektifitasn dan efisiensi pelaksanaan kebijakan.
- Sumber daya yang dimiliki oleh Kabupaten Tulungagung sangat mendukung dalam pelaksanaan renstra pengembangan kawasan agropolitan. Sumber daya yang dimaksud meliputi SDM dan sumber daya informasi dan kewenangan. Sedangkan untuk sumberdaya anggaran pelaksanaan kebijakan tersebut masih belum bisa maksimal karena keterbatasan anggaran yang dapat dialokasikan untuk pengembangan komoditas tanaman hias. Selain itu, ketersediaan teknologi pembudidaya juga masih menjadi faktor penghambat dalam pengembangan komoditas tanaman hias di Desa Geger Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung.

- Disposisi atau kemauan dan kesanggupan pelaksana kebijakan untuk mengimplementasikan renstra sudah sangat baik karena pelimpahan tugas telah disesuaikan dengan kemampuan atau tupoksi dari SKPD terkait.
 - Struktur birokrasi yang telah disusun memiliki peranan penting dalam keefektifan dan efisiensi pelaksanaan kebijakan. Struktur organisasi tersebut mengatur tentang pembagian tugas setiap unit dalam suatu organisasi baik organisasi dalam pemerintahan maupun organisasi masyarakat di lapangan yang merupakan sasaran pelaksanaan kebijakan.
2. Terdapat beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat dalam mengimplementasikan strategi pengembangan kawasan agropolitan tersebut diantaranya:
- 1) Faktor pendukung yang sangat berpengaruh pada implementasi strategi pengembangan kawasan agropolitan tersebut adalah
 - Letak geografis yang dimiliki oleh kawasan agropolitan dan
 - Sumber daya manusia yang memiliki semangat dan niat untuk melakukan pengembangan dan budidaya tanaman hias di kawasan agropolitan. Keterbatasan pengetahuan tidak menjadi halangan untuk masyarakat tersebut.
 - 2) Beberapa faktor yang menghambat dalam mengimplementasikan strategi tersebut antara lain:

- Jalur transportasi yang masih cukup sulin untuk diakses kendaraan,
- Anggaran yang masih kurang untuk memenuhi kebutuhan pengembangan dan budidaya tanaman hias ini, terutama untuk membeli alat-alat pembibitan.

B. Saran

Saran yang direkomendasikan oleh peneliti terkait dengan permasalahan yang terjadi dalam proses implementasi renstra untuk mengembangkan Kawasan Agropolitan sebagai upaya peningkatan daya saing antara lain:

1. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan SKPD lain terutama berkaitan dengan pemasaran hasil panen produksi tanaman hias agar wilayah pemasaran dapat meluas sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Selain itu perlu adanya pengembangan bidang teknologi terutama teknologi pembibitan tanaman hias yang merupakan modal utama pengembangan komoditas tanaman hias yang dapat di gunakan sebagai peningkatan daya saing di Kabupaten Tulungagung.
2. Lebih menggali potensi yang dapat mendukung perkembangan kawasan agropolitan baik potensi alam maupun SDM-nya. Untuk kendala mengenai anggaran, agar pemerintah berupaya mengusulkan anggaran khusus ke pemerintah pusat terkait dengan potensi pengembangan tanaman hias yang dimiliki oleh Kabupaten Tulungagung seperti daerah lain yang memiliki potensi sebagai contoh Kabupaten Malang, Pasuruhan, dan Batu.

Daftar Pustaka

- Abdul Wahab, Solichin, 2004. *Analisis Kebijakan, Dan Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Abdul Wahab, Solichin. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press.
- Abdullah, Piter dkk. 2002. *Daya Saing Daerah: Konsep dan Pengukurannya di Indonesia*. Yogyakarta: BPEE.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Andrew, Madegwa. 2013. *Barriers to Strategy Implementation by Mid Sized Companies in Kenya*. Global Journals Inc. (USA). Vol.13, Issue. 12 1-7.
- Arsyad, Lincoln. 2010. *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: STIM YKPN Yogyakarta.
- BAPPEDA Kabupaten Tulungagung. 2014. *Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)* Kabupaten Tulungagung Tahun 2014-2018.
- . 2005. *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)* Kabupaten Tulungagung Tahun 2005-2025.
- . 2012. *Masterplan Agropolitan Kabupaten Tulungagung 2012*.
- Bryson, John M. 2007. *Perencanaan Strategis bagi Organisasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Conyers, Diana. 1984. *An Introduction to Development Planning in the Third World (Public Administration in Developing Countries)*. Jihn Wiley & Sohns.Austratlia.
- Daryanto, Arief dan Hafizrianda, Yundy. 2010. *Model-model Kuantitatif Untuk Perencanaan Pembangunan ekonomi Daerah : Konsep dan Aplikasi*. Bogor : IPB Press.
- David, Fred. 2002. *Manajemen Strategis Konsep*. Edisi Ketujuh, Pearson Education Asia Jakarta: PT. Prenhalindo.

- Dwidjowijoto, Riant Nugroho. 2004. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Hanani, Nuhfil. 2003. *Strategi Pembangunan Pertanian*. Yogyakarta :Pustaka Jogja Mandiri.
- Irsanarham. 2011. *Potensi Strategis Pertanian dalam Membangun Perekonomian*.(Online).http://ihsanarham.multiply.com/journal/item/25/potensi_Strategis_Pertanian_dalam_Membangun_Perekonomian_indonesia. Diakses Tanggal 24 April 2016.
- Kuncoro, Mudrajat. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*. Jakarta: Erlangga.
- M Tambunan, Rudi. 2013. *Standart Operating Prosedures (SOP)*. Jakarta: MAIESTAS PUBLISHING.
- Miles, M.B., Huberman dan Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis*, USA: SAGE Publication, Inc.
- Moleong, J.Lexy. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, "Auditing", Buku I, Edisi 6, 2002, Jakarta: Salemba Empat.
- Musyoka, L. 2011. *Challenges of Strategy Implementation in Jomo Kenyatta Foundation*. International Journal of Current Research. Vol.3, Issues. 11 303-308.
- Musyoka, L. 2011. *Challenges of Strategy Implementation in Jomo Kenyatta Foundation*. International Jurnal of Current Research. Vol.3 Issue 11. 301-308.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, 2013. *Metode Penelitian: Memberikan Bekal Teoritis pada Mahasiswa tentang Metodologi Penelitian serta Diharapkan dapat melaksanakan Penelitian dengan Langkah-Langkah yang Benar*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nazir, Muhammad. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nilga, Mareta Setia. 2012. *Analisis Perubahan Struktur Ekonomi dan Penentuan Sektor Unggulan Kota Surabaya Tahun 2007-2011*. Universitas Negeri Surabaya.
- Nugroho, riant. 2009. *Public Policy*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia Jakarta.

- Riyadi dan Supriady, Deddy. 2003. *Perencanaan Pembangunan Daerah : Strategi Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rustiadi, Eman dan Saefulhakim, sunsun,dkk. 2011. *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Saldans, Johnny, et al., 2014. *Qualitative Data Analysis- Third Edition*. London Sage, Publication Ltd.
- Salusu, A.I. 1999. *Kiat Memilih Bibit Tanaman*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sjafrizal. 2008. *Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi*. Sumatera Barat: Baduose Media.
- Sugiono. 2005. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta.
- , 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R &D*. Penerbit Alfabeta. Bandung.
- Suharsini, Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Sumaatmadja, Nursid. 2008. *Suatu Pendekatan dan Analisis Keruangan*. Bandung: Alumni.
- Suparmoko, M. 2002. *Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Suryono, 2004, *Teori dan Isu Pembangunan*. Malang: Universitas Malang Press.
- Suryono, Agus. 2006. *Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan dalam Prospektif Teori Ilmu Sosial*. Malang: Universitas Negeri Malang.
- Syafrudin, Ateng. 1993. *Perencanaan Administrasi Pembangunan Daerah*. Bandung: Mandar Maju.
- Tachjan. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1996. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: Gunung Agung.

Undang-undang (UU) Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah.

Undang-undang No.25. 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

Wasim, Muhammad. 2014. *Strategic Planning and Reality of External Environment of Organizations in Conpemporary Business Environments*. Journal Business Management and Strategy. Vol.5, 165-182.

Wibowo, Edi. 2008. *Perencanaan dan Strategi Pembangunan Di Indonesia*. Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan Vol.8. No.1.

Widodo. Joko. 2011. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik)*. Malang: Bayu Media.

Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Prassindo.



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

LAMPIRAN





PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jln. Yos Sudarso III/7 Telp. (0355) 320726-327556
 TULUNGAGUNG Kode Pos 66212

Tulungagung, 13 April 2016

Nomor : 072/ 779/ 204 /2016
 Sifat : Segera
 Lampiran : -
 Perihal : **Rekomendasi Penelitian/Survey**

Kepada :
 Yth. Sdr. Kepala Badan Ketahanan Pangan dan
 Penyuluhan Kab. Tulungagung

di
TULUNGAGUNG

Menunjuk Surat : Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang
 Tanggal : 7 April 2016
 Nomor : 5526/UN.10.3/PG/2006
 Bersama ini diberitahukan bahwa :
 Nama : SHELI AKNESTESIA
 Alamat : Ds. Selorejo RT 01 / RW 01, Kec. Ngunut, Kab. Tulungagung
 Kebangsaan : Indonesia
 Yang bersangkutan diberikan Rekomendasi untuk Ijin survey / Pengambilan Data:
 Judul/Data/Proposal : "Implementasi Strategi Pemerintah Dalam Mengembangkan
 Komoditas Sektor Pertanian Sebagai Upaya Peningkatan Daya Saing
 Daerah (Studi Pada Agropolitan Bunga Krisna Desa Geger
 Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung"

- Pengikut : -
 Waktu : 2 (dua) bulan terhitung mulai tanggal surat diterbitkan
 Lokasi : Desa Geger, Kecamatan Sendang
 Ketentuan :
1. Pemohon ijin Penelitian /Pengambilan Data Data wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku.
 2. Pelaksanaan ijin Penelitian /Pengambilan Data Data agar tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah setempat
 3. Dalam jangka waktu yang telah ditentukan, setelah selesai melaksanakan ijin Penelitian/Pengambilan Data harap melaporkan hasilnya kepada Pemerintah Kabupaten Tulungagung, cq. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tulungagung
 4. Apabila tidak melaporkan hasil ijin Penelitian /Pengambilan Data maka Bakesbang Pol Kabupaten Tulungagung akan mengirim surat kepada yang bertanggung jawab pada acara tersebut dan cacat hukum
 5. Permohonan ijin Penelitian /Pengambilan Data hanya dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya (tidak boleh digunakan untuk kegiatan lainnya
 6. Pemohon ijin Penelitian /Pengambilan Data tetap berpedoman dan menghormati ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Demikian Rekomendasi Ijin Penelitian disampaikan, mohon di fasilitasi sesuai kebutuhan dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KABUPATEN TULUNGAGUNG



Tembusan:
 Yth. 1. Sdr. Dandim 0807 / Pasi I Tulungagung
 2. Sdr. Kanalrec/Kasat Intelkam Tulungagung



FOTO-FOTO



Wawancara dengan Bapak Mahmudi



Wawancara dengan Ibu Erlin BKPP



Wawancara dengan ketua Gapoktan



Wawancara dengan anggota poktan



Wawancara dengan anggota poktan



Green House Bunga Krisan



Kegiatan Studi Banding



Pelatihan merangkai bunga



Bantuan pemerintah sarana transportasi, green house dan bibit bunga